



2
0
2
5

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Kendari, 23 Januari 2026

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari

Disusun oleh:

Ketua Tim,
Kepala Subbagian Umum

Asep Saepulloh, S.P., M.Si

Rasdiana Alimuddin, S.Pi

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja PPS Kendari Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPS Kendari kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun - tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di tahun 2025.

Melalui laporan ini diharapkan agar pembaca dapat memahami upaya - upaya yang telah dilakukan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Diharapkan pula agar diperoleh masukan dan saran yang positif guna perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun berikutnya.

Kendari, 23 Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
EXCUTIVE SUMMARY	x
BAB I	
PENDAHULUAN	12
1.1 LATAR BELAKANG	12
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	13
1.3 SDM PELABUHAN	15
1.4 PERMASALAHAN	16
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	20
BAB II	22
PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	22
2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	26
2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	28
2.4 RENCANA AKSI	30
BAB III	43
AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	43
3.2 REALISASI ANGGARAN	156
BAB IV	158
PENUTUP	158
4.1. KESIMPULAN	158
4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	158
4.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	159
LAMPIRAN	160

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi ASN PPS Kendari Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	16
Tabel 2. Indikator Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	29
Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025	30
Tabel 4. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025	31
Tabel 5. Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025	32
Tabel 6. Rencana Aksi Perubahan I Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 ..	34
Tabel 7. Rencana Aksi Perubahan II Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 ..	37
Tabel 8. Rencana Aksi Perubahan III Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 ..	40
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025	43
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja "Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	47
Tabel 11. Laporan Target & Realisasi PNBPNon SDA Per Akun Tahun 2025.....	48
Tabel 12. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	51
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja "Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	53
Tabel 14. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Volume Produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari" Tahun 2025	56
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	60
Tabel 16. Rekapitulasi Permohonan Pengusahaan berupa Tanah dan Bangunan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	61
Tabel 17. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	67
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	70
Tabel 19. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	72
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	74

Tabel 21. Rekapitulasi Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025.....	74
Tabel 22. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025	76
Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025	81
Tabel 24. Rekapitulasi Pengembangan Fasilitas Eksisting Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025.....	81
Tabel 25. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025....	85
Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025.....	88
Tabel 25. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2024	89
Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2025	93
Tabel 29. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2025	95
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Tahun 2025.....	99
Tabel 31. Formula Perhitungan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.....	99
Tabel 32. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Tahun 2025	101
Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan” Tahun 2025	115
Tabel 34. Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Tahun 2025.....	115
Tabel 35. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan” Tahun 2025	117
Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja “Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025	120
Tabel 37. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025.....	121

Tabel 38. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP	123
Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja "Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	124
Tabel 40. Lembar Kerja Evaluasi PM SAKIP Tahun 2025	124
Tabel 41. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	125
Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja "IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	133
Tabel 43. Rekapitulasi Capaian Nilai IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari ...	133
Tabel 44. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Nilai IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	135
Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	138
Tabel 46. Hasil Perhitungan Capaian "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	138
Tabel 47. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	139
Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	141
Tabel 49. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	142
Tabel 50. Capaian Indikator Kinerja "Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	146
Tabel 51. Rekapitulasi Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025	146
Tabel 52. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	147
Tabel 53. Capaian Indikator Kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025.....	150
Tabel 54. Rekapitulasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Perikanan Samudera Kendari.	150
Tabel 55. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025	151

Tabel 56. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025.....	153
Tabel 57. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari ” Tahun 2025	155
Tabel 58. Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	156
Tabel 59. Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Berdasarkan Kegiatan	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025	15
Gambar 2. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I.....	23
Gambar 3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru	25
Gambar 4. Kegiatan Penunjang Pencapaian PNPB Non SDA	53
Gambar 5. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap.....	59
Gambar 6. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	69
Gambar 7. Sertifikat Penghargaan Indikator Kinerja Pelabuhan dengan predikat SANGAT BAIK	71
Gambar 8. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan	73
Gambar 9. Kegiatan Penunjang Pencapaian Tingkat Kinerja Kesyahbandaran	80
Gambar 10. Kegiatan Penunjang Pencapaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.....	87
Gambar 11. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai Pengendalian Lingkungan.....	92
Gambar 12. Kegiatan Penunjang Pencapaian Kapal Perikanan Izin Daerah	98
Gambar 13. Kegiatan Penunjang IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.....	113
Gambar 14. Penunjang Pencapaian Nilai PM WBK ZI	119
Gambar 15. Kegiatan Penunjang Pencapaian Presentase Hasil Pengawasan	122
Gambar 16. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	126
Gambar 17. Perjanjian Kinerja Tahun Perubahan I Tahun 2025.....	127
Gambar 18. Dokumen rencana aksi, manual IKU, dan rincian indikator kinerja	128
Gambar 19. Publikasi Capaian IKU Tahun 2025	128
Gambar 20. Perhitungan Dimensi Kualifikasi Pendidikan IP ASN	130
Gambar 21. Perhitungan Dimensi Kompetensi IP ASN	131
Gambar 22. Perhitungan Dimensi Kinerja IP ASN	131
Gambar 23. Perhitungan Dimensi Disiplin IP ASN.....	131
Gambar 24. Kategori Penilaian Tingkat IP ASN	132
Gambar 25. Kegiatan Penunjang Pencapaian IP ASN PPS Kendari	137
Gambar 26. Kegiatan Penunjang IKU Nilai IKPA.....	148
Gambar 27. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	152
Gambar 28. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai SKM	156

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian PNBP Non SDA.....	49
Grafik 2. Perbandingan Capaian IKU Penerimaan PNBP Tahun 2020 - 2025.....	50
Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Produksi PPS Kendari.....	54
Grafik 4. Capaian Nilai Produksi PPS Kendari	54
Grafik 5. Perbandingan Capaian Volume Produksi	55
Grafik 6. Perbandingan Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan Tahun 2020-2025..	66
Grafik 7. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Tahun 2025.....	70
Grafik 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Tahun 2020-2025.....	71
Grafik 9. Perbandingan Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2020-2025	75
Grafik 10. Perbandingan Capaian Presentase Pengembangan Fasilitas Tahun 2020-2025 ...	84
Grafik 11. Capaian Bulanan Nilai Pengendalian Lingkungan.....	88
Grafik 12. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan Tahun 2020-2025	89
Grafik 13. Rekapitulasi Capaian Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)	94
Grafik 14. Perbandingan Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah.....	94
Grafik 15. Perbandingan Capaian PM ZI Tahun 2020-2025.....	117
Grafik 16. Grafik Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan	120
Grafik 17. Perbandingan Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan.....	120
Grafik 18. Perbandingan Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2020-2025	125
Grafik 19. Perbandingan Capaian IP ASN Tahun 2020-2025	134
Grafik 20. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Tahun 2020-2025	142
Grafik 21. Perbandingan Capaian Nilai IKPA Tahun 2020-2025	146
Grafik 22. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2019-2024 .	150
Grafik 23. Grafik Hasil Penyelenggaraan SKM	154
Grafik 24. Perbandingan Capaian SKM Tahun 2020 – 2025	154

EXECUTIVE SUMMARY

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan sebagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama untuk memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasi sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti ditargetkan dalam Renstra 2025-2029, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, namun juga komitmen, keterlibatan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan akuntabilitasnya. Secara kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,06 sebagaimana *dashboard* di bawah ini:



Dari 5 sasaran Kegiatan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja, sebanyak 3 sasaran yang terukur dinyatakan Istimewa dan 2 sasaran dinyatakan Baik.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025 telah dikeluarkan anggaran sebesar **Rp20.797.677.933** atau **39.94%** dari Pagu sebesar **Rp52.074.444.000**. (Realisasi menggunakan data dari Sistem Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang disingkat aplikasi OM-SPAN dimana data realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi)).

Sedangkan, apabila menggunakan aplikasi SAKTI, realisasi anggaran tahun 2025 sebesar **Rp20.805.533.092** atau sebesar **42.42%** dengan pagu sebesar **Rp52.074.444.000** (dimana pagu blokir sebesar Rp3.025.427.000 tidak diperhitungkan). Adapun anggaran yang bersumber dari dana PHLN sebesar Rp28.126.000.000 belum dapat terealisasi pada tahun ini yang menyebabkan semakin kecilnya nilai penyerapan pada tahun 2025. Apabila jumlah total pagu efektif dikurangi dengan anggaran yang bersumber dari PHLN, persentase penyerapan sebesar **99,43%** dengan total realisasi sebesar **Rp20.805.533.092** dari total pagu efektif sebesar **Rp20.923.017.000**. Bagaimanapun juga sesuai dengan intruksi Presiden RI bahwa penyerapan Anggaran setiap instansi pemerintah harus lebih optimal, jika perlu harus mendekati angka 98 %, hal itu artinya bahwa anggaran yang mampu diserap pada akhirnya akan bergulir kepada masyarakat sehingga perekonomian secara nasional berkembang dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Namun demikian, efisien penggunaan anggaran tetap harus dikedepankan, khususnya efisiensi yang berasal dari pengadaan barang/jasa, dan penghematan lainnya yang dianggap perlu dengan tidak mengurangi efektifitas organisasi dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis masing – masing.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

12

Tugas dan Fungsi

13

SDM Pelabuhan

15

Permasalahan

16

Sistematika Penyajian

20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi : pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggung jawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *LogBook*;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;

12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, maka struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

1.3 SDM PELABUHAN

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Samudera Kendari berjumlah 136 orang yang terdiri 96 orang ASN, 20 orang Jasa Lainnya Perorangan, dan 20 orang tenaga outsourcing yang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi ASN PPS Kendari Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD
1	Laki-Laki		8	19	17	5	31		80
2	Perempuan		3	7	1		5		16
	Jumlah		11	26	18	5	36		96

1.4 PERMASALAHAN

Secara umum Perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks karena terkait dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Ada berbagai isu yang muncul saat ini terkait dengan pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian SDI dan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan. Praktek-praktek IUU Fishing yang terjadi baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun oleh kapal-kapal perikanan asing yang menyebabkan kerugian dari berbagai aspek.

Kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah, untuk itu kapasitas dan kapabilitas petugas pengawasan harus terus ditingkatkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- 1) Kapasitas Nelayan; Rendahnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta yang ramah lingkungan, dan rendahnya pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, karena itu PPS Kendari terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran pelaku utama terutama nelayan.
- 2) Kesejahteraan Nelayan; Belum terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga nelayan serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengakses sumber

permodalan dan mengelola keuangan dalam menghadapi kerentanan usaha penangkapan ikan terhadap perubahan lingkungan dan cuaca.

- 3) Mindset Masyarakat Perikanan Tangkap; Usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan
- 4) Sarana Prasarana Usaha Penangkapan Ikan; Belum optimalnya infrastruktur pelabuhan perikanan, konektivitas sistem informasi yang kurang, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, kurangnya pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien
- 5) Konektivitas Analisis dan Pemantauan Pemanfaatan Usaha; Belum jelasnya mekanisme pendataan nelayan kecil, serta belum optimalnya integrasi perizinan usaha antara pusat-daerah, dan kurangnya intensifikasi penggunaan sistem IT.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, diantaranya adalah (1) Optimalisasi kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), (2) Harmonisasi tata ruang laut dan darat untuk penguatan penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT), (3) Masih terjadinya praktek IUU *fishing* dan *destructive fishing*, dan (4) Sinergi stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan. Dalam kondisi ini nelayan terkendala dengan pemenuhan persyaratan prosedural perbankan yang dianggap cukup rumit dan panjang.

Kondisi kesejahteraan pada nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas.

Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015 utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor termasuk dalam mengakses pembiayaan, perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk.

Dalam menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melakukan analisis dalam memetakan lingkungan strategis organisasi dengan teknik analisis kekuatan (*strength*) - kelemahan (*weakness*) - peluang (*opportunities*) - hambatan (*threats*) atau SWOT Analisis sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

• **Faktor Internal**

a. Kekuatan (*Strength*)

Dengan memperhatikan *stakeholders* dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Lokasi PPS Kendari yang langsung menghadap Laut Banda adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-714 dan 715) dengan beberapa keanekaragaman sumberdaya ikan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi yang masih potensial untuk dikembangkan pengelolaannya.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master plan.
- 3) Tersedianya data statistik dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab.
- 4) Tersedia dan telah operasionalnya prasarana pelayanan terpadu di kawasan PPS Kendari.
- 5) Pelayanan Publik berstandar ISO 9001 : 2008

b. Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, analisis terhadap lingkungan internal juga memperhatikan unsur-unsur kelemahan yang harus dipertimbangkan antara lain :

- 1) Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang masih kurang memadai.
- 2) Penurunan kapasitas fasilitas pokok pelabuhan terutama pendangkalan kolam pelabuhan
- 3) Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan.
- 4) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran serta keterampilan nelayan dalam penanganan ikan hasil tangkapan

• Faktor Eksternal

a. Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan perikanan tangkap sesuai visi dan misi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

- 1) Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kota Kendari.
- 2) Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3) Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.
- 4) Aksesibilitas distribusi hasil perikanan.

b. Ancaman/Tantangan

Adapun beberapa ancaman/tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya komitmen instansi terkait dalam penerapan regulasi perikanan.
- 2) Maraknya pembangunan industri diluar Kawasan sehingga mengancam eksistensi industri dalam kawasan.
- 3) Pendaratan ikan belum mampu memenuhi kapasitas pengolahan ikan yang ada dalam Kawasan.
- 4) Masih rendahnya kemampuan masyarakat menyerap informasi yang ada di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

- 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.
- 6) Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weakness) peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja selama kurun waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2025. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja (Lkj) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2025 sebagai berikut

1. Ikhtisar Eksekutif / *Executif Summary*

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggungjawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode tahun yang tertentu (tahun pelaporan).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah ditanda tangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan samudera Kendari dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

22

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

26

Indikator Kinerja Tahun 2025

28

Rencana Aksi

30

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-20245 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama penguatan transformasi. Untuk itu di dalam 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesiambungan Pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2025-2029. KKP berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut:

Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I



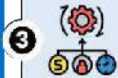
1 Transformasi Sosial

- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
- Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif



2 Transformasi Ekonomi

- Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan
- Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
- Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama
- Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia
- Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa



3 Transformasi Tata Kelola

- Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
- Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
- Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
- Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
- Kebijakan pembangunan berbasis bukti
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Peningkatan pelayanan public berbasis teknologi informasi
- Penguatan kapasitas masyarakat sipil



4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepimpinan Indonesia

- Pembaharuan substansi hukum
- Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
- Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional
- Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai
- Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif
- Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan
- Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi
- Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri



5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
- Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
- Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan
- Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK



6 Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

- Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi
- Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa)
- Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital
- Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)



7 Kesisinambungan Pembangunan

- Reformasi tata kelola fiskal
- Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah

Gambar 2. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Main System Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. Market Driven Oriented

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan kelautan dan perikanan memperhatikan 4 prinsip pembangunan yaitu; 1) **Tematik**, mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; 2) **Holistik**, mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan; 3) **Integratif**, sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan 4) **Spasial**, pengembangan kawasan berbasis daya dukung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan yaitu; sosial, lingkungan, dan ekonomi.



Gambar 3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru

Maka, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah: 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan; 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik, pemerintah telah mengidentifikasi lima arah kebijakan pengarusutamaan yang bersifat inovatif dan adaptif. Kelima arah kebijakan ini saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan serta menjadi landasan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 – 2029, tujuan dari Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Dalam mencapai tujuan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa sasaran strategis yang kemudian dilakukan penjenjangan hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yaitu:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp Juta)
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton).
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis/dan atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai).
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal);
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai).

5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (nilai);
 - b. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (indeks);
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - f. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks);

2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari menetapkan indikator kinerja dan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya. Adapun indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PJ
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,241.04	Tim Kerja Pelayanan Usaha
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkatkan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000	Tim Kerja Operasional
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87	Tim Kerja Operasional
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	Tim Kerja Kesyahbandaran
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333	Tim Kerja Kesyahbandaran
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	Tim Kerja Kesyahbandaran
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5	Tim Kerja Dukungan Manajerial

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PJ
	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. **51.259.064.000** Pagu tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

No	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;	32.263.573.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan;	34.010.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.	18.961.481.000
TOTAL		51.259.064.000

Pada triwulan IV terdapat penambahan pagu belanja gaji sebesar Rp1.438.130.000, RO Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola

dan operasional sesuai standar sebesar Rp635.941.000 dan layanan perkantoran sebesar Rp85.866.000 sehingga pagu anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari bertambah menjadi **Rp52.074.444.000**

Tabel 4. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

No	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;	32.219.638.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan;	6.621.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.	19.848.185.000
TOTAL		52.074.444.000

2.4 RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan learning and growth sebagaimana pada Tabel berikut ini:

Tabel 5. Rencana Aksi Pelabuan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
1. Nalir PMP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1. Penertaman PMP Mura-SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Pelayanan Usaha	Pemeliharaan untuk menunjang optimalisasi PMP	388,034,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Produktivitas penangkapan tangkapi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Operasional Pelabuan	Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	18,000,000	12	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Operasional Mula dan reguleri Pemondokan ikan	37,300,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Operasional Sekertariat Lembaga Pengkutan JAWARA	5,200,000	1	Kegiatan					1							
			Operasional Unit Pengkutan Perikanan IPP WPPAW 71A mendukung Perikanan Tangkap di Zona 08	6,640,000	1	Kegiatan					1							
			Sosialisasi Pengkutan (jasa dalam rangka PT) terkait Pengkutan PBI dan Rerelasi Daerah	33,000,000	1	Kegiatan								1				
3. Peningkatan Pelabuan Perikanan Samudera Kendari yang Berdaya Saling	3. Penertaman Perikanan Pengangkutan yang diinvasi dan/atau diinvasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Pelayanan Usaha	Pelayanan Pengangkutan Pelabuhan Perikanan (PP, Urut)	46,130,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Tim Kerja Operasional Pelabuan	Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan	13,600,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4. Tingkat Kinerja Pelabuan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Operasional Pelabuan	Publikasi/Prinsip Pelabuan Perikanan	111,500,000	2	Dokumen					1							1
			Enkripsi data PMP dalam Rangka Mendukung Kebijakan PPT	103,240,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5. Tingkat Pelayanan Penyediaan Perikanan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Penyediaan Perikanan	Peningkatan pelayanan penyediaan perikanan berdasarkan di Pelabuhan Perikanan	217,024,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan penyediaan ikan di Pelabuhan Ikan (PP, Urut)	196,960,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan penyediaan ikan di Pelabuhan Ikan (Bontol)	39,700,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan penyediaan ikan di Pelabuhan Ikan (Bontol)	30,300,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan penyediaan ikan di Pelabuhan Ikan (Mungwi)	10,800,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan penyediaan ikan di Pelabuhan Ikan (Bontol Bontol)	28,200,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan penyediaan ikan di Pelabuhan Ikan (Bontol Bontol)	38,200,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Rapat Koordinasi dan Teknis Perikanan Penyediaan ikan dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PMP Pasca PBI (PBI, PBI, PBI)	618,940,000	1	Kegiatan					1							
	6. Tingkat Pelayanan Penyediaan Perikanan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Penyediaan Perikanan	Sosialisasi Penyediaan ikan di Pelabuhan Perikanan Bontol Bontol	11,570,000	1	Kegiatan					1							
			Operasional penyediaan di 4 lokasi Pelabuhan Perikanan Bontol Bontol	20,000,000	3	Dokumen					1	1	1					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PA	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Sasaran Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus t	Sep	Okt	Nov	Des
			Sosialisasi Pelaksanaan PMBP Harga Mendukung Pelaksanaan Pemangkasan dan Tebakur (PT)	41,000,000	1	Kegiatan			1									
			Sosialisasi Pelaksanaan PMBP Harga Mendukung Pelaksanaan Pemangkasan dan Tebakur (PT) (PP, Lantai)	235,510,000	1	Kegiatan						1						
			Sosialisasi Keterampilan Pelayanan Bagi Nelayan	21,710,000	1	Kegiatan				1								
			Sosialisasi Keterampilan Pelayanan Bagi Nelayan (Masyarakat)	17,500,000	1	Kegiatan					1							
			Sosialisasi Keterampilan Pelayanan Bagi Nelayan (Lantai)	45,500,000	1	Kegiatan				1								
			Demotivasi Serfeksi Hasil Tangkapan Ikan (LRT) dan Pemerasan Lantai Awal di PPS Selandi	25,000,000	1	Kegiatan					1							
			Demotivasi Serfeksi Hasil Tangkapan Ikan (LRT) dan Pemerasan Lantai Awal di Pelabuhan Riasan Utaman	21,000,000	1	Kegiatan					1							
			Calangan Pelaksanaan Proyek Per Fishing Port (Lantai AWI & PPS Selandi)	150,900,000	1	Kegiatan												1
			Proyek Implementing Unit di PPS Lantai (Konsolidasi Pelaksanaan Proyek di PPS)	190,000,000	1	Kegiatan												1
			Pengadaan Peralatan untuk Menunjang Operasional PMBP	910,110,000	8	Dokumen			1			1	1		1	1	1	
4	Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal yang optimal	Perencanaan Pengembangan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Pemeliharaan fasilitas perikanan	40,000,000	3	Dokumen		1			1					1		
			Pemeliharaan Fasilitas Mesin untuk Menunjang Operasional Pelabuhan	34,000,000	2	Dokumen			1						1			
			Penerapan aplikasi lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	18,000,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Pelaksanaan PPS (PES) dalam rangka pengembangan program peningkatan kapasitas	61,800,000	4	Kegiatan			1			1			1			1
			Pelaksanaan K3 di Pelabuhan Perikanan	105,817,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Pelaksanaan Pemungutan Sampah PPI di PP, Lantai	48,000,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Audit Internal ISO 14001	34,000,000	1	Kegiatan					1							
			Sosialisasi Penyelesaian Konflik/ Penggugur/ Penggugur/ Kapal Nelayan	10,000,000	70	Produk			20			20			20			10
			Sosialisasi lingkungan	40,400,000	1	Kegiatan												1
			Pengembangan dan Berencana Teknis untuk Pengembangan Kompetensi Anak Kapal Perikanan/ Nelayan	11,000,000	33	Orang		33										
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berbasis Saling di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Perencanaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berbasis Saling di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Sosialisasi Penyelesaian Konflik/ Penggugur/ Penggugur/ Kapal Nelayan	10,000,000	70	Produk			20			20			20			10
6	Pengelolaan Awar Kapal Perikanan yang Tersebar/Baru/Individu di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Perencanaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berbasis Saling di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Sosialisasi Penyelesaian Konflik/ Penggugur/ Penggugur/ Kapal Nelayan	10,000,000	70	Produk			20			20			20			10
7	Pengelolaan Awar Kapal Perikanan yang Tersebar/Baru/Individu di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Perencanaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berbasis Saling di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Sosialisasi Penyelesaian Konflik/ Penggugur/ Penggugur/ Kapal Nelayan	10,000,000	70	Produk			20			20			20			10
8	Pengelolaan Awar Kapal Perikanan yang Tersebar/Baru/Individu di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Perencanaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berbasis Saling di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Sosialisasi Penyelesaian Konflik/ Penggugur/ Penggugur/ Kapal Nelayan	10,000,000	70	Produk			20			20			20			10
9	Pengelolaan Awar Kapal Perikanan yang Tersebar/Baru/Individu di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Perencanaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berbasis Saling di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal	Sosialisasi Penyelesaian Konflik/ Penggugur/ Penggugur/ Kapal Nelayan	10,000,000	70	Produk			20			20			20			10
10	Pengelolaan Awar Kapal Perikanan yang Ter																	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus t	Sep	Okt	Nov	Des
			Penelitian SPBR di Kendari	11.760.000	1	Kegiatan					1							
7. Tindak lanjut pemenuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10)trial pemilahan mandiri pembangunan zona integrasi Pelabuhan Perikanan	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Forum Komunikasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integrasi	94.000.000	2	Kegiatan							1					
	11) Penarikan hasil penelitian pengujian yang dilaksanakan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial				1	Kegiatan						1					
	12)trial rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyusunan dokumen pemenuhan dan pengawasan (Dokum Perikanan Tangkap Monitoring, evaluasi dan tindakan pemenuhan program dan indikator)	75.000.000	4	Dokumen			1			1			1	1		
				89.000.000	4	Dokumen			1			1			1	1		
	13) SP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Pengembangan Pengabdian dan Perikanan Jabatan Fungsional	11.000.000	1	Layanan										1		
	14) Tingkat kesetiaan karyawan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Facilitasi Pelabuhan Perikanan	10.000.000	3	Kegiatan										1		
				Sarana Pembiayaan Pengabdian	506.967.000	1	Dokumen			1				1				
				Sarana Pembiayaan Kegiatan	66.700.000	3	Dokumen			1			1					
				Sarana Pembiayaan Fasilitas Pelabuhan	1.018.526.000	4	Dokumen			1			1		1	1		
		15) Tingkat ketepatan anggaran dalam Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Pelaporan Anggaran Lingkup Gajian Perikanan Tangkap	254.580.000	1	Layanan										1	
16)trial BPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Gaji dan Tunjangan	10.060.476.000	12	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
17)trial Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial				12	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.000.000	12	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18)trial Survei Reputasi Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Survei Hasil Survei Reputasi Pelanggan dan KPI	12.634.000	1	Kegiatan				1									

33

Di tahun 2025 ini terdapat 3 kali perubahan rencana aksi di antaranya disebabkan oleh perubahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dan adanya penambahan anggaran pada triwulan IV tahun 2025 sebagaimana data terlampir

Tabel 6. Rencana Aksi Perubahan I Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

RENCANA AKSI PERUBAHAN I TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI																		
Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit RI	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Ok	Nov	Des
1. Tatal PDR-SDZ Perikanan Terpadu (Layanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari)	A. Peningkatan PDR dari 50% ke 70% (Kendari)	Tim Kerja Peningkatan PDR	Peningkatan PDR dari 50% ke 70% (Kendari)	5.000.000,00	0	Dokumen												
			B. Peningkatan PDR dari 50% ke 70% (Kendari)	5.000.000,00	0	Dokumen												
			C. Peningkatan PDR dari 50% ke 70% (Kendari)	5.000.000,00	0	Dokumen												
2. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	A. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	Tim Kerja Peningkatan PDR	Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			B. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			C. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			D. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			E. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			F. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			G. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			H. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			I. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			J. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
3. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	A. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	Tim Kerja Peningkatan PDR	Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			B. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			C. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			D. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			E. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			F. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			G. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			H. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			I. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												
			J. Peningkatan partisipasi kelompok di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kendari)	1.000.000,00	0	Dokumen												

**RENCANA AKSI PERUBAHAN I TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian PT	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Ok	Nov	Des
2. Target Nasional Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tingkat Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari	Pola Kerja Operasional dan Manajemen Pelabuhan	C. Industri PPT dalam Target Pengembangan PPT (10)	3.172.000	10	Selesai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			D. Industri PPT dalam Target Pengembangan PPT (10)	3.172.000	10	Selesai												
			A. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A1. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A2. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A3. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A4. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A5. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A6. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A7. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A8. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A9. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A10. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			B. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			C. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			D. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			E. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			F. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			G. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												

**RENCANA AKSI PERUBAHAN I TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian PT	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Ok	Nov	Des
3. Target Nasional Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tingkat Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari	Pola Kerja Operasional dan Manajemen Pelabuhan	C. Industri PPT dalam Target Pengembangan PPT (10)	3.172.000	10	Selesai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			D. Industri PPT dalam Target Pengembangan PPT (10)	3.172.000	10	Selesai												
			A. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A1. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A2. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A3. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A4. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A5. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A6. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A7. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A8. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A9. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			A10. Layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan	33.333.333	10	Selesai												
			B. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			C. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			D. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			E. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			F. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			G. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			H. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												
			I. Rasio Sejahtera dan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Samudera Kendari (100%)	33.333.333	10	Selesai												

RENCANA AKSI PERUBAHAN I TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sumber Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PI	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Sesuai Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Ok	Nov	Des
1. Tercapainya Layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	K1. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Bakuhygiene Pelabuhan	A. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.1. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.2. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.3. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
	K2. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Bakuhygiene Pelabuhan	A. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.1. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.2. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.3. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
	K3. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Bakuhygiene Pelabuhan	A. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.1. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.2. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.3. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
	K4. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Bakuhygiene Pelabuhan	A. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.1. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.2. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.3. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1

RENCANA AKSI PERUBAHAN I TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sumber Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PI	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Sesuai Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Ok	Nov	Des
2. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	K1. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Bakuhygiene Pelabuhan	A. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.1. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.2. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.3. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
	K2. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Bakuhygiene Pelabuhan	A. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.1. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.2. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.3. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
	K3. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Bakuhygiene Pelabuhan	A. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.1. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.2. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.3. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
	K4. Tercapainya layanan Bakuhygiene Pelabuhan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Bakuhygiene Pelabuhan	A. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.1. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.2. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1
			A.3. Kegiatan Pengkajian Kebersihan Waduk	2.720.000	1	Rencana												1



Tabel 7. Rencana Aksi Perubahan II Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

RENCANA AKSI PERUBAHAN II TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI																		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian PK	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Oktr	Nov	Des
1. Misi P3B Sektor Perikanan Samudera Pengembangan dan Pemertahanan Perikanan Samudera Kendari	1. Pemertahanan P3B Non T3B di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Ternyata Perikanan Samudera	Pembangunan Unit Perikanan Pembangunan Perikanan (P3B) (1.000.000.000.000)	1.217.343.000														
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai			1			1			1			
2. Pemertahanan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	2. Pemertahanan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Ternyata Perikanan Samudera	Pembangunan Unit Perikanan Pembangunan Perikanan (P3B) (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												
			P3B. Pemertahanan unit pemertahanan perikanan P3B (1.000.000.000.000)	1.217.343.000	1	Selesai												

RENCANA AKSI PERUBAHAN II TAHUN 2025																		
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI																		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian PK	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Oktr	Nov	Des
1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Terintegrasi dan Berkelanjutan secara	1. Perikanan																	

RENCANA AKSI PERUBAHAN II TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Pk	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Sasaran Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
			1. Dukungan Pelaksanaan RPPR Kegiatan Monitoring Pemantauan (Pengawasan) New Facility (TPI) (R1-0001)	13.120.000	1	Regulasi						1						
			2. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0002)	4.213.000	1	Regulasi						1						
			3. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0003)	5.045.000	1	Regulasi						1						
			4. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0004)	4.815.000	1	Regulasi						1						
			5. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0005)	5.533.000.000														
			6. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0006)	5.533.000.000														
			7. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0007)	5.533.000.000														
			8. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0008)	5.533.000.000														
			9. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0009)	5.533.000.000														
			10. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0010)	5.533.000.000														
			1. Dukungan Pelaksanaan RPPR Kegiatan Monitoring Pemantauan (Pengawasan) New Facility (TPI) (R1-0011)	13.120.000	1	Regulasi						1						
			2. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0012)	4.213.000	1	Regulasi						1						
			3. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0013)	5.045.000	1	Regulasi						1						
			4. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0014)	4.815.000	1	Regulasi						1						
			5. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0015)	5.533.000.000														
			6. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0016)	5.533.000.000														
			7. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0017)	5.533.000.000														
			8. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0018)	5.533.000.000														
			9. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0019)	5.533.000.000														
			10. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0020)	5.533.000.000														

RENCANA AKSI PERUBAHAN II TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Pk	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Sasaran Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
			1. Dukungan Pelaksanaan RPPR Kegiatan Monitoring Pemantauan (Pengawasan) New Facility (TPI) (R1-0021)	13.120.000	1	Regulasi						1						
			2. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0022)	4.213.000	1	Regulasi						1						
			3. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0023)	5.045.000	1	Regulasi						1						
			4. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0024)	4.815.000	1	Regulasi						1						
			5. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0025)	5.533.000.000														
			6. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0026)	5.533.000.000														
			7. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0027)	5.533.000.000														
			8. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0028)	5.533.000.000														
			9. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0029)	5.533.000.000														
			10. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0030)	5.533.000.000														
			1. Dukungan Pelaksanaan RPPR Kegiatan Monitoring Pemantauan (Pengawasan) New Facility (TPI) (R1-0031)	13.120.000	1	Regulasi						1						
			2. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0032)	4.213.000	1	Regulasi						1						
			3. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0033)	5.045.000	1	Regulasi						1						
			4. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0034)	4.815.000	1	Regulasi						1						
			5. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0035)	5.533.000.000														
			6. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0036)	5.533.000.000														
			7. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0037)	5.533.000.000														
			8. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0038)	5.533.000.000														
			9. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0039)	5.533.000.000														
			10. Sumbangan Kelembagaan Pemetaan (R1-0040)	5.533.000.000														

RENCANA AKSI PERUBAHAN II TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

[illegible]

RENCANA AKSI PERUBAHAN II TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

[illegible]

Tabel 8. Rencana Aksi Perubahan III Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

RENCANA AKSI PERUBAHAN III TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit RI	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target																
							Jan	Feb	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agust	Sep	Oktr	Nov	Des					
1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	a. Meningkatkan PMSB dan O2S di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	5.000.000.000																			
			D. Pemeliharaan kapal di pelabuhan	143.251.000	0	Dilakukan					1				2								
			DB. Pemeliharaan kapal menengah	213.213.000	1	Dilakukan					1				2				3				
			E. Pemeliharaan kapal	3.300.000	0	Udah																	
			Pelaksanaan Inspeksi Teknis Kapal (2024-2025-2026)	4.500.000	1	Udah																	
			B. Sistem Pemeliharaan Kapal	4.300.000	0	Revisi														1			
			E. Pemeliharaan Kapal	60.000.000	0	Udah																	
			Pengawasan dan Rehabilitasi Pemecatan Pelabuhan (2024-2025-2026)	60.000.000	1	Udah																	
			A. Pengawasan Pelabuhan untuk Menampung Kapal-kapal Kecil	60.000.000	0	Revisi															1		
2. Meningkatkan pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	a. Meningkatkan pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Layanan Data dan Informasi (2024-2025-2026)	5.500.000	0	Revisi																	
			Pemeliharaan kapal di pelabuhan	5.500.000	1	Dilakukan																	
			A. Layanan Data dan Informasi	5.500.000	12	Revisi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	5.000.000																			
			B. Operasional dan Inspeksi Kapal	4.000.000	0	Dilakukan																	
			Layanan Pengawasan Pelabuhan (2024-2025-2026)	4.000.000	0	Revisi																	
			Pemeliharaan Kapal di Pelabuhan (2024-2025-2026)	4.000.000	0	Revisi																	
			D. Operasional dan Inspeksi Kapal	4.000.000	0	Revisi																	

RENCANA AKSI PERUBAHAN III TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit RI	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target													
							Jan	Feb	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agust	Sep	Oktr	Nov	Des		
1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	5.000.000.000	1	Belum														
			A. Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	5.000.000	1	Belum														
			AB. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	12.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			AC. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			B. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	0	Dilakukan	1													
			C. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Beringin Liris	Tim Kerja Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tera Sektoral dan Operasional Pengawasan di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	4.000.000.000	1	Belum														
			A. Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Teknologi yang Optimal di Pelabuhan Perikanan (2024-2025-2026)	10.000.000	12	Dilakukan	1	2	3	4	5	6	7							

RENCANA AKSI PERUBAHAN III TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

[illegible]

RENCANA AKSI PERUBAHAN III TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDAR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit RI	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target												
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Ok	Nov	Des	
			Pelaksanaan Tata Kelola dan Pengembangan Pengolahan di Fasilitas Pemukiman (KSRM 403.1.001.000)	5.000.000.000															
			8. Pelaksanaan RPL/PLD, sistem rangka pengendalian pemukiman dan lingkungan	5.000.000	1														1
			Pelaksanaan Tata Kelola dan Pengembangan RPL di Fasilitas Pemukiman (KSRM 403.1.002.000)	65.000.000															
			9. Pelaksanaan K3 di Fasilitas Pemukiman	28.170.000	12														12
			10. Pelaksanaan Pengembangan Wilayah RPL di RPL, Lahan	6.700.000	12													12	12
			11. Audit Internal RPL RPLD, Lahan	1.000.000	1														
			12. Audit Internal RPL RPLD, Lahan	700.000	1														
			13. Pelaksanaan RPL RPLD, Lahan	2.200.000	120														
			14. Pelaksanaan RPL RPLD, Lahan	2.200.000	120														
			15. Pelaksanaan RPL RPLD, Lahan	2.200.000	120														
4. Penguatan Tata Kelola Fasilitas, Ruang Pemukiman, dan Jasa Pengembangannya yang Berkelanjutan di Fasilitas Pemukiman dan Fasilitas RPL	Ruang Pemukiman dan Fasilitas yang Berkelanjutan	Tipe B100 (Pengembangan)	1. Pelaksanaan RPL RPLD, Lahan	2.200.000	120	Selesai													
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Logistik Pemukiman RPL (KSRM 403.1.003.000)	2.000.000	120	Selesai													
	Tingkat Pemukiman	Tipe B100 (Pengembangan)	2. Pelaksanaan RPL RPLD, Lahan	2.200.000	120	Selesai													
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Logistik Pemukiman RPL (KSRM 403.1.003.000)	2.000.000	120	Selesai													
	Ruang Pemukiman	Tipe B100 (Pengembangan)	3. Pelaksanaan RPL RPLD, Lahan	2.200.000	120	Selesai													
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Logistik Pemukiman RPL (KSRM 403.1.003.000)	2.000.000	120	Selesai													
	Ruang Pemukiman	Tipe B100 (Pengembangan)	4. Pelaksanaan RPL RPLD, Lahan	2.200.000	120	Selesai													
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Logistik Pemukiman RPL (KSRM 403.1.003.000)	2.000.000	120	Selesai													
	Ruang Pemukiman	Tipe B100 (Pengembangan)	5. Pelaksanaan RPL RPLD, Lahan	2.200.000	120	Selesai													
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Logistik Pemukiman RPL (KSRM 403.1.003.000)	2.000.000	120	Selesai													
5. Penguatan Tata Kelola Fasilitas, Ruang Pemukiman, dan Jasa Pengembangannya yang Berkelanjutan di Fasilitas Pemukiman dan Fasilitas RPL	Ruang pemukiman modern pengembangan aset strategis Fasilitas Pemukiman	Tipe B100 (Pengembangan Masyarakat)	1. Program Organisasi dan Tata Kelola Internal (KSRM 1.0.0.000)	1.700.000	1	Selesai													
			Pelaksanaan Rukhmatu Binao di Lingkungan RPL (KSRM 1.0.0.000.000)	1.700.000	1	Selesai													
	Ruang pemukiman modern pengembangan aset strategis Fasilitas Pemukiman	Tipe B100 (Pengembangan Masyarakat)	2. Forum Komunitas Publik dan Pemertukaran Pengembangan Desa (KSRM 2.0.0.000)	1.700.000	1	Selesai													
			1. Program Organisasi dan Tata Kelola Internal (KSRM 1.0.0.000)	1.700.000	1	Selesai													
	Ruang pemukiman modern pengembangan aset strategis Fasilitas Pemukiman	Tipe B100 (Pengembangan Masyarakat)	2. Pelaksanaan Rukhmatu Binao di Lingkungan RPL (KSRM 1.0.0.000.000)	1.700.000	1	Selesai													
			2. Forum Komunitas Publik dan Pemertukaran Pengembangan Desa (KSRM 2.0.0.000)	1.700.000	1	Selesai													

RENCANA AKSI PERUBAHAN III TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PI	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
1. Misi PM 2025: Peningkatan Perikanan Samudera Kendari		Tim Kerja Subsektor Manajemen	Layanan Perikanan dan Budidaya (2025.000.000)	5.000.000	1	Layanan												
			Monitoring, evaluasi dan peningkatan pelaksanaan program dan anggaran (2025.000.000)	5.000.000	2	Layanan												
			4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	5.000.000	4	Diketahui			1				2			3		4
2. Misi PM 2025: Peningkatan Perikanan Samudera Kendari		Tim Kerja Subsektor Manajemen	Layanan Manajemen (2025.000.000)	5.000.000	1	Layanan												
			Pengembangan, Pengendalian dan Pemeliharaan Sistem Pengendalian (2025.000.000)	5.000.000	2	Layanan												
			4. Pengembangan Sistem Pengendalian	5.000.000	2	Layanan												1
3. Perencanaan Rencana Umum Pengkajian TPA yang dilaksanakan pada 2025-2026 Perikanan Perikanan Samudera Kendari		Tim Kerja Subsektor Manajemen	Perencanaan Tata Kelola dan Sistemasi Pengkajian di Perikanan Perikanan (2025.000.000)	5.000.000	1	Teori												
			2. Perencanaan Tata Kelola dan Sistemasi Pengkajian di Perikanan Perikanan (2025.000.000)	5.000.000	2	Teori			1				2			3		
			2A. Perencanaan sistem manajemen operasional PMM	2.121.210.000	2	Teori			1				2			3		
			Perencanaan Tata Kelola dan Sistemasi Pengkajian di Perikanan Perikanan (2025.000.000)	5.000.000	1	Teori												
			4. Pengembangan Sistem Perikanan	5.000.000	2	Diketahui		4				2				3		
			Layanan Sistem Internal (2025.000.000)	5.000.000	2	Teori												
			Pengembangan dan Pemeliharaan (2025.000.000)	5.000.000	1	Teori												
			4. Sistem Pengkajian Sistem Perikanan	5.000.000	2	Teori												
			Layanan Perikanan Internal (2025.000.000)	5.000.000	2	Teori												
			Pengembangan dan Pemeliharaan (2025.000.000)	5.000.000	1	Teori												
			4. Pengembangan Sistem Perikanan (2025.000.000)	5.000.000	2	Teori												
			4. Pengembangan Sistem Perikanan (2025.000.000)	5.000.000	2	Teori												
4. Perencanaan pengkajian PMM Perikanan Perikanan Samudera Kendari		Tim Kerja Subsektor Manajemen	Layanan Manajemen Anggaran (2025.000.000)	25.187.000	2	Layanan												
			Pengembangan Anggaran dan Sistem Perikanan (2025.000.000)	25.187.000	2	Layanan												
			4. Sistem Perikanan (2025.000.000)	25.187.000	2	Diketahui			1				2			3		4

RENCANA AKSI PERUBAHAN III TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PI	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
1. Misi PM 2025: Peningkatan Perikanan Samudera Kendari		Tim Kerja Subsektor Manajemen	Layanan Perikanan (2025.000.000)	45.702.213.000	1	Layanan												
			4. Sistem Perikanan (2025.000.000)	11.404.400.000	12	Layanan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Sistem Perikanan (2025.000.000)	7.023.043.000	17	Layanan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Layanan Perikanan dan Pengkajian (2025.000.000)	7.000.000	1	Layanan												
			Pengembangan dan Pemeliharaan (2025.000.000)	1.000.000	1	Layanan												
			4. Pengembangan Anggaran dan Sistem Perikanan (2025.000.000)	1.000.000	2	Layanan												
2. Misi PM 2025: Peningkatan Perikanan Samudera Kendari		Tim Kerja Subsektor Manajemen	Layanan Perikanan (2025.000.000)	45.702.213.000	1	Layanan												
			4. Sistem Perikanan (2025.000.000)	11.404.400.000	17	Layanan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Sistem Perikanan (2025.000.000)	7.023.043.000	17	Layanan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Layanan Perikanan dan Pengkajian (2025.000.000)	1.000.000	2	Layanan												
			Pengembangan dan Pemeliharaan (2025.000.000)	1.000.000	1	Layanan												
			4. Pengembangan Anggaran dan Sistem Perikanan (2025.000.000)	1.000.000	2	Layanan												
3. Misi PM 2025: Peningkatan Perikanan Samudera Kendari		Tim Kerja Subsektor Manajemen	Perencanaan Tata Kelola dan Sistemasi Pengkajian di Perikanan Perikanan (2025.000.000)	2.000.000.000	1	Layanan												
			4. Pengembangan Anggaran dan Sistem Perikanan (2025.000.000)	2.000.000.000	2	Layanan												
			4. Pengembangan Anggaran dan Sistem Perikanan (2025.000.000)	2.000.000.000	2	Layanan												

Kendari, 15 Desember 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari,

Ditandatangani secara Elektronik
Arip Saepuloh, S.P., M.Si
NIP. 19860804 199003 1 005

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

43

Realisasi Anggaran

156

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tahun 2025 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yakni sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator;
2. Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator;
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan indikator kinerja sebanyak 5 indikator;
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator;
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 8 indikator.

Pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

				TRIWULAN IV			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp.Juta)	7.241,04	7.241,04	7.388,66	102,04
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	02.	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan	16.000	16.000	16.935,92	105,85

			TRIWULAN IV				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET	REALISASI	%	
			Samudera Kendari (Ton)				
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	03.	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100	100	100	100
		04.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87	87	99,17	113,99
		05.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	85	85,37	100,44
		06.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80	80	98	120
		07.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10	30,10	85,81	120
4.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di	08.	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333	2333	3639	120

			TRIWULAN IV				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET	REALISASI	%	
	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	09.	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	0,26	0,58	120
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10.	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (Nilai)	75,50	75,50	83,53	110,64
		11.	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	85	100	117,65
		12.	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88	88	88,75	100,85
		13.	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87	87	90,24	103,72
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76	76	100	120
		15.	Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81	81	100	120

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN IV		
					TARGET	REALISASI	%
		16.	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92	92	84,90	92,28
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,50	71,50	93,57	120
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,50	88,50	92,54	104,56

Berdasarkan tabel di atas, nilai kinerja organisasi (NKO) PPS Kendari pada triwulan IV tahun 2025 adalah 110,06 dengan 10 IKU & IKM yang bernilai Istimewa (nilai di atas 110) dan 8 IKU & IKM yang bernilai Baik (nilai 90- <110). Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 35/PERMEN-KP/2023 untuk laporan kinerja tahunan, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2. EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Adapun hasil evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan 1 – Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator yakni; Nilai PNBP non SDA Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)

Indikator Kinerja (IK-1) : Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator Nilai PNBP non SDA dari sektor Perikanan Tangkap adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berasal dari penerimaan operasional Pelabuhan. Peningkatan PNBP dari sektor perikanan diantaranya ditentukan dari arah operasional pelabuhan perikanan samudera kendari. PNBP yang dikelola oleh PPS Kendari berupa PNBP yang berasal dari Pendapatan jasa pelabuhan, Penggunaan sarana dan prasarana, Jasa lainnya.

Target nilai PNBP non SDA pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7.241.040.000 dengan periode pengukuran triwulanan. Adapun realisasi target PNBP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tersaji pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja "Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 1					Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 1					Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025-2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
5.813	5.110	7.700	9.918	7.187	7.241,04	7.388,66	102,04	N/A	N/A	4.859,97	152,031

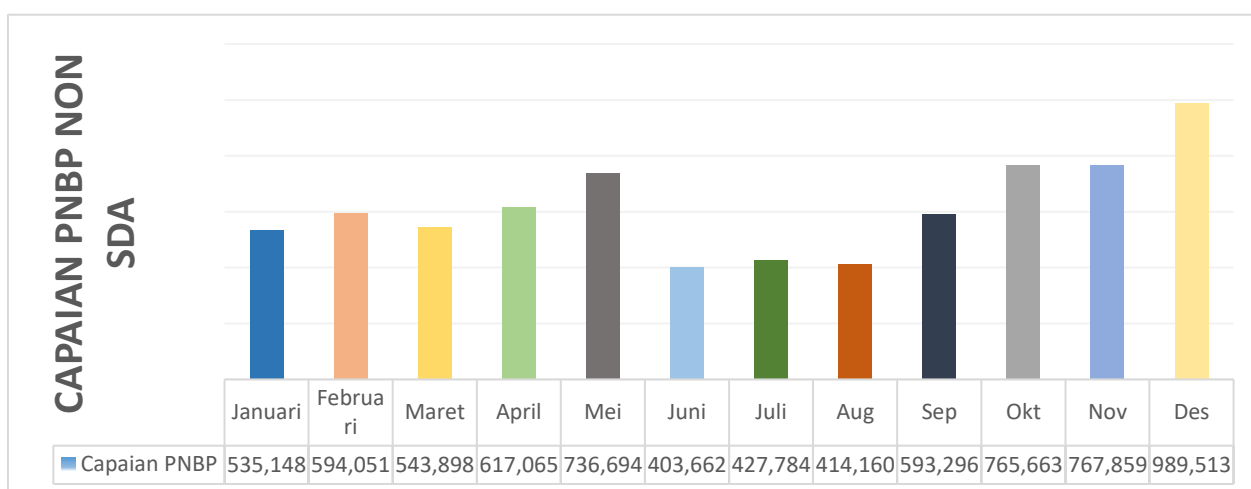
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target sebesar Rp7.388.669.625 atau 102,04% dari target. Adapun laporan target & realisasi PNBPer akun yang bersumber dari data TPNBP – SPAN – dan SIMPONI adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Laporan Target & Realisasi PNBPer Akun Tahun 2025

No	Akun	Target Sumber Data TPNBP (Rp)	Realisasi – Sumber Data SPAN (Rp)	Realisasi – Sumber Data Simponi (Rp)
1.	425122 – Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	52.170.199,00	52.170.199,00
2.	425131 – Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.456.000,00	1.423.278.650,00	1.416.287.264,00
3.	425151 – Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.356.277.000,00	988.429.723,00	977.397.717,00
4.	425621 – Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	4.868.307.000,00	4.922.842.885,00	4.922.842.885,00
5.	425811 – Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	90.000,00	0,00
6.	425911 – Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	1.858.168,00	1.858.168,00
TOTAL		7.241.040.000	7.388.669.625,00	7.370.556.233,00

Apabila dilihat capaian PNBPer jenis akun, capaian tertinggi didapatkan dari jasa pengadaan air, pas masuk, tambat labuh, jasa PAL, bengkel, pemakaian Listrik, dan pelayanan kebersihan kawasan. Dari ke-7 pendapatan jasa tersebut, pengadaan air merupakan penyumbang PNBPer terbesar dengan capaian sebesar Rp1.802.138.455, kemudian pelayanan pas masuk sebesar Rp1.334.503.866 dan

tambat labuh sebesar Rp1.114.077.555. Apabila dilihat capaian PNBPN per bulannya, capaian tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp989.513.187, sedangkan untuk pendapatan dari jasa penggunaan sarana dan prasarana terutama yang bersumber dari sewa tanah dan bangunan melalui mekanisme PP.28 Tahun 2020 sebesar Rp1.436.307.473, pendapatan tertinggi pada bulan Desember didapatkan dari penggunaan sewa tanah/bangunan dengan PP.28 Tahun 2020 dimana ada pembayaran progresif pada bulan Desember 2025 terhadap sewa tanah/bangunan yang kontrak berakhir.

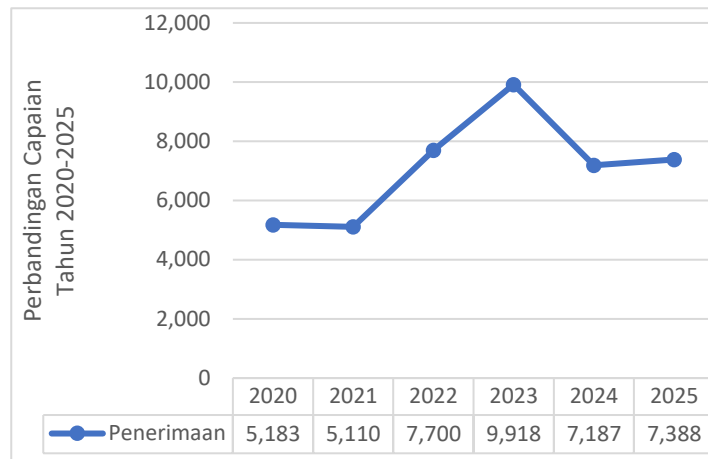


Grafik 1. Capaian PNBPN Non SDA

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024, realisasi di tahun ini terdapat peningkatan penerimaan dimana penerimaan tahun lalu sebesar Rp7.183.182.742 dan penerimaan tahun 2025 sebesar Rp7.388.669.625. Adapun peningkatan terjadi rata-rata pada beberapa jenis penerimaan utama seperti pas masuk, penggunaan tanah, pengadaan air, tambat labuh, penggunaan bangunan, penumpukan barang, kebersihan kawasan, dan IPAL. Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan PNBPN tertinggi pada tahun 2023 karena adanya kebijakan baru terkait skema pembayaran penggunaan tanah yang wajib dibayar di depan, namun dibandingkan dengan capaian penerimaan tahun 2024, penerimaan pada tahun 2025 kembali mencatatkan peningkatan yang

didorong adanya perubahan tarif sewa lahan/bangunan dari PP 85 tahun 201 ke PP.28 tahun 2020.

Grafik 2. Perbandingan Capaian IKU Penerimaan PNBPN Tahun 2020 - 2025



Pencapaian IKU Penerimaan PNBPN non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2025 adalah sebesar Rp7.388.669.625 atau 102,04% dari target sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kerja yang merupakan turunan dari target Renstra DJPT. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Renstra DJPT, capaian kinerja penerimaan PNBPN Non SDA pada tahun ini melampaui target didukung oleh komitmen para petugas pengelola PNBPN baik yang bertugas di garis depan pelayanan seperti pas masuk dan tambat labuh maupun yang bertugas sebagai petugas administrasi/penatausahaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Selain itu, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya kegiatan operasional, produksi ikan, penggunaan air, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kunjungan pengguna jasa ke dalam pelabuhan, serta adanya perubahan tarif sewa tanah dan bangunan yang cukup signifikan dari PP. 85 tahun 2021 ke PP. 28 tahun 2020 dimana kenaikan tarif berkisar antara 10% hingga 100%.

Sedangkan adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja ini antara lain masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran PNBPN terutama jasa PNBPN bulanan maupun tahunan serta adanya kendala pada ketersediaan SDM khususnya pada bagian pelayanan air baik di dermaga maupun yang mencatat meteran pemakaian sehingga optimalisasi pelayanan sedikit terhambat. Tak hanya itu, sering terjadi error pada aplikasi /mesin pas masuk dimana petugas tidak memiliki kompetensi untuk melakukan *maintenance* karena penyedia aplikasi/mesin perlu keahlian khusus.

Capaian PNBPN non SDA di PPS Kendari apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan

Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Kendari lebih tinggi sekitar 152.031% dimana capaian PNBP non SDA PPS Bitung sebesar Rp4.859.970.000. Dari target masing-masing pelabuhan juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu target di PPS Kendari lebih tinggi 2 kali lipat yaitu Rp4.849.410.000 dari target PPS Bitung.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp445.224.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Pemeliharaan fasilitas pelabuhan	100	142.951.000	142.499.000	99,68	14.295.100.000	14.152.601.000
Pemeliharaan untuk menjunjang optimalisasi PNBP	100	213.207.900	213.207.900	99,96	21.237.300.000	21.114.092.100
Sarana Pendukung Fasilitas Pelabuhan	100	2.500.000	2.500.000	100	250.000.000	247.500.000
Pengadaan Peralatan untuk Menunjang Optimalisasi PNBP	100	86.500.000	85.001.800	98,26	8.650.000.000	8.564.998.200
Jumlah	100	445.224.000	443.208.700	100	44.522.400.000	44.079.191.300
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja pelayanan usaha yang berkolaborasi dengan tim pelayanan publik dari tim kerja kesyahbandaran yang menangani layanan kesyahbandaran juga dengan tim kerja dukungan manajerial dalam hal pencatatan di aplikasi SIMPONI.

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian PNPB selama tahun 2025 di antaranya melakukan penandatanganan perjanjian sewa tanah dan bangunan untuk beberapa CV serta usaha lainnya seperti PT. Sartomo Sakti untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI), Koperasi Produsen Sumber Berkah Alam dan Koperasi Pemasaran Gerbas Samudera Pasific, PT. Janeeta Faris Samudera, PT. Sultra Tuna, Usaha Perorangan a.n Husriyany Rizal, CV. Hokky Seafood Nusantara, Ahmad serta dengan Usaha Bank BRI Cabang Kendari, dan Wahwudin. Perjanjian sewa ini dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan yang mengacu pada ketentuan PP. 28 tahun 2020. Terlampir beberapa kegiatan penunjang sebagai berikut:





Gambar 4. Kegiatan Penunjang Pencapaian PNPB Non SDA

3.2.2. Sasaran Kegiatan 2 – Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat

Pada Sasaran Kegiatan Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat terdapat 1 (satu) indikator yang mendukung yakni Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton).

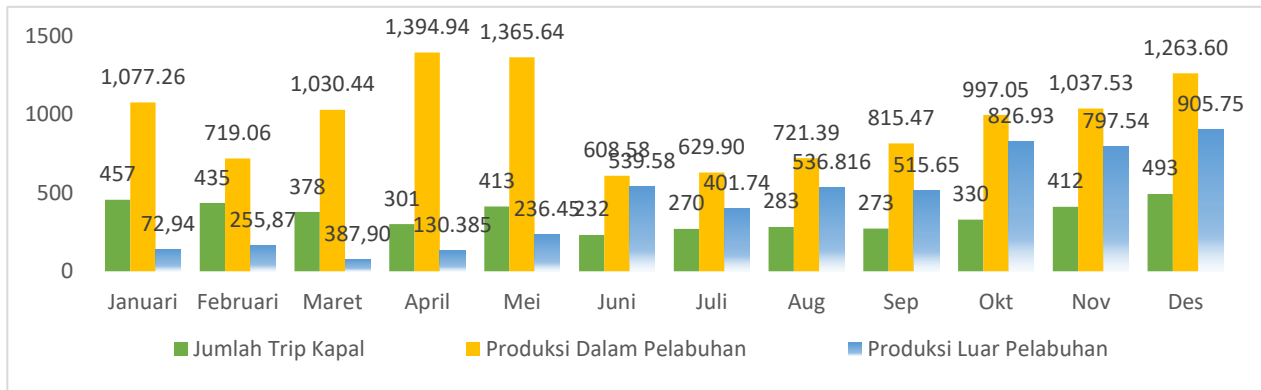
Indikator Kinerja (IK-2) : Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan dari volume produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel sebagai berikut:

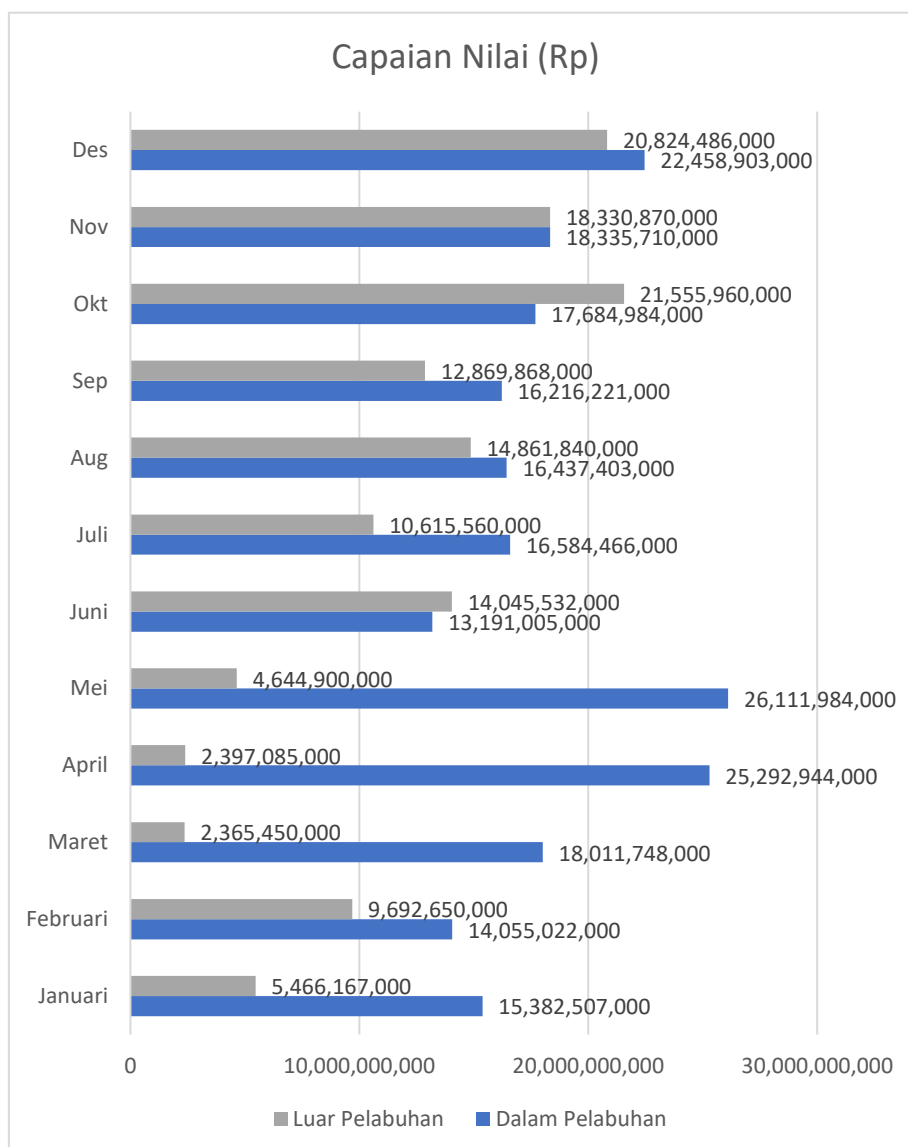
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 2					Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat						
Indikator Kinerja – 2					Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
18.689	16.653	7.379	16.790	16.812	16.000	16.935,92	105,85	N/A	N/A	88.655,50	19,10

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian IKU pada triwulan ini sebanyak 16.935,92 ton atau 105,85% dari target. Sumber produksi di PPS Kendari terdiri dari produksi dalam pelabuhan sebanyak 11.660,91 ton dan dari luar pelabuhan sebanyak 5.275,01 ton. Adapun rekap produksi bulanan tersaji pada grafik di bawah ini:



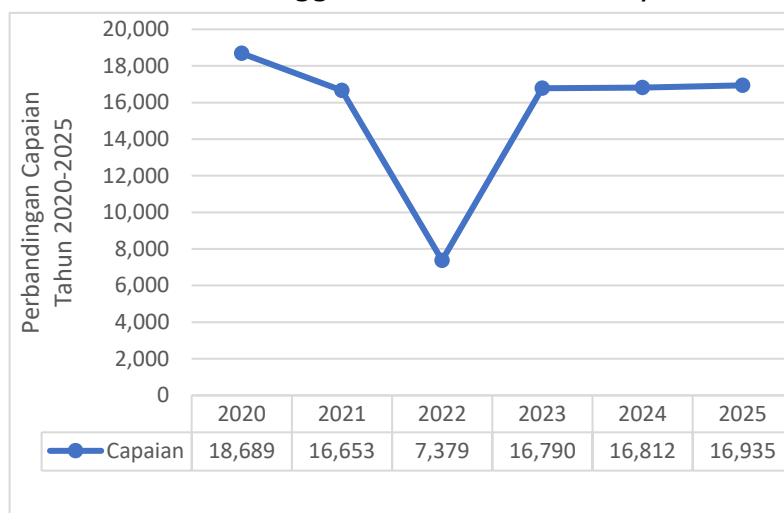
Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Produksi PPS Kendari



Apabila dihitung dalam rupiah, maka pendapatan produksi dapat dilihat pada grafik di samping. Capaian tertinggi pada bulan Mei untuk ikan dalam dan bulan Oktober pada ikan luar pelabuhan.

Grafik 4. Capaian Nilai Produksi PPS Kendari

Jika dibandingkan dengan realisasi pada 5 tahun sebelumnya, capaian pada tahun ini cenderung stagnan dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun lalu. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat perbedaan formula perhitungan nilai produksi menjadi rata-rata volume produksi sehingga tidak dapat dijadikan perbandingan yang setara dengan capaian nilai produksi lainnya. Capaian tertinggi masih terjadi pada tahun 2020 dengan capaian hingga 18.689 ton. Adapun pada tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan volume



ikan dari luar daerah yang masuk ke Pelabuhan yang menggunakan armada mobil yang berasal dari daerah Ereke, Bau-Bau, dan lain sebagainya.

Grafik 5. Perbandingan Capaian Volume Produksi Tahun 2020-2025

Pencapaian IKU sebesar 16.935,92 ton atau 105,85% dari target sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kerja yang merupakan turunan dari target Renstra DJPT. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Renstra DJPT, capaian volume produksi pada tahun ini melampaui target didukung oleh meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha/pemilik kapal terhadap regulasi pembongkaran ikan, kesiapan petugas pendata dalam melakukan pencatatan hasil produksi perikanan tangkap terhadap kapal yang melakukan pembongkaran ikan di PPS Kendari. Sedangkan faktor penghambat capaian volume produksi di PPS Kendari antara lain faktor cuaca buruk, kerusakan mesin, kerusakan alat tangkap dan adanya pengurangan petugas enumerator yang ada di PPS Kendari.

Capaian volume produksi di PPS Kendari apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung sangat jauh berbeda. Sama-sama pelabuhan perikanan tipe A yang ada di pulau Sulawesi,

produksi di PPS Bitung mencapai 88.655,50 ton dari target 51.000 ton atau hanya mencapai 19,10% dari capaian di PPS Kendari.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp86.540.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Volume Produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	100	5.550.000	5.512.000	99,32	55.000.000.000	549.488.000
Operasional Mutu dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	100	3.207.000	3.142.916	98	320.700.000	3.317.557.084
Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 714 mendukung Perikanan Teurukur di Zona 03	100	4.187.000	4.183.000	100	418.700.000	414.517.000
Jumlah	100	12.944.000	12.837.916	99.18	1.294.400.000	1.281.562.084
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$Nilai Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja operasional pelabuhan yang berkolaborasi dengan enumerator dir KP dan juga enumerator dari magang kemnaker.

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan in house training untuk optimalisasi galpot sektor kelautan, perikanan, dan kepelabuhanan kantor pelayanan pajak pratama Kendari, pertemuan regular komite pengelolaan bersama perikanan tuna, cakalang, dan tongkol di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta beberapa FGD yang dilaksanakan terkait produksi tangkap.



2. Melakukan sinergi pengelolaan perikanan PPS Kendari dengan melakukan rapat koordinasi WPPNRI 714 yang bertujuan untuk membahas rencana kerja tahunan UPP tahun 2025, analisa kuota penangkapan ikan tuna, serta penyusunan rencana aksi strategis dalam pengelolaan perikanan.

3. Melakukan kolaborasi dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Tenaga Ahli Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) bidang

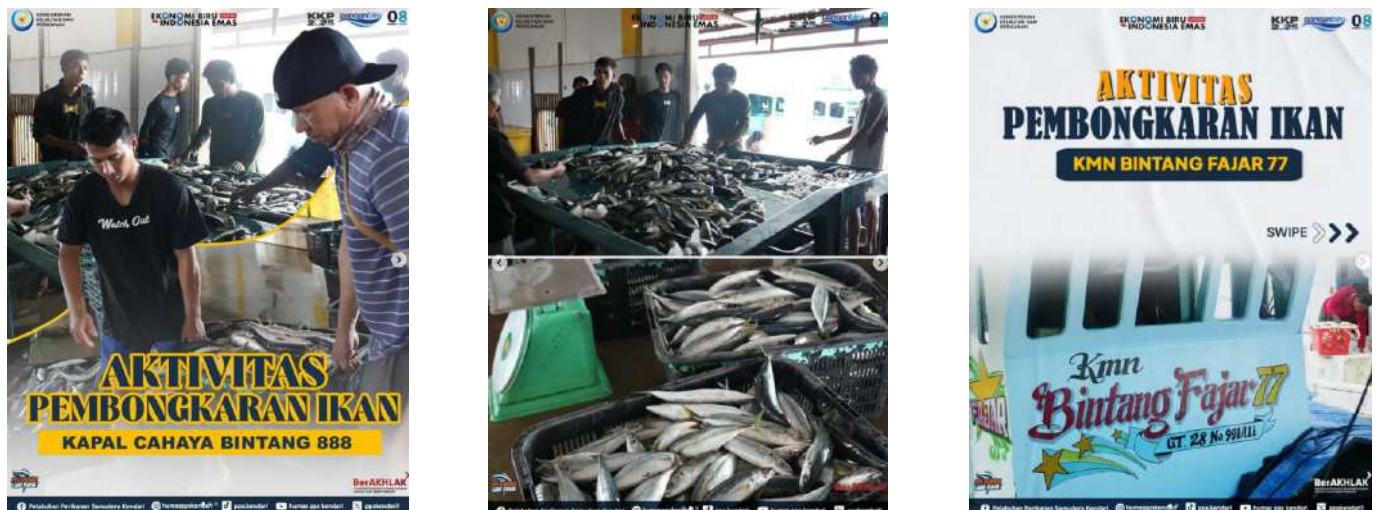
perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan menyelenggarakan peluncuran alat penyedia jasa pemantauan di atas kapal perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

4. Menerima kunjungan beberapa instansi di antaranya BPPMHKP Kendari dalam rangka pengujian dan hasil mutu perikanan dan Tim Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI)

5. Melakukan koordinasi dengan petugas pendata baik yang berada di PPS Kendari maupun pelabuhan binaan dan juga magang kemnaker.

6. Melakukan publikasi data produksi ikan dominan, rekapan data pascaproduksi, dan aktivitas pembongkaran ikan di sosial media PPS Kendari sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada masyarakat terhadap capaian volume produksi perikanan tangkap di PPS Kendari





Gambar 5. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap

3.2.3. Sasaran Kegiatan 3 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Pada Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab terdapat 5 (lima) indikator yang mendukung yakni 1) Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 2) Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 3) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 4) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dan 5) Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Indikator Kinerja (IK-3) : Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Sesuai dengan fungsi pengusahaan tersebut berupa penyediaan dan/atau jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Berdasarkan PP 85 Tahun 2021, jenis PNPB yang berlaku di KKP di antaranya meliputi penerimaan dari pelabuhan perikanan melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisa dan atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Target IKU yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 100% dengan periode pengukuran tahunan. Adapun capaian IKU ini dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab						
Indikator Kinerja – 3					Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian IKU pada tahun 2025 sebesar 100% dan memenuhi target. Terdapat 38 usulan permohonan perpanjangang pengusahaan khususnya untuk sewa tanah dan atau bangunan yang diajukan atas seluruh permohonan tersebut seluruhnya telah dilakukan analisa dan atau evaluasi sehingga 38 permohonan tersebut dapat diselesaikan. Analisa dan atau evaluasi atas permohonan perpanjangan pengusahaan wajib dilakukan sesuai klausul yang tertuang dalam perjanjian sewa tanah dan atau bangunan dimana terdapat ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian permohonan perpanjangan harus segera diajukan dengan demikian target analisa/evaluasi seluruhnya dapat diselesaikan dengan persentase capaian 100%. Adapun rekapitulasi permohonan pengusahaan berupa tanah dan bangunan tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 16. Rekapitulasi Permohonan Pengusahaan berupa Tanah dan Bangunan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

No	Pemohon	Jenis Fasilitas yang Digunakan	Luas Fasilitas yang Digunakan		Berakhir Perjanjian	Tarif PNBP (Rp)	Dasar Hukum Tarif	Jenis Usaha	Perjanjian Perpanjangan	Selesai Analisa/Evaluasi
			Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)						
1.	Adam Susandi	Bangunan Permanen		48	26 Okt 2024	720.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
2.	Ahmad	Bangunan Permanen		100	26 Okt 2024	1.500.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
3.	Hasan Tayang	Bangunan Permanen		46	17 Okt 2024	690.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
4.	Firman Akbar	Bangunan Permanen		100	20 Nov 2024	1.500.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
5.	Muh. Ilham B.SP	Bangunan Permanen		100	21 Nov 2024	1.095.00	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
6.	Halik	Bangunan Permanen		73	20 Nov 2024	840.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
7.	Muhammad Idris	Bangunan Permanen		56	21 Nov 2024	345.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√

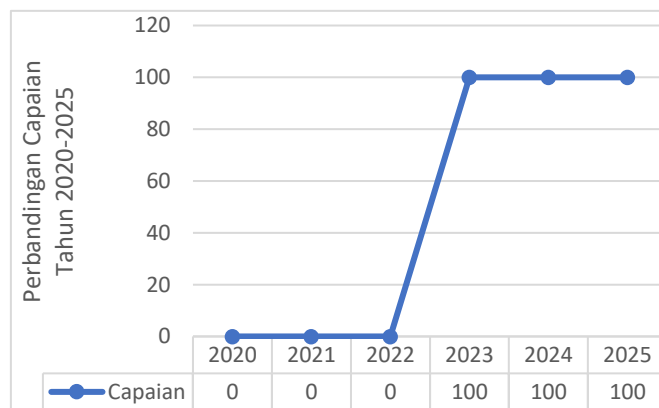
No	Pemohon	Jenis Fasilitas yang Digunakan	Luas Fasilitas yang Digunakan		Berakhir Perjanjian	Tarif PNPB (Rp)	Dasar Hukum Tarif	Jenis Usaha	Perjanjian Perpanjangan	Selesai Analisa/Evaluasi
			Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)						
8.	Muhammad Ali	Bangunan Permanen		23	20 Nov 2024	1.500.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
9.	H. Jumain H. Suba	Bangunan Permanen		100	21 Nov 2024	1.500.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
10.	Adyatman Hajali	Bangunan Permanen		100	21 Nov 2024	585.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
11.	Samria	Bangunan Permanen		39	21 Nov 2024	1.500.000	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
12.	Muhammad Fadilah	Bangunan Permanen		100	1 Jan 2025	354.750	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana penyimpanan ikan	√	√
13.	Koperasi Mina Samudera (Rusun)	Bangunan Permanen		23.65	2 Jan 2025	1.920.000	PP. 85 2021	Pelayanan logistik & perbekalan nelayan berupa makan dan minum	√	√
14.	Andi Muhammad Said	Bangunan Semi Permanen		128	11 Jan 2025	21.153.150	PP. 85 2021	Bengkel las	√	√
15.	PT. BRI (Persero)	Bangunan Permanen		9	7 Feb 2025	2.812.500	PP. 28 2020	Fasilitas akses layanan perbankan	√	√

No	Pemohon	Jenis Fasilitas yang Digunakan	Luas Fasilitas yang Digunakan		Berakhir Perjanjian	Tarif PNBP (Rp)	Dasar Hukum Tarif	Jenis Usaha	Perjanjian Perpanjangan	Selesai Analisa/Evaluasi
			Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)						
16.	Muh. Asyahri	Tanah	225		25 Mei 2025	1.500.000	PP. 85 2021	Pengolahan tepung ikan	√	√
17.	Rahardi Ramang	Bangunan Permanen		100	21 Mei 2025	26.593.650	PP. 85 2021	Penyimpanan sarana pemasaran ikan	√	√
18.	Husriyany	Tanah	1.000		21 Mei 2025	62.146.980	PP. 28 2020	Pertokoan dan rumah makan	√	√
19.	CV. Andika	Tanah	2.500		28 Jun 2025	218.073.330	PP. 28 2020	Pengolahan ikan (Cold Storage dan ABF)	√	√
20.	PT. Putra Sultra Samudera	Tanah	8.869	110.862.500	3 Jun 2025	1.814.400	PP. 28 2020	Sarana penggunaan galangan kapal	√	√
21.	Darma Wanita Persatuan PPS Kendari (Ex. Biota)	Bangunan Permanen		120.96	30 Juli 2025	3.000.000	PP. 28 2020	Pelayanan logistik & perbekalan nelayan berupa makan dan minum	√	√
22.	Wahwudi, A.Pi	Bangunan Permanen		200	8 Aug 2025	7.620.000	PP. 28 2020	Pertokoan sarana produksi perikanan	√	√
23.	PT. Jala Crabindo Internasional	Bangunan Permanen		508	8 Aug 2025	13.410.000	PP. 28 2020	Tempat istirahat karyawan, tempat parkir	√	√

No	Pemohon	Jenis Fasilitas yang Digunakan	Luas Fasilitas yang Digunakan		Berakhir Perjanjian	Tarif PNBP (Rp)	Dasar Hukum Tarif	Jenis Usaha	Perjanjian Perpanjangan	Selesai Analisa/Evaluasi
			Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)						
24.	Tim Kurator PT. Berkat Manunggal Jaya	Bangunan Permanen		894	7 Aug 2025	184.590.417	PP. 85 2021	Gudang penyimpanan mesin dan peralatan	√	√
25.	PT. Sultratuna Samudera I	Tanah	11.000		10 Sep 2025	41.253.250	PP. 28 2020	Penangkapan ikan, pengolahan ikan (CS dan ABF) dan Pabrik Es	√	√
26.	PT. Sultra Mitra Lestari	Tanah	3.300,26		9 Sep 2025	31.250.000	PP. 85 2021	Pabrik Es	√	√
27.	PT. Edco Putra Jaya	Tanah	2.500		22 Sep 2025	172.125.000	PP. 85 2021	Pengolahan Ikan (CS dan ABF)	√	√
28.	PT. PLN Nusantara Power	Tanah	13.770		22 Sep 2025	67.599.630	PP. 85 2021	Unit Pembangkit Listrik	√	√
29.	PT. Global Arta Borneo	Tanah	375		7 Okt 2025	22.500.000	PP. 85 2021	Penampungan BBM (Tangki)	√	√
30.	Fa. Sanu	Tanah	1.800		7 Okt 2025	56.250.000	PP. 85 2021	Pengolahan ikan (CS dan ABF)	√	√
31.	PT. Abadi Makmur Ocean	Tanah	4.500		7 Okt 2025	28.125.000	PP. 85 2021	Pengolahan ikan (CS dan ABF)	√	√
32.	PT. Bersatu untuk Maju	Tanah	2.250		7 Okt 2025	61.250.000	PP. 85 2021	Pengolahan ikan (CS dan ABF)	√	√
33.	PT. Kelola Mina Laut	Tanah	4.900		7 Okt 2025	28.125.000	PP. 85 2021	Pengolahan ikan (CS dan ABF)	√	√

No	Pemohon	Jenis Fasilitas yang Digunakan	Luas Fasilitas yang Digunakan		Berakhir Perjanjian	Tarif PNBP (Rp)	Dasar Hukum Tarif	Jenis Usaha	Perjanjian Perpanjangan	Selesai Analisa/Evaluasi
			Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)						
34.	PT. Harapan Mujur Samudera	Tanah	2.250		7 Okt 2025	50.000.000	PP. 85 2021	Pengolahan ikan (CS dan ABF	✓	✓
35.	Pt. Jaya Antero Bahari	Tanah	4.000		7 Okt 2025	6.750.000	PP. 85 2021	Pengolahan ikan/gudang	✓	✓
36.	Hady Tosin	Bangunan Permanen		450	30 Okt 2025	40.567.083	PP. 85 2021	Penyimpanan ikan rucah dan penanganan ikan hidup	✓	✓
37.	PT. Lintas Bestari Selaras II	Tanah	1.750		3 Nov 2025	40.567.083	PP. 28 2020	Pabrik Es	✓	✓
38.	Chevy Iwani Baampe	Tanah	100		28 Nov 2025	1.250.000	PP. 85 2021	Pelayanan Logistik & Perbekalan nelayan berupa makan dan minum	✓	✓

Jika dibandingkan dengan realisasi pada 5 tahun sebelumnya, realisasi di tahun ini relative lebih baik meskipun tren realisasi pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi cenderung sama setiap tahunnya. Namun secara efektivitas dan perbaikan kualitas analisa dan evaluasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya relatif lebih baik, mengingat pada tahun 2025 analisa dan evaluasi atas setiap permohonan terutama yang akan bertransformasi dari PP 85 tahun 2021 ke PP. 28 tahun 2020 telah melibatkan pihak lain dalam hal ini KPKNL Kemenkeu, sehingga kualitas analisa dan evaluasi semakin baik karena mempertimbangkan analisa dari pihak yang lebih kompeten terutama dalam melihat profiling/



segmentasi usaha dan mekanisme perhitungan penetapan tarif sewa BMN tanah dan/atau bangunan yang akan disewa oleh pemohon.

Grafik 6. Perbandingan Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan Tahun 2020-2025

Pencapaian IKU ini sebesar 100% atau 100% dari target sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kerja yang merupakan turunan dari target Renstra DJPT. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Renstra DJPT, capaian persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi pada tahun ini mencapai target didukung oleh komitmen para petugas dalam menyelesaikan setiap permohonan pengusahaan secara aktif melakukan koordinasi baik antara tim maupun stakeholder. Selain itu, kesadaran pemohon/pengguna jasa dalam melakukan perbaikan dokumen hasil analisa/evaluasi yang dilakukan oleh petugas sampai pada tahap penerbitan tarif sewa maupun perpanjangan perjanjian.

Adapun faktor penghambat pencapaian IKU ini antara lain masih rendahnya Tingkat pemahaman pelaku usaha dalam merespon perubahan tarif sewa dari PP 85 tahun 2021 ke PP. 28 tahun 2020, adanya usulan perubahan perioditas sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai konsekuensi atas perubahan tarif, usulan perubahan perioditas sewa dari tahunan ke bulanan membutuhkan waktu sehingga keterlambatan pembayaran PNPB sewa tanah dan/atau bangunan berpotensi terjadi.

Capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung sebanyak 30 usulan, lebih sedikit 8 usulan dari capaian di PPS Kendari.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp24.419.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Sosialisasi Pengusahaan dalam rangka Penerapan PP 28 Tahun 2020	100	1.627.000	1.622.261	99.71	162.700.000	161.077.739
Pelayanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (PP. Untia)	100	12.292.000	12.136.000	98,73	1.229.200.000	1.217.064.000
Pelayanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (PP. Sebatik)	100	10.500.000	10.082.000	96.02	1.050.000.000	1.039.918.000
Jumlah	100	24.419.000	23.840.261	97.63	2.441.900.000	2.418.059.739
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
$= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$						

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja pelayanan usaha berkolaborasi dengan tim KPKNL Kemenkeu.

Sebagai upaya dalam menunjang kinerja pencapaian persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, maka dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu melakukan penandatanganan perjanjian sewa tanah dan bangunan untuk beberapa CV serta usaha lainnya seperti PT. Sartomo Sakti untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI), Koperasi Produsen Sumber Berkah Alam dan Koperasi Pemasaran Gerbas Samudera Pasific, PT. Janeeta Faris Samudera, PT. Sultra Tuna, Usaha Perorangan a.n Husriyany Rizal, CV. Hokky Seafood Nusantara, Ahmad serta dengan Usaha Bank BRI Cabang Kendari, dan Wahwudin. Perjanjian sewa ini dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan yang mengacu pada ketentuan PP. 28 tahun 2020. Terlampir beberapa kegiatan penunjang sebagai berikut:



Gambar 6. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator Kinerja (IK-4) : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

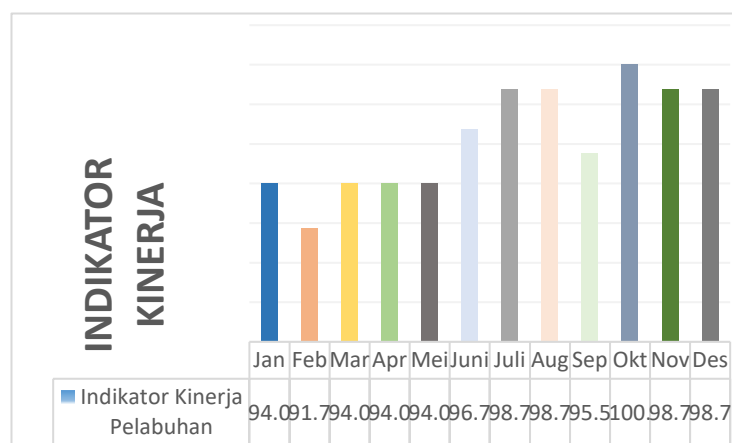
Dalam upaya menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DJPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja pelabuhan perikanan. Adapun ruang lingkup kegiatannya meliputi 1). Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), 2) Fasilitas Pelabuhan Perikanan (6 parameter), 3) Pelayanan Umum (9 parameter), 4) Investasi dan Industri (3 parameter).

Berikut parameter yang tertuang pada aplikasi PIPP yaitu: (1) Frekuensi pengiriman data (PIPP), (2) E-Logbook, (3) Aplikasi SPB Online, (4) SHTI, 5. Realisasi penyerapan anggaran, 6. Pendapatan pelabuhan, 7. Ketersediaan SDM Pengelola PP, (8). Kapasitas Daya Tampung kolam pelabuhan, (9) Panjang Dermaga (10) Kedalaman Kolam (11) Sarana Pelabuhan (Docking, Bengkel) (12) Kelengkapan Fasilitas pemasaran dan distribusi ikan (13) Ketersediaan lahan pelabuhan (14) Pelayanan Tambat Labuh (15) Produksi perikanan (16) Frekuensi kunjungan Kapal (17) STBLKK (18) Sosialisasi dan BIMTEK (19) Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian SDI, Perkarantina ikan, Publikasi (20) Pelaksanaan K5 (21) Penyaluran air bersih (Kapal dan Industri pengolahan) (22) Penyaluran Es (Kapal) (23) Penyaluran BBM (Kapal) (24) Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP (25) Pemanfaatan Lahan Pelabuhan (26) Penyerapan Naker (27) Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab						
Indikator Kinerja – 4					Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
93,75	90,67	91,21	92,10	96,58	87	99,17	113,99	N/A	N/A	97,17	102,05

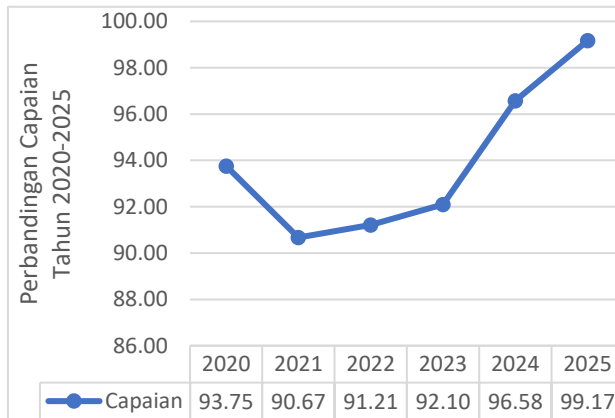
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 99,17 atau 113,99% dari target. Adapun rekapitulasi evaluasi kinerja aplikasi



PIPP di PPS Kendari tersaji pada grafik di samping. Pada tahun 2025 nilai indikator kinerja pelabuhan PPS Kendari konsisten mendapatkan nilai di atas 90 atau predikat SANGAT BAIK.

Grafik 7. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Tahun 2025

Perhitungan IKU tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu menghitung berdasarkan rata-rata pada 3 bulan terakhir yaitu Oktober, November, dan Desember, sehingga apabila dibandingkan dengan capaian pada 5 tahun terakhir, capaian di tahun ini merupakan capaian yang paling tertinggi. Pada tahun ini, terdapat 1 bulan yaitu bulan Oktober yang mendapatkan nilai sempurna yaitu 100.



Hal ini dapat dijadikan motivasi agar dapat terus memaksimalkan capaian pada setiap indikator di aplikasi PIPP.

Grafik 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Tahun 2020-2025

Pencapaian IKU ini sebesar 99,17 atau 113,99% dari target sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kerja yang merupakan turunan dari target Renstra DJPT. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Renstra DJPT, capaian Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun ini mencapai target didukung oleh kerja sama dan koordinasi antartim kerja lingkup PPS Kendari dengan memproporsikan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Selama tahun 2025, PPS Kendari memperoleh penghargaan dari Direktur Kepelabuhanan Perikanan terkait hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan dengan kategori SANGAT BAIK.



Gambar 7. Sertifikat Penghargaan Indikator Kinerja Pelabuhan dengan predikat SANGAT BAIK

Capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung rata-rata 97,17 atau lebih kecil

2 poin dari PPS Kendari. Adapun parameter di PPS Bitung yang angkanya lebih kecil pada persentase STBLKK yang hanya mendapat nilai 2,5 pada bulan Desember.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp80.140.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan	100	10.536.000	10.379.646	98,52	1.053.600.000	1.043.220.354
Publikasi/Promosi Pelabuhan Perikanan	100	67.092.000	66.996.206	99,86	6.709.200.000	6.642.203.794
Evaluasi data PIPP dalam Rangka Mendukung Kebijakan PIT	100	2.512.000	2.415.000	96,14	251.200.000	248.785.000
Jumlah	100	80.140.000	79.790.852	99,56	8.014.000.000	7.934.209.148
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja operasional pelabuhan berkolaborasi dengan seluruh tim kerja untuk pengisian 27 parameter yang ada di aplikasi PIPP.

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yaitu kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pendataan Pusat



Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dalam rangka Implementasi PNEP Pasca Produksi yang berlangsung dari tanggal 28 November 2025. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan bekerjasama dengan Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port) Project by AFD melaksanakan kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan.

Gambar 8. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan

Indikator Kinerja (IK-5) : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Dalam manual IKU, formula perhitungan dari ketiga pelayanan ini dibobot lalu dijumlahkan. Target dari IKU ini sebesar 85% dengan perhitungan tahunan. Adapun capaian IKU ini dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab						
Indikator Kinerja – 5					Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	58,82	87,64	85	85,37	100,44	N/A	N/A	100	85

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 85,37 atau 100,44% dari target. Adapun rekapitulasi dari indikator yang menjadi formula perhitungan pada capaian ini sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 21. Rekapitulasi Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

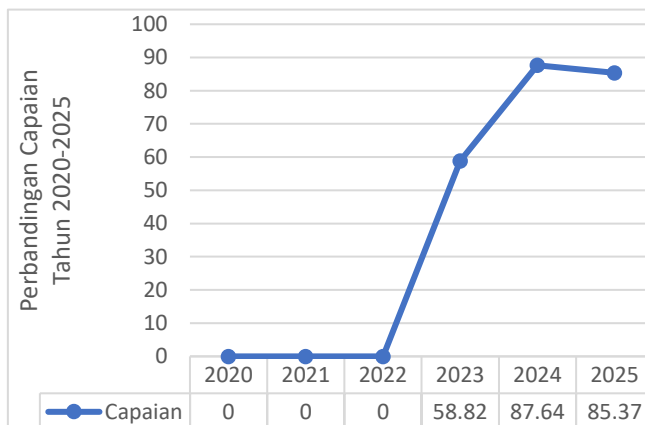
No.	Ukuran	Jumlah Kapal
1.	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	306
2.	STBLKK Kedatangan Kapal	315
3.	Kapal Berpangkalan	380
4.	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	1
5.	Revisi/Penolakan SHTI	0

Sehingga jika dihitung menggunakan formula adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{SPB (X}_1\text{)} &= \frac{\text{Jumlah Persetujuan Berlayar (Kapal)}}{\text{Jumlah Kapal yang Beraktivitas}} \times 100\% \\
 &= \frac{306}{380} \times 100\% \\
 &= 80,53 \\
 \text{Bobot 40\%} &= 32,21 \\
 2. \quad \text{STBLKK (X}_2\text{)} &= \frac{\text{Jumlah STBLKK Kedatangan (Kapal)}}{\text{Jumlah Kapal yang Beraktivitas}} \times 100\% \\
 &= \frac{315}{380} \times 100\% \\
 &= 82,89 \\
 \text{Bobot 40\%} &= 33,16 \\
 3. \quad \text{SHTI (X}_3\text{)} &= 100 - \frac{\text{Jumlah Permintaan Verifikasi SHTI}}{\text{Jumlah SHTI yang Diterbitkan}} \times 100\% \\
 &= 100 - \frac{0}{1} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 100 \\
 \text{Bobot 20\%} &= 20 \\
 \text{Tingkat Pelayanan (\%)} &= X_1 + X_2 + X_3 \\
 &= 32,21 + 33,16 + 20 \\
 &= 85,37
 \end{aligned}$$

Tercapainya IKU ini dipengaruhi oleh terjaganya kualitas dan kontinuitas pelayanan kesyahbandaran meskipun dihadapkan oleh penurunan aktivitas kapal. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian pada 5 tahun terakhir, capaian capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran mengalami penurunan dari 87,64% menjadi 85,37% atau sebesar 2,09% dari tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kapal yang beraktivitas di PPS Kendari sehingga berdampak langsung terhadap pemberian layanan kesyahbandaran. Adapun salah satu faktor penyebabnya adalah keterlambatan masuknya kapal-kapal yang berasal dari Sulawesi Selatan ke PPS Kendari karena masih dalam proses penyesuaian



perubahan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) pada SIUP dari WPPNRI 713 ke 714 sehingga waktu kedatangan dan aktivitas di PPS Kendari menjadi tertunda.

Grafik 9. Perbandingan Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2020-2025

Pencapaian IKU ini sebesar 85,37% atau 100,44% dari target sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kerja yang merupakan turunan dari target Renstra DJPT. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Renstra DJPT, capaian Tingkat pelayanan Kesyahbandaran pada tahun ini mencapai target didukung oleh kualitas dan kontinuitas pelayanan kesyahbandaran yang tetap terjaga meskipun terjadi penurunan aktivitas kapal. Sementara itu, menurunnya capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan administrative khususnya terkait perizinan dan pola operasi kapal.

Capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan

Samudera Bitung, capaian PPS Kendari hanya mencapai 85% dari capaian PPS Bitung. Jumlah kapal yang beraktivitas di PPS Bitung mencapai 1.049 kapal, sedangkan di PPS Kendari hanya 308 kapal. Selain itu perbedaan target antara kedua Pelabuhan ini juga cukup jauh, yaitu target PPS Kendari hanya 85% dan PPS Bitung sebesar 97%. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp239.979.000. Adapun realisasi penyerapan anggara serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Peningkatan pelaksanaan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	100	62.205.000	62.201.561	99.99	6.220.500.000	6.158.298.439
Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (PP. Untia)	100	9.400.000	9.314.500	99.09	940.000.000	930.685.500
Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Wameo)	100	5.730.000	5.725.000	99.91	573.000.000	567.275.000
Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Lappa)	100	9.780.000	9.775.000	99.95	978.000.000	968.225.000
Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Mangolo)	100	5.977.000	5.966.904	99.83	597.700.000	591.733.096
Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Torobulu)	100	5.944.000	5.937.200	99.89	594.400.000	588.462.800

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Kasiwa)	100	6.330.000	6.320.500	99.85	633.000.000	626.679.500
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi (PPS Kendari)	100	19.245.000	19.113.225	99.32	1.924.500.000	1.905.386.775
Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan	100	11.230.000	11.230.000	100	1.123.000.000	1.111.770.000
Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (Wameo)	100	44.280.000	44.260.000	99.95	4.428.000.000	4.383.740.000
Sosialisasi Pelaksanaan PNBP Rangka Mendukung Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)	100	2.683.000	2.683.000	100	268.300.000	265.617.000
Sosialisasi Pelaksanaan PNBP Rangka Mendukung Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) (PP. Untia)	100	15.125.000	14.925.000	98.58	1.512.500.000	1.497.575.000
Sosialisasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Tarakan	100	23.350.000	23.320.000	99.87	2.335.000.000	2.311.680.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Operasional Pelabuhan	100	18.700.000	18.700.000	100	1.870.000.000	1.851.300.000
Jumlah	100	239.979.000	239.471.890	99.79	23.997.900.000	23.758.428.110

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja kesyahbandaran baik yang ada di PP Binaan maupun di PPS kendari.

Sebagai upaya dalam menunjang kinerja pencapaian Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, maka dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Melakukan beberapa sosialisasi di antaranya sosialisasi implementasi penangkapan ikan terukur pasca terbitnya surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024, sosialisasi pelaksanaan penarikan PNBP pascaproduksi dalam rangka mendukung penangkapan ikan terukur di PPS Kendari, sosialisasi digitalisasi penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), sosialisasi dan pendampingan laporan kegiatan usaha (LKU) Semester I dan II musim penangkapan ikan tahun 2025, sosialisasi perizinan berusaha kapal penangkap/pengangkut ikan di WPPNRI



2. Mengikuti kegiatan peluncuran aplikasi e-Logbook versi-3, yang secara resmi diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada 6 Oktober 2025. Peluncuran ini menjadi tonggak penting transformasi tata kelola perikanan nasional, di mana sistem pencatatan hasil tangkapan kini semakin modern dengan dukungan fitur AI yang mampu mengenali jenis ikan secara otomatis.

3. Mengikuti kegiatan Rapat peningkatan kapasitas petugas administrator elektronik penangkapan ikan terukur (E-PIT) dan rapat monitoring dan evaluasi maritime on the spot (MOTS).

4. Menerima Kunjungan Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi) ke PPS Kendari dalam rangka koordinasi strategi penguatan monitoring spektrum frekuensi radio, guna memastikan kelancaran sistem komunikasi maritim serta mendukung optimalisasi pelayanan dan pengawasan di kawasan pelabuhan perikanan.



5. Melakukan kegiatan rutin seperti patroli rutin kesyahbandaran, pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, serta rekapitulasi aktivitas kapal PPS Kendari.



Gambar 9. Kegiatan Penunjang Pencapaian Tingkat Kinerja Kesyahbandaran

Indikator Kinerja (IK-6) : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Target IKU tahun 2025 ini sebesar 80% dengan perhitungan tahunan. Adapun capaian pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 4					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab						
Indikator Kinerja – 6					Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2019 – 2023					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	92	93	80	98	120	N/A	N/A	72	136,11

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 93% atau 116,25% dari target. Adapun rekapitulasi pengembangan dan peningkatan fasilitas di PPS Kendari tersaji tabel di bawah ini:

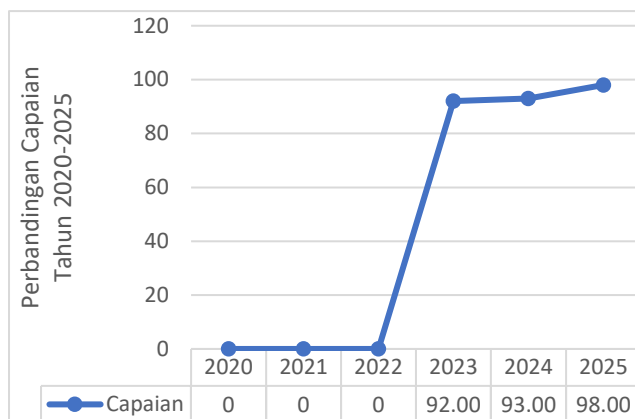
Tabel 24. Rekapitulasi Pengembangan Fasilitas Eksisting Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

No.	Jenis Fasilitas	Luas Eksisting	Luas Pengembangan/ Pemeliharaan	Satuan	Presentase Eksisting	Kenaikan	Persentase
A. Fasilitas Pokok							
1.	Lahan	42,65		Ha	100%	0%	100%
2.	Kolam Pelabuhan	41,92		Ha	100%	0%	100%
3.	Dermaga						
	6 Meter	0,13		Ha	100%	0%	100%
	2,5 Meter	0,065		Ha	100%	0%	100%
4.	Jalan dan Drainase						
	Jalan kompleks	2,995	0,0896	Ha	100%	3%	100%
	Drainase	0,71		Ha	100%	0%	100%
5.	Talud	0,28		Ha	100%	0%	100%
Fasilitas Fungsional							
1.	Kantor adminitrasi Pelabuhan	0,133	0,0112	Ha	100%	8%	108%
2.	TPI Higienis	0,103	0,0444	Ha	100%	4%	104%
3.	Rambu navigasi	3		Unit	100%	0%	100%

No.	Jenis Fasilitas	Luas Eksisting	Luas Pengembangan/ Pemeliharaan	Satuan	Presentase Eksisting	Kenaikan	Persentase
4.	Instalasi Pengolahan Air Bersih	700		KL	100%	0%	100%
5.	Instalasi BBM	1000		KL	100%	0%	100%
6.	Sumur Dalam (Deep Weel)	6		Unit	100%	0%	100%
7.	Instalasi IPAL	400	10	KL	100%	3%	103%
8.	SWRO	500		KL	100%	0%	100%
9.	Instalasi Listrik						
	Genset	500	10	KVA	100%	2%	102%
	PLN	1110		KVA	100%	0%	100%
10.	Telekomunikasi						
	Telepon	1		Line	100%	0%	100%
	Interkom	12		Line	100%	0%	100%
	Internet	1		Unit	100%	0%	100%
11.	Sarana Bongkar Muat						
	Truck Crane	4		Unit	100%	0%	100%
	Forklift Kapasitas 2 Ton	3		Unit	100%	0%	100%
	Forklift Kapasitas 5 Ton	1		Unit	100%	0%	100%
C. Fasilitas Penunjang							
1.	Pompa penyemprotan air panas	2		Unit	100%	0%	100%
2.	Amphibius	1		Unit	100%	0%	100%
3.	Alat kebersihan	1		Unit	100%	0%	100%
4.	Dump truck	3		Unit	100%	0%	100%
5.	Truck Tangki	1		Unit	100%	0%	100%
6.	Gedung Bengkel Genset	0,0375	0,001	Ha	100%	3%	100%

No.	Jenis Fasilitas	Luas Eksisting	Luas Pengembangan/ Pemeliharaan	Satuan	Presentase Eksisting	Kenaikan	Persentase
7.	Fuel Sales	0,0096		Ha	100%	0%	100%
8.	Pos Jaga (3 Unit)	0,0136		Ha	100%	0%	100%
9.	MCK	0,0126	0,0009	Ha	100%	7%	107%
10.	Tempat Parkir	0,1741	0,0029	Ha	100%	2%	102%
11.	Garasi Mobil	0,006		Ha	100%	0%	100%
12.	Pagar Keliling	2417	130	M	100%	5%	105%
13.	Gedung Hanggar Pembongkaran Ikan	0,0635	0,007	Ha	100%	11%	111%
14.	Koperasi Nelayan Waserba	0,0090		Ha	100%	0%	100%
15.	Kamera Monitor CCTV	12		Unit	100%	0%	100%
16.	Incenerator	0,0340		Ha	100%	0%	100%
17.	Gedung Hanggar Alat Berat	0,0952	0,0032	Ha	100%	3%	103%
18.	Ruang Pelayanan Terpadu	0,0720	0,0052	Ha	100%	7%	107%
19.	Penginapan Nelayan	0,0672		Ha	100%	0%	100%
20.	Guest House	0,0140		Ha	100%	0%	100%
21.	Poliklinik	0,0090		Ha	100%	0%	100%
22.	Musholah	0,0048		Ha	100%	0%	100%
23.	Mesjid	0,0030	0,00042	Ha	100%	1%	101%
24.	Gudang	0,0200	0,001	Ha	100%	5%	105%
25.	Shelter Nelayan	0,0150	0,0013	Ha	100%	9%	109%
26.	Gedung Penunjang Keuangan	0,0101		Ha	100%	0%	100%
27.	Rumah Negara						
	Type 36 (16 Unit)	0,0576	0,0052	Ha	100%	9%	109%
	Type 70 (6 Unit)	0,0420	0,0035	Ha	100%	8%	108%
	Type 120 (3 Unit)	0,0360	0,0025	Ha	100%	7%	107%
Total Persentase Pengembangan						98%	

Persentase pengembangan fasilitas terbesar adalah gedung hangar pembongkaran ikan yang menjadi salah satu fasilitas penunjang yang ada di PPS Kendari. Jika dibandingkan dengan realisasi pada 5 tahun sebelumnya, capaian pada IKU ini yang paling tinggi. Walaupun di tahun 2025 ini banyak pemblokiran di awal



tahun, namun pada triwulan IV tahun 2025 terdapat pembukaan pemblokiran anggaran khususnya pada pengembangan fasilitas Pelabuhan perikanan.

Grafik 10. Perbandingan Capaian Presentase Pengembangan Fasilitas Tahun 2020-2025

Pencapaian IKU ini sebesar 98% atau 120% dari target sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kerja yang merupakan turunan dari target Renstra DJPT. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Renstra DJPT, capaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan pada tahun ini mencapai target didukung oleh pembukaan pemblokiran anggaran di triwulan IV tahun 2025 sehingga banyak pekerjaan yang sebelumnya tertunda karena pemblokiran anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal.

Capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Kendari melebihi 136,11% dari capaian di PPS Bitung. sebanyak 30 usulan, lebih sedikit 8 usulan dari capaian di PPS Kendari. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp28.940.900.000. Adapun realisasi penyerapan anggara serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 25. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Dukungan Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan	100	6.065.000	5.796.000	95.96	606.500.000	600.704.000
Civil Works (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil)	100	28.126.000.000	0	0	2.812.600.000.000	2.812.600.000.000
Project Implementing Unit di PPS Kendari (Keseekretariatan Pelaksanaan Proyek di PIU)	100	166.899.000	166.206.536	99.59	16.689.9000.000	16.523.693.464
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	100	641.936.000	640.731.000	99.81	64.193.600.000	63.552.869.000
Jumlah	100	28.940.900.000	812.733.536	2.81	2.894.090.000.000	2.893.277.266.464
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,99%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,99%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,99%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja tata kelola sarana dan prasarana.

Adapun kegiatan penunjang dalam pencapaian IKU ini yang telah dilakukan selama antara lain:

1. Melakukan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi air bersih, dan pompa instalasi pengolahan air limbah



2. Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Technical Assistance to the Owner (TAO) berkoordinasi terkait pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Melalui Proyek Eco Fishing Port. Dalam rapat ini, tim TAO memaparkan design perencanaan pasar ikan, rehabilitasi gedung kantor utama, rehabilitasi unit pengolahan air limbah, rehabilitasi jalan dan gerbang pas masuk. Diharapkan dengan adanya rehabilitasi beberapa sarana pelabuhan akan semakin berdampak untuk kenyamanan pengguna jasa dalam kawasan.

3. Menghadiri Rapat Finalisasi Layout Pengembangan dan Standard Bidding Document Proyek Eco Fishing Port dan menghadiri undangan Rapat Tindak Lanjut Finalisasi Layout Pengembangan Proyek Eco

Fishing Port. Rapat Finalisasi Layout Pengembangan Proyek Eco Fishing Port ini membahas penyempurnaan layout pengembangan fasilitas pelabuhan seperti sarana pengelolaan limbah, tempat pemasaran hasil perikanan dan perbaikan jalan dalam kawasan.

Gambar 10. Kegiatan Penunjang Pencapaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari



Indikator Kinerja (IK-7) : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus: 1) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan, 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Menindaklanjuti hal tersebut, KKP telah memiliki suatu sistem informasi web yang disebut dengan SELARASKAN. Melalui aplikasi ini, tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan dapat dimonitoring mulai dari program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang dimutakhirkan secara berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. Adapun formula perhitungan dari aplikasi SELARASKAN ini adalah

Skor keseluruhan = Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%).

Skor indikator program adalah program *mandatory* yang wajib dimutakhirkan dan *voluntary* (Program tidak wajib berjalan di pelabuhan perikanan) serta indikator hasil terdiri dari kebersihan pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas

udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Kategori yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) terdiri dari:

1. Kurang : 0 – 30
2. Cukup : >30 – 60
3. Baik: >61 – 80
4. Sangat Baik: >81 – 100

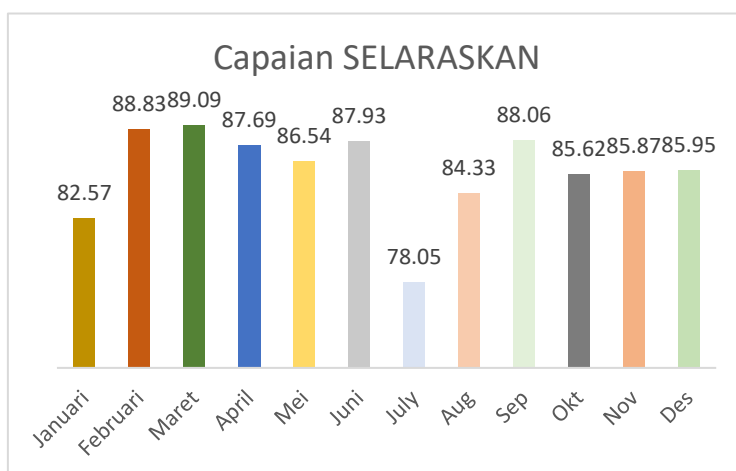
Target IKU tahun 2025 ini sebesar 30,10 dengan periode pengukuran triwulanan.

Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 4					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab						
Indikator Kinerja – 7					Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	30,40	93,78	30,10	85,81	120	N/A	N/A	87,92	97,60

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 85,81 atau 120% dari target. Apabila dibandingkan dengan capaian tiap bulannya, pada bulan Maret mendapatkan skor paling tinggi yaitu 89.09, sedangkan di bulan

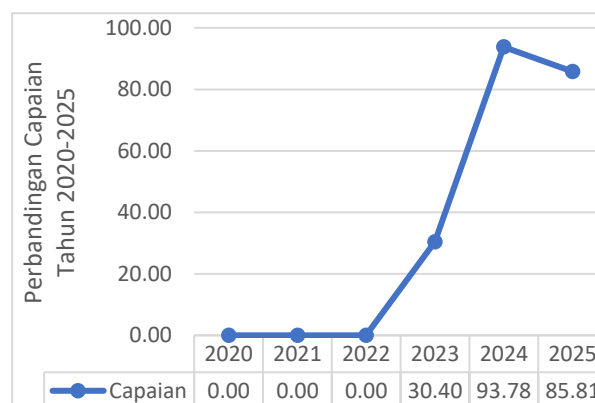


Juli mendapatkan skor paling rendah yaitu 78.05 namun pada bulan berikutnya mengalami peningkatan seperti tersaji pada grafik di samping ini.

Grafik 11. Capaian Bulanan Nilai Pengendalian Lingkungan

Jika dibandingkan dengan realisasi pada 5 tahun sebelumnya, capaian pada IKU ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyak indikator yang nilainya lebih kecil dan mendapatkan koreksi dari tim penilai. Namun, capaian pada tahun ini telah melampaui target sebesar 120% sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kinerja yang merupakan turunan dari target Renstra DJPT. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Renstra DJPT, capaian ini telah mencapai target didukung oleh oleh kedisiplinan petugas untuk melakukan pencatatan dan penginputan ke dalam aplikasi SELARASKAN.

Grafik 12. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan Tahun 2020-2025



Capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung lebih tinggi yaitu 87,92. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp52.453.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 27. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2024

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Penerapan aplikasi Selaraskan	100	7.801.000	7.772.900	99.64	780.100.000	772.327.100
Pelaksanaan RPL/RKL dalam rangka pengendalian	100	9.503.000	9.429.499	99.23	950.300.000	940.870.501

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
pencemaran lingkungan						
Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan	100	28.679.000	28.209.000	98.36	2.867.900.000	2.839.691.000
Pelaksanaan Pengawasan Terpadu PIT di PP. Untia	100	4.750.000	4.733.000	99.64	475.000.000	470.267.000
Audit Internal ISO 9001:2015	100	1.020	1.020.000	100	102.000.000	100.980.000
Audit Internal ISO 14001:2015	100	700.000	698.200	99.74	70.000.000	69.301.800
Jumlah	100	52.453.000	51.862.599	98.87	5.245.300.000	5.199.437.401
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja tata kelola sarana dan prasarana berkolaborasi dengan tim kerja terlibat seperti tim kebersihan.

Kegiatan yang menunjang kinerja nilai pengendalian lingkungan diantaranya:

1. Kegiatan rutin terkait aktivitas kebersihan Kawasan Pelabuhan dengan menghitung muatan sampah organik dan anorganik, kerja bakti di lingkungan Pelabuhan, serta pemantauan fasilitas pengolahan air limbah. Pada tahun ini juga karena adanya efisiensi anggaran, maka dibentuk Tim Hemat Energi yang bertugas untuk mengevaluasi konsumsi energi, merumuskan strategi penghematan, serta menyusun langkah konkret guna mengurangi biaya operasional tanpa mengganggu aktivitas pelabuhan.



2. Melakukan kegiatan pengambilan sampel air di kawasan pelabuhan yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kolaka sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan. Pengambilan sampel dilakukan di tiga titik dengan tiga sampel air berbeda, yaitu pengambilan sampel air laut bertempat di area dermaga 3 (Hanggar), pengambilan sampel air limbah di kolam retensi pembuangan dari IPAL, serta pengambilan sampel air bersih di instalasi pengolahan air bersih PPS Kendari. Seluruh sampel akan dibawa ke laboratorium DLH Kolaka untuk dilakukan uji kualitas air sesuai dengan baku mutu lingkungan yang berlaku Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen

PPS Kendari dalam menjaga kelestarian lingkungan perairan pelabuhan, sekaligus mendukung penerapan sistem manajemen lingkungan yang telah tersertifikasi ISO 14001. Melalui langkah ini, PPS Kendari terus berupaya menciptakan kawasan pelabuhan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.



3. Mengadakan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pencegahan dan penanganan dini bencana kebakaran.

Gambar 11. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai Pengendalian Lingkungan



3.2.4. Sasaran Kegiatan 4 – Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pada Sasaran Kegiatan Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 2 (dua) indikator yang mendukung yaitu (1) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dan (2) Tingkat Pemenuhan

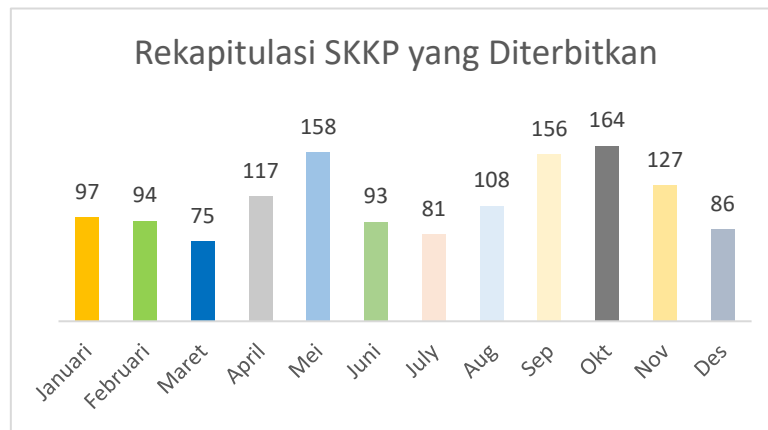
Indikator Kinerja (IK-8) : Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Target IKU di tahun 2025 adalah sebanyak 2333 kapal dengan periode pengukuran triwulanan. Adapun capaian pada IKU ini terlampir pada tabel berikut:

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2025

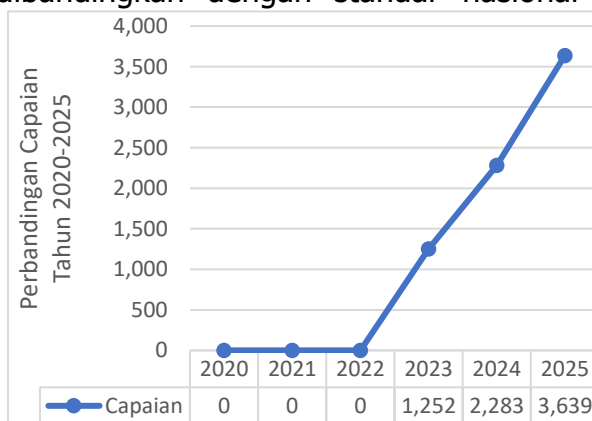
Sasaran Kegiatan – 4					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 8					Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	1252	2283	2333	3639	120	N/A	N/A	1024	355,37

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 3639 kapal atau 120% dari target. Pada tahun 2024 yang lalu, capaian dokumen kapal yang diterbitkan sebanyak 2283 dan sesuai dengan manual IKU tahun 2025, capaian ini dapat ditambahkan dengan capaian dari triwulan I sampai triwulan pengukuran berlangsung. Pada triwulan IV bertambah sebanyak 377 kapal yang terbagi ke dalam 3 bulan yaitu bulan Oktober sebanyak 164 kapal, bulan November sebanyak 127 kapal, dan bulan Desember sebanyak 86 kapal. Adapun rincian sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) yang diterbitkan setiap bulan tersaji pada grafik di bawah ini:



Grafik 13. Rekapitulasi Capaian Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)

Jika dibandingkan dengan realisasi pada 5 tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2025 pasti yang paling tinggi karena capaian ini merupakan akumulasi dari capaian pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini sejalan dengan pola perhitungan baru untuk penentuan target awal tahun dimana capaian pada tahun sebelumnya ditambahkan sesuai dengan target yang ditentukan masing-masing satker. Apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 yang lalu, capaian triwulan IV tahun 2025 ini mengalami peningkatan signifikan dengan jumlah 377 kapal, meningkat 141 kapal atau jika dipresentasekan sebesar 62,60%. Jika capaian IKU ini dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di



Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung hanya mencapai 1024 kapal.

Grafik 14. Perbandingan Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah

Pencapaian IKU sebanyak 3639 kapal atau 120% dari target sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kerja yang merupakan turunan dari target Renstra DJPT. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Renstra DJPT, capaian kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan pada tahun ini mencapai target didukung oleh meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha/pemilik kapal terhadap regulasi dan ketentuan perizinan serta adanya kemudahan yang diberikan oleh KKP dalam proses perpanjangan SKKP melalui Surat Edaran Nomor B.2541/MEN-

KP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dan kemudahan pengurusan melalui kegiatan gerai penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp2.434.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Sosialisasi e-Logbook Penangkapan Ikan	100	2.434.000	2.302.000	94.58	243.400.000	241.098.000
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,76%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,76%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja kesyabandaran baik yang berada di PPS Kendari maupun di PP Binaan

Kegiatan yang menunjang IKU ini diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi Technical Cooperation Guidelines (TCG) di desa Mola Selatan, Kabupaten Wakatobi. Dalam sosialisasi dijelaskan bahwa TCG adalah bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan. Dalam perjanjian ini juga mengatur terkait area kerjasama yang meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan, daerah penangkapan ikan yang terdiri dari 3 zona serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.



2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penarikan PNPB pascaproduksi, yang dirangkaikan dengan persiapan pelaksanaan Gerai Migrasi Perizinan Kapal Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini menghadirkan pemilik kapal, pengurus kapal, serta perwakilan dari PSDKP yang berada di WPPNRI 714.

3. Melakukan koordinasi P2KPI PPS Kendari Bersama KSOP Kelas II Kendari terkait Tata Cara

Pelaksanaan Pengukuran Kapal Penangkap Ikan dan Penerbitan Surat Ukur



Dalam Negeri Kapal Penangkap Ikan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan langkah serta memperjelas teknis pelaksanaan pengukuran kapal selama masa transisi kebijakan yang tengah berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal penting mulai dari prosedur pengajuan hingga tahapan pengukuran dan penerbitan surat ukur bagi kapal penangkap ikan. KSOP Kelas II Kendari dan Tim P2KPI sepakat untuk saling mendukung agar proses pengukuran dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak mengganggu aktivitas

operasional kapal perikanan di wilayah kerja PPS Kendari.

4. Melakukan kegiatan Gerai Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Wameo Kota Bau-Bau dan Pelabuhan Perikanan Kasiwa Kota Mamuju dalam rangka peningkatan pengelolaan perikanan tangkap. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perikanan, dapat dilakukan peningkatan aksesibilitas dan kecepatan layanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) melalui gerai layanan yang lebih efektif dan efisien.



5. Melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kota Kendari dalam pengawasan dan peningkatan kesehatan kapal perikanan serta awak kapal perikanan yang beraktivitas di wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

6. Melaksanakan rapat konsolidasi terkait perpanjangan SIPI/SIKPI bagi kapal perikanan yang ada di PP Binaan sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan. Rapat ini bertujuan untuk memastikan proses perpanjangan perizinan dapat berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 12. Kegiatan Penunjang Pencapaian Kapal Perikanan Izin Daerah

Indikator Kinerja (IK-9) : Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. Tingkat pemenuhan dibagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

1. Nilai $\leq 0,25$ = Kategori "Kurang",
2. Nilai $> 0,25$ s.d $< 0,50$ = Kategori "Cukup",
3. Nilai $> 0,50$ s.d $< 0,75$ = Kategori "Baik",
4. Nilai $> 0,75$ s.d $1,00$ = Kategori "Sangat Baik".

Untuk mendapatkan nilai IKU ini diformulasikan dengan perhitungan jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah masing-masing kepatuhan di setiap range GT kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT kapal yang terdapat di pelabuhan.

Target IKU di tahun 2025 adalah sebesar 0,26 dengan periode pengukuran semester. Adapun capaian pada IKU ini terlampir pada tabel berikut:

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 4					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 9					Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,26	0,58	120	N/A	N/A	0,58	0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 0,58 yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan target sebesar 0,26 atau selisih +0,32 poin. Hal ini menandakan bahwa upaya pemenuhan persyaratan bekerja bagi AKP telah melampaui ekspektasi dan masuk ke dalam kategori baik. Adapun rincian pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

Tabel 31. Formula Perhitungan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Pemenuhan Persyaratan	Kriteria Ukuran (GT)	Range Kapal	Parameter diharapkan	yang	Jumlah krulis/ SPB yang terbit	Rata-Rata Nilai Pembobotan	Total Nilai
Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Bekerja di Atas Kapal Perikanan	S.d 5 GT		Dari SPB yang terbit (Pemenuhan persyaratan (Nahkoda memiliki Sertifikat Kompetensi SKN dan Jamsos untuk Nahkoda). Terpenuhinya persyaratan: 1. Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP		166	166	1

Pemenuhan Persyaratan	Kriteria Ukuran (GT)	Range Kapal	Parameter yang diharapkan	Jumlah krulis/ SPB yang terbit	Rata-Rata Nilai Pembobotan	Total Nilai
			2. Jamsos bagi nahkoda 3. Krulis			
	>5 s.d 30 GT		Pemenuhan persyaratan (usia, PKL, jamsos, surat keterangan sehat, sertifikat kompetensi) → tanp BPP dan Sijil. Terpenuhi persyaratannya: 1. Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP 2. PKL 3. Jamsos 4. Krulis	2062	1031	0,50
	>30 s.d 100 GT		Pemenuhan persyaratan (Usia, PKL, Jamsos, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat Kompetensi, BPP) → tanpa Sijil. Terpenuhi persyaratannya: 1. Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP 2. PKL 3. Jamsos 4. Krulis	2	0,5	0,25

Capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya karena baru ada di tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung sama-sama memperoleh nilai 0,58 atau kategori baik. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran pemilik kapal/nahkoda terhadap pentingnya kelengkapan dokumen dan sertifikasi awak kapal perikanan terutama dalam pemenuhan aspek keselamatan dan ketenagakerjaan serta sosialisasi regulasi dan pendampingan teknis intensif dari instansi teknis seperti Balai Kekarantinaan Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kesyahbandaran dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp2.593.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 32. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Sosialisasi SCPIB di Kendari	100	2.593.000	2.593.000	100	259.300.000	256.707.000
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja kesyabandaran dan tim operasional pelabuhan serta instansi teknis seperti Balai Kekarantinaan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang IKU ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan di Desa Mola Selatan, Kab. Wakatobi pada tanggal 22-23 Januari 2025. Sebanyak 23 orang peserta hadir untuk mengikuti materi terkait Prinsip Penanganan ikan diatas kapal, Kemunduran mutu Ikan, Persyaratan sanitasi dan higienis, pemeliharaan mutu, standar pembongkaran ikan, pengendalian potensi dan bahaya kontaminasi, ketelurusan SCIPB Kapal.
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecapakan Nelayan yang berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 24-25 Januari 2025 bertempat di Aula BPD Desa Mola Selatan Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi. Sebanyak 32 orang nelayan menerima materi terkait pengetahuan dasar operasi penangkapan ikan, alat tangkap, keselamatan kerja dan praktek pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan diatas kapal.





3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan yang bersinergi dengan Dinas Perikanan Kota Bau-Bau yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 30 April s/d 01 Mei 2025 yang bertempat di Di Aula Hotel Hing Aminah Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau. Bimtek SKN ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan serta sebagai Pemenuhan persyaratan bekerja pada kapal perikanan s.d. 30 GT dimana aturan ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Bimtek SKN dihadiri sebanyak 50 peserta, Bapak Muh. Ikram selaku Instruktur dari PPS Kendari membekali peserta dengan 2 Sub pokok materi utama yang meliputi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan.



4. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Yayasan IPNLF Indonesia dan AP2HI menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 15

s/d 16 Mei 2025 yang bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Bimtek SKN dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan serta sebagai Pemenuhan persyaratan bekerja pada kapal perikanan s.d. 30 GT dimana aturan ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Bimtek SKN dihadiri oleh 29 peserta, Romy Rachmad Kurniawan Instruktur dari PPS Kendari membekali peserta dengan 2 Sub pokok materi utama yang meliputi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan yang disertai praktik pencegahan penanggulangan kebakaran.



5. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 15 s/d 16 Mei 2025 yang bertempat di Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Bimtek SKN dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan serta sebagai Pemenuhan persyaratan bekerja pada kapal perikanan s.d. 30 GT dimana aturan ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Bimtek SKN dihadiri oleh 31 peserta, Bapak Mukhtar A.PI Instruktur dari PPS Kendari membekali peserta dengan 2 Sub pokok materi utama yang meliputi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan yang disertai praktik pencegahan penanggulangan kebakaran



6. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Yayasan IPNLF Indonesia dan AP2HI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal yang bertempat di Ruang Rapat Madidihang PPS Kendari. Bimtek CPIB dihadiri oleh 29 peserta, Bapak Suparjo Sianturi dan Hariyadian A. selaku pemateri dari PPS Kendari memaparkan materi terkait dasar hukum sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, tujuan penanganan ikan yang baik, beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan, Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) serta penerapan sistem rantai dingin untuk menjamin mutu ikan mulai dari penangkapan sampai dengan pendistribusian



7. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan PT. Pahala Bahari Nusantara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal yang bertempat di Ruang Rapat Madidihang PPS Kendari. Bimtek CPIB dihadiri oleh 17 peserta,

Bapak Hariyadian A. dan Firman Setiawan selaku pemateri dari PPS Kendari memaparkan materi terkait dasar hukum sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, tujuan penanganan ikan yang baik, beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan, Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) serta penerapan sistem rantai dingin untuk menjamin mutu ikan mulai dari penangkapan sampai dengan pendistribusian.



8. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Konawe menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal yang bertempat di Aula Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalonggaso Meeto Kabupaten Konawe. Bimtek CPIB dihadiri oleh 17 peserta, Bapak Suparjo Sianturi dan Hariyadian A. selaku pemateri dari PPS Kendari memaparkan materi terkait Cara Penanganan Ikan yg Baik di atas Kapal, HACCP Dasar, Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan, Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) serta penerapan sistem rantai dingin untuk menjamin mutu ikan mulai dari penangkapan sampai dengan pendistribusian.



9. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari memfasilitasi kegiatan dialog bersama Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang membahas percepatan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas Kapal. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Madidihang PPS Kendari dan dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang beroperasi di sekitar pelabuhan, serta perwakilan dari PPS Kendari. Hadir pula Tenaga Ahli Menteri KKP Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, serta Kepala BPPMHKP Kendari. Melalui dialog ini, para pelaku usaha diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi CPIB dalam menjamin mutu hasil tangkapan sejak dari hulu, khususnya penanganan di atas kapal. Sertifikasi CPIB menjadi salah satu syarat utama dalam rantai pasok produk perikanan yang aman, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, baik di pasar nasional maupun internasional.



10. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Fauna and Flora Indonesia serta PP. Untia menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 24 s/d 25 Juli 2025 yang bertempat di Pulau Kapoposang Kab. Pangkep Sulawesi Selatan. Bimtek SKN dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan serta sebagai Pemenuhan persyaratan bekerja pada kapal perikanan s.d. 30 GT dimana aturan ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024.

Bimtek SKN dihadiri oleh 34 peserta, Muhammad Ikram selaku Instruktur dari PPS Kendari membekali peserta dengan 2 Sub pokok materi utama yang meliputi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan yang disertai praktik pencegahan penanggulangan kebakaran. Diharapkan ilmu yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh peserta bimtek. Sehingga kompetensi, keselamatan kerja dan efisiensi penangkapan ikan oleh nelayan dapat meningkat.



11. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keselamatan kerja di laut, PPS Kendari bertindak sebagai instruktur bersama PP Untia sebagai lembaga bimtek melaksanakan Bimbingan Teknis Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) yang diikuti 65 peserta nelayan di Pulau Podang-Podang, Sulsel. yang berlangsung pada tanggal 26 -27 Juli 2025. Katimja kesyahbandaran, dalam bimbingannya beliau memberikan pemahaman teknis dan legalitas kerja bagi nelayan agar lebih siap menghadapi tantangan di laut serta

meningkatkan taraf hidup mereka melalui praktik yang lebih profesional. Selanjutnya beliau menekankan pentingnya keselamatan di atas kapal, termasuk penggunaan alat keselamatan, penanganan keadaan darurat, dan praktik berlayar yang aman sesuai standar.



12. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berkolaborasi dengan PT. Pahala Bahari Nusantara mengadakan bimbingan teknis (bimtek) tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Pelatihan tersebut diikuti oleh peserta yang merupakan nelayan di PPS Kendari dan tamu undangan dari DKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan narasumber dari PPS Kendari, Bapak Hariyadian A. dan Suparjo Sianturi, memaparkan materi yang meliputi dasar hukum sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, tujuan dari penanganan ikan yang benar, faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan, Standar Prosedur Operasi Sanitasi (SSOP), serta penerapan rantai dingin untuk memastikan kualitas ikan terjaga sejak proses penangkapan hingga distribusi.

Di akhir sesi, narasumber dari tim PT. Pahala Bahari memberikan sosialisasi tentang hak-hak nelayan, kebijakan sosial FIP PS Kendari, dan upaya mitigasi bycatch terhadap spesies yang dilindungi (ETP). Diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh agar mutu dan keamanan hasil perikanan tetap terjamin.



13. Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari berkolaborasi dengan PT. Pahala Bahari Nusantara mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala PPS Kendari, Bapak Asep Saepulloh, dan diikuti oleh nelayan di lingkungan PPS Kendari. Narasumber berasal dari PPS Kendari, yaitu Bapak Hariyadian A. dan Bapak Suparjo Sianturi, serta pemateri dari BPPMHKP Kendari, Ibu Kasrida. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, tujuan penanganan ikan yang benar, faktor-faktor penyebab penurunan kualitas ikan, Standar Prosedur Operasi Sanitasi (SSOP), serta penerapan rantai dingin untuk menjaga mutu ikan sejak penangkapan hingga distribusi.

Di akhir sesi, tim dari PT. Pahala Bahari Nusantara memberikan sosialisasi mengenai hak-hak nelayan, kebijakan sosial FIP PS Kendari, serta upaya mitigasi bycatch terhadap spesies yang dilindungi (ETP).^[SEP] Melalui kegiatan ini, diharapkan para nelayan dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan, serta turut mendukung terwujudnya Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas



14. Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari berkolaborasi dengan PT. Pahala Bahari Nusantara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) yang berlangsung selama dua hari, pada 16–17 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 19 peserta nelayan PPS Kendari, dengan instruktur dari PPS Kendari, yaitu Bapak M. Ikram dan Bapak Romy Rachmad. Materi yang diberikan meliputi pengetahuan dasar pelayaran, alur pelayaran, operasi penangkapan ikan, rancang bangun kapal perikanan, pengenalan alat keselamatan kerja di kapal perikanan, serta pertolongan pertama pada kecelakaan, yang dilanjutkan dengan praktik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kapal perikanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kompetensi, keselamatan kerja, serta efisiensi operasi penangkapan ikan di laut. PPS Kendari menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Pahala Bahari Nusantara atas kolaborasi dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan ini.



15. PPS Kendari mengadakan Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan selama 2 hari mulai tanggal 4 s/d 5 November 2025. Sebanyak 40 nelayan mengikuti Bimtek SKN ini untuk meningkatkan kompetensi dan keselamatan dalam operasi penangkapan ikan dan selama pelayaran. Melalui peningkatan kualitas SDM nelayan, kita dorong perikanan yang lebih profesional, aman, dan berkelanjutan



16. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berkolaborasi dengan PT. Pahala Bahari Nusantara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dan Cara Penanganan Ikan dengan Baik (CPIB) yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 02 sampai 03 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta nelayan PPS Kendari, dengan instruktur dari PPS Kendari, yaitu Bapak M. Ikram dan Bapak Mukhtar. Adapun materi yang disampaikan meliputi pengetahuan dasar pelayaran, alur pelayaran, operasi penangkapan ikan, pengenalan alat keselamatan kerja di kapal perikanan, serta pertolongan pertama pada kecelakaan, yang dilanjutkan dengan praktik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di atas kapal

perikanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kompetensi, keselamatan serta efisiensi operasi penangkapan ikan di laut.

17. Dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme nelayan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, PPS Kendari bersama PPI Wameo sebagai I melaksanakan Bimbingan Teknis Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN). Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta nelayan PPI Wameo Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, dengan instruktur yaitu

Bapak M. Ikram. Adapun materi yang disampaikan mengenai Pengetahuan Dasar Pelayaran dan Operasi Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan serta Pengenalan Alat Keselamatan Kerja di Kapal Perikanan, yang dilanjutkan dengan praktik Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Atas Kapal Perikanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kompetensi, keselamatan kerja serta efisiensi pelaksanaan operasional penangkapan ikan di laut.



Gambar 13. Kegiatan Penunjang IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

3.2.5. Sasaran Kegiatan 5 – Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pada Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 9 (sembilan) indikator yang mendukung yaitu: (1) Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (2) Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (3) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (4) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks), (5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (6) Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (7) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (8) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Indikator Kinerja (IK-10) : Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan, pengawasan, dan pengakuan akuntabilitas kerja. Secara teknis unit kerja tersebut harus memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 dan mencapai nilai 45,10 bagi Duaan kerja yang belum atau akan dicanangkan menuju WBK.

Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap komponen proses yang mencakup 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil yang mencakup 3 (tiga) komponen. Komponen tersebut adalah:

1. Manajemen perubahan;

2. Penataan tata laksana;
3. Penataan manajemen SDM aparatur;
4. Penguatan akuntabilitas;
5. Penguatan pengawasan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Target nilai capaian pembangunan zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah 75,5 dengan periode pengukurannya adalah tahunan. Adapun capaian pada IKU ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja "Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan" Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 10					Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
72,18	81,31	80,93	83,33	83,37	75,5	83,53	110,64	N/A	N/A	94,19	88,68

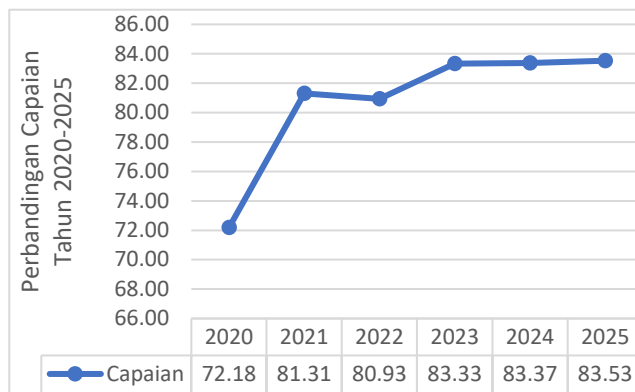
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 83,53% atau 110,64% dari target. Adapun rekapitulasi PM Capaian Pembangunan Zona Integritas di PPS Kendari tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 34. Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Tahun 2025

No	Penilaian	Bobot	Nilai	Persentase
PENGUNGKIT		60,00	53,53	89,21
PEMENUHAN		30,00	25,87	86,23
1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,70	92,56
2.	Penataan Tata Laksana	3,50	2,31	65,90
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,55	90,90
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,84	96,88
5.	Penguatan Pengawasan	7,50	5,79	77,21

No	Penilaian	Bobot	Nilai	Persentase
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,68	93,60
REFORM		30,00	27,66	92,19
1.	Manajemen Perubahan	4,00	4,00	100
2.	Penataan Tata Laksana	3,50	3,00	85,71
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	5,00	100
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,91	95,45
5.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,87	77,46
TOTAL PENGUNGKIT			53,53	
HASIL		40,00	30,00	75,00
1.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50	16,88	75,00
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	13,13	
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Sebelumnya	5,00	3,75	
II	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	13,13	75,00
a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	13,13	
TOTAL HASIL			30,00	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS			85,53	

Jika dibandingkan dengan realisasi di 5 tahun terakhir, capaian pada tahun 2025 ini merupakan yang tertinggi, walaupun cenderung stagnan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan area perubahan zona integritas baik dari aspek manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, maupun kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2019, IKU ini berbunyi "Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi



Birokrasi PPS Kendari (%)”, sehingga formula perhitungannya berbeda dengan tahun-tahun selanjutnya.

Grafik 15. Perbandingan Capaian PM ZI Tahun 2020-2025

Apabila dibandingkan dengan capaian di unit kerja lain yang setara yaitu PPS Bitung, capaian di PPS Kendari hanya mencapai 88,68% dari capaian PPS Bitung. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Pencapaian IKU PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan pada tahun ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembangunan ZI di PPS Kendari berhasil dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya pemahaman pegawai terhadap implementasi ZI, penguatan komitmen bersama, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp1.700.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 35. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan” Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan ZI	100	1.700.000	1.398.000	82,24	170.000.000	168.602.000

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,91%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,79%	

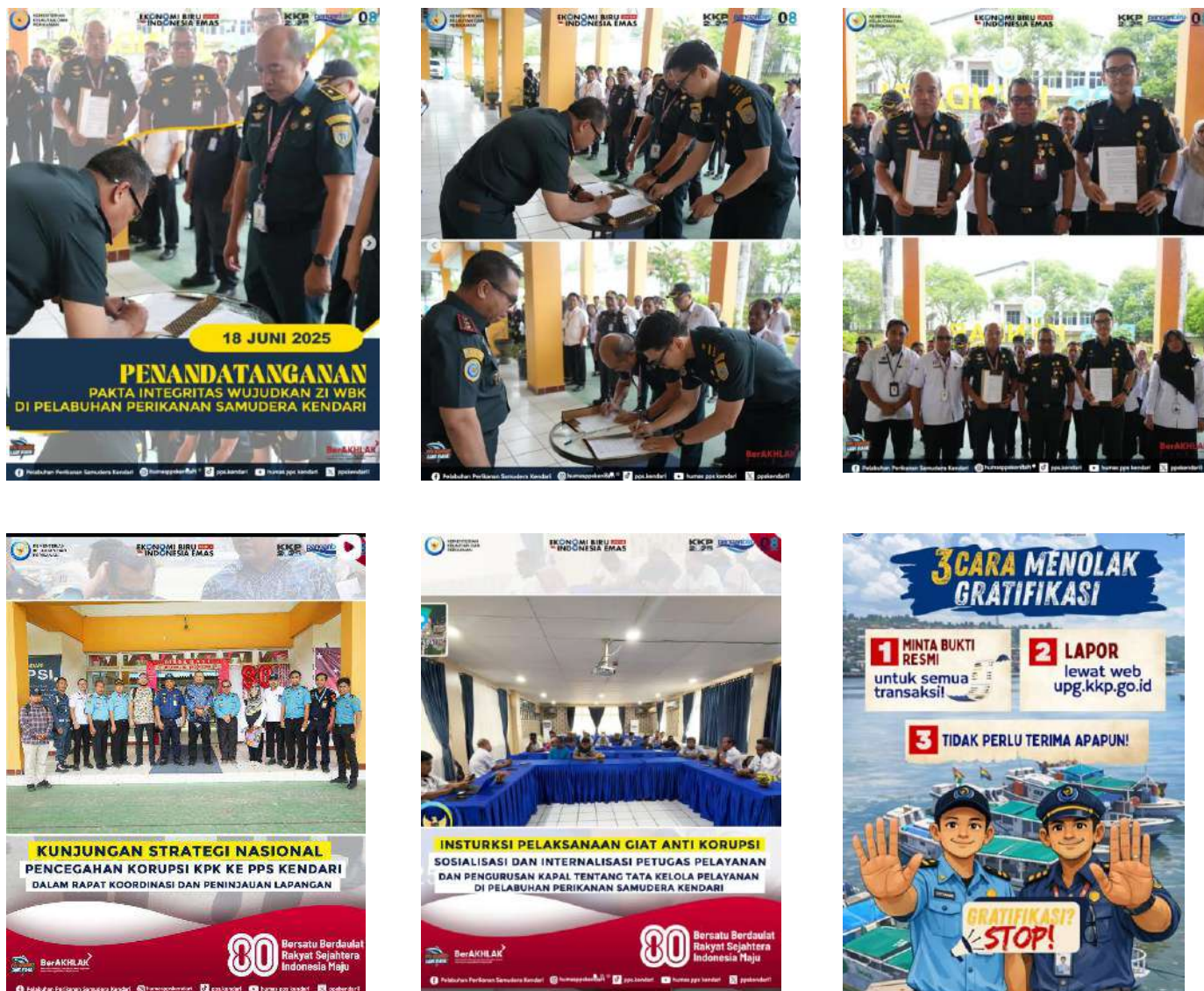
Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,79%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh seluruh tim kerja yang terlibat sesuai dengan subtim yang ada.

Kegiatan penunjang pencapaian Nilai PM WBK ini beberapa telah dilaksanakan antara lain penandatanganan pakta integritas di PPS Kendari, penyematan secara simbolis PIN WBK untuk seluruh pegawai PPS Kendari, imbauan stop gratifikasi, serta kunjungan lapangan dari Tim Stranas PK (Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta Sosialisasi dan Internalisasi petugas pelayanan dan pengurusan kapal tentang tata kelola pelayanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.





Gambar 14. Penunjang Pencapaian Nilai PM WBK ZI

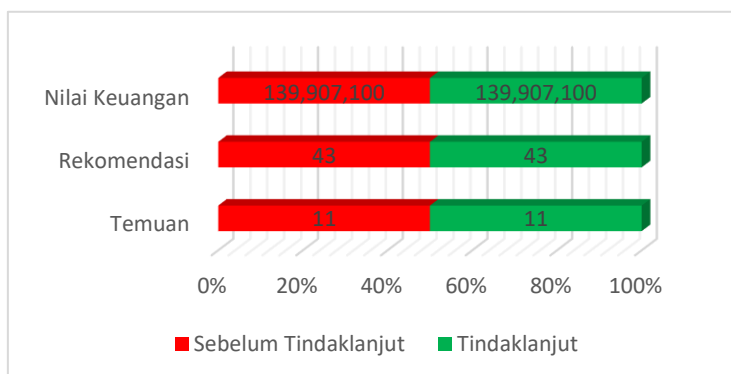
Indikator Kinerja (IK-11) : Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Merupakan indikator yang menilai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, revidu, dan evaluasi baik untuk bentuk surat maupun bab) yang terbit pada V Tahun 2024 sd tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Target IKU ini adalah 85 dengan periode pengukurannya adalah triwulanan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja “Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 11					Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	82	100	85	100	117,65	N/A	N/A	100	0

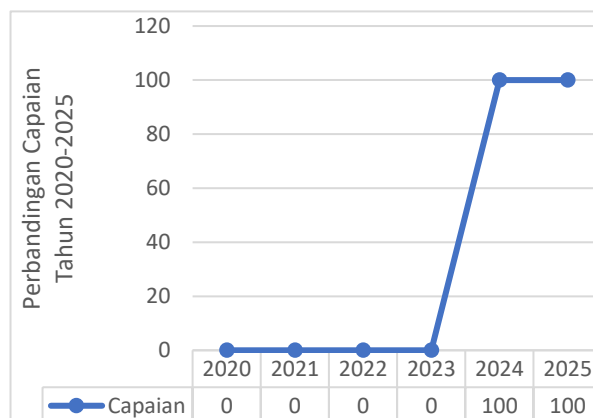
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 100% atau 117,65% dari target tahunan. Capaian ini didapatkan dari hasil capaian pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP audit, reviu, dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang berarti seluruh hasil



pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Seluruh hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti di aplikasi SIDAK pada tahun 2025.

Grafik 16. Grafik Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan

Jika dibandingkan dengan realisasi pada 5 tahun sebelumnya, capaian pada tahun ini sama dengan yang sebelumnya yaitu bernilai 100% yang artinya tidak terjadi penurunan capaian dan terus dipertahankan pada tahun selanjutnya.



Grafik 17. Perbandingan Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan

Apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung sama-sama memperoleh 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut didukung oleh komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat waktu dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp7.000.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 37. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan ZI	100	1.700.000	1.398.000	82,24	170.000.000	168.602.000
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,91%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,79%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja

skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,79%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh seluruh tim kerja.

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan yang rutin dilaksanakan.



Gambar 15. Kegiatan Penunjang Pencapaian Presentase Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja (IK-12) : Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator penilaian mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri

dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dihitung berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Adapun kategori dan predikat penilaian mandiri SAKIP sebagai berikut:

Tabel 38. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Target Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah 88 dengan periode pengukuran adalah tahunan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

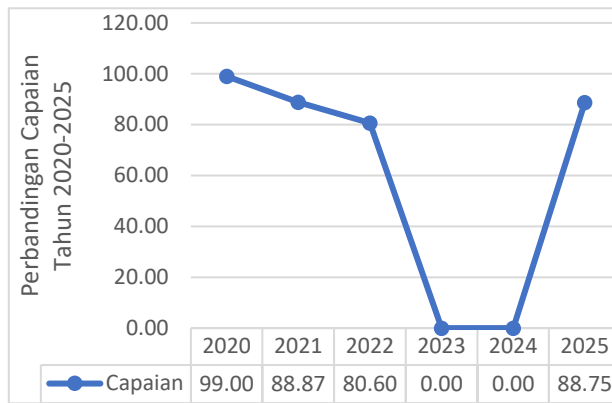
Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 12					Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
99	88,87	80,60	N/A	N/A	88	88,75	100,85	N/A	N/A	88,50	100,28

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 88,75 atau 100,85% dari target tahunan. Capaian ini didapatkan dari hasil LKE yang mencakup 4 komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun LKE PPS Kendari tahun 2025 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 40. Lembar Kerja Evaluasi PM SAKIP Tahun 2025

No	Komponen				Nilai	Predikat
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal		
1.	27,60	24,60	12,30	24,25	88,75	A

Jika dibandingkan dengan realisasi pada 5 tahun sebelumnya, indikator kinerja Nilai PM SAKIP terakhir digunakan pada tahun 2022 yang selanjutnya pada tahun 2023-2024 tidak digunakan seiring dengan penyesuaian kebijakan evaluasi dan perubahan instrumen penilaian. Pada tahun 2025 ini capaian sebesar 88,75. Perbedaan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh perubahan LKE serta penyesuaian jenis dan kualitas data dukung yang harus dipenuhi sehingga standar penilaian menjadi lebih komprehensif dan detail. Meskipun



demikian, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan evaluasi yang berlaku.

Grafik 18. Perbandingan Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2020-2025

Apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung memperoleh nilai 88,50 atau lebih kecil 0,25 dari PPS Kendari. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Pencapaian IKU yang melebihi target ini didukung antara lain karena terpenuhinya seluruh komponen LKE SAKIP secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, serta adanya komitmen dalam menjaga keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp3.900.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 41. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	100	3.900.000	3.836.900	98.38	390.000.000	388.163.100
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja Dukungan Manajerial.

Adapun capaian kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP JALAN MEGALHIDEA TIRUANDOR 16 JAKARTA 10110 KOTA SUDIRTA 10110 TELPON (021) 7002-12345 FAX (021) 7002-12345 www.kemari.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Dalam rangka pelaksanaan manajemen pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Syahril Abd. Raup Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Sebagai mitra di pihak pertama: Nama : Lutharna Latif Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Selaku mitra pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas kinerja yang telah tercantum sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang merupakan aspek yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterlaksanaan dari kegiatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengganti insentif yang dibutuhkan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 24 Januari 2025 Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Tangkap <i>(Lutharna Latif)</i> Pihak Pertama Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari <i>(Syahril Abd. Raup)</i>		PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>INDIKATOR KINERJA</th><th>INDIKATOR HASIL</th><th>ALOKASI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Misi MPP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari</td><td>1. Penemuan MPSP Non SQS di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)</td><td>7.241,04</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat</td><td>2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Tn)</td><td>16.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Berdaya Guna</td><td>3. Persentase Pemeliharaan Penguasaan yang Diambil dan/atau Diakuisisi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)</td><td>100</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>4. Tingkat Kinerja Produksi Perikanan Samudera Kendari (Nilai)</td><td>87</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>5. Tingkat Pelayanan Keagregasiannya Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)</td><td>89</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>6. Persentase Pengendalian Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)</td><td>80</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)</td><td>30,10</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pengembangan Kapasitas Perikanan Kapal Perikanan dan APD Perikanan Aktif yang Berorientasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari</td><td>8. Kapasitas Perikanan (Jm Denda yang Menembus Batasannya) (Kapal)</td><td>2353</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>9. Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bekerja Asah Kapal Perikanan (Nilai)</td><td>0,28</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Terwujudnya Layanan Buletang Manajemen yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari</td><td>10. Nilai PM Pemantauan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (yang telah diuji WDA) (Nilai)</td><td>75,5</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diimplementasikan untuk Pelabuhan Perikanan Perikanan Samudera Kendari (Persen)</td><td>85</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)</td><td>88</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)</td><td>87</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>14. Persentase Rincian Urutan Pengawasan PSU yang diimplementasikan pada SPU/PAI di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)</td><td>76</td></tr> </tbody> </table> Jakarta, 24 Januari 2025 Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Tangkap <i>(Lutharna Latif)</i> Pihak Pertama Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari <i>(Syahril Abd. Raup)</i>		NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL	ALOKASI	1	Misi MPP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1. Penemuan MPSP Non SQS di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7.241,04	2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Tn)	16.000	3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Berdaya Guna	3. Persentase Pemeliharaan Penguasaan yang Diambil dan/atau Diakuisisi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100			4. Tingkat Kinerja Produksi Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87			5. Tingkat Pelayanan Keagregasiannya Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	89			6. Persentase Pengendalian Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80			7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10	4	Pengembangan Kapasitas Perikanan Kapal Perikanan dan APD Perikanan Aktif yang Berorientasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8. Kapasitas Perikanan (Jm Denda yang Menembus Batasannya) (Kapal)	2353			9. Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bekerja Asah Kapal Perikanan (Nilai)	0,28	5	Terwujudnya Layanan Buletang Manajemen yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10. Nilai PM Pemantauan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (yang telah diuji WDA) (Nilai)	75,5			11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diimplementasikan untuk Pelabuhan Perikanan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85			12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88			13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87			14. Persentase Rincian Urutan Pengawasan PSU yang diimplementasikan pada SPU/PAI di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76
NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL	ALOKASI																																																												
1	Misi MPP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1. Penemuan MPSP Non SQS di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7.241,04																																																												
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Tn)	16.000																																																												
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Berdaya Guna	3. Persentase Pemeliharaan Penguasaan yang Diambil dan/atau Diakuisisi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100																																																												
		4. Tingkat Kinerja Produksi Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87																																																												
		5. Tingkat Pelayanan Keagregasiannya Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	89																																																												
		6. Persentase Pengendalian Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80																																																												
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10																																																												
4	Pengembangan Kapasitas Perikanan Kapal Perikanan dan APD Perikanan Aktif yang Berorientasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8. Kapasitas Perikanan (Jm Denda yang Menembus Batasannya) (Kapal)	2353																																																												
		9. Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bekerja Asah Kapal Perikanan (Nilai)	0,28																																																												
5	Terwujudnya Layanan Buletang Manajemen yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10. Nilai PM Pemantauan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (yang telah diuji WDA) (Nilai)	75,5																																																												
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diimplementasikan untuk Pelabuhan Perikanan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85																																																												
		12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88																																																												
		13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87																																																												
		14. Persentase Rincian Urutan Pengawasan PSU yang diimplementasikan pada SPU/PAI di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76																																																												

Gambar 16. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada 28 Maret 2025 terjadi pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama setara Eselon II sehingga dilakukan kembali penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan I antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang baru, sebagaimana terlampir:

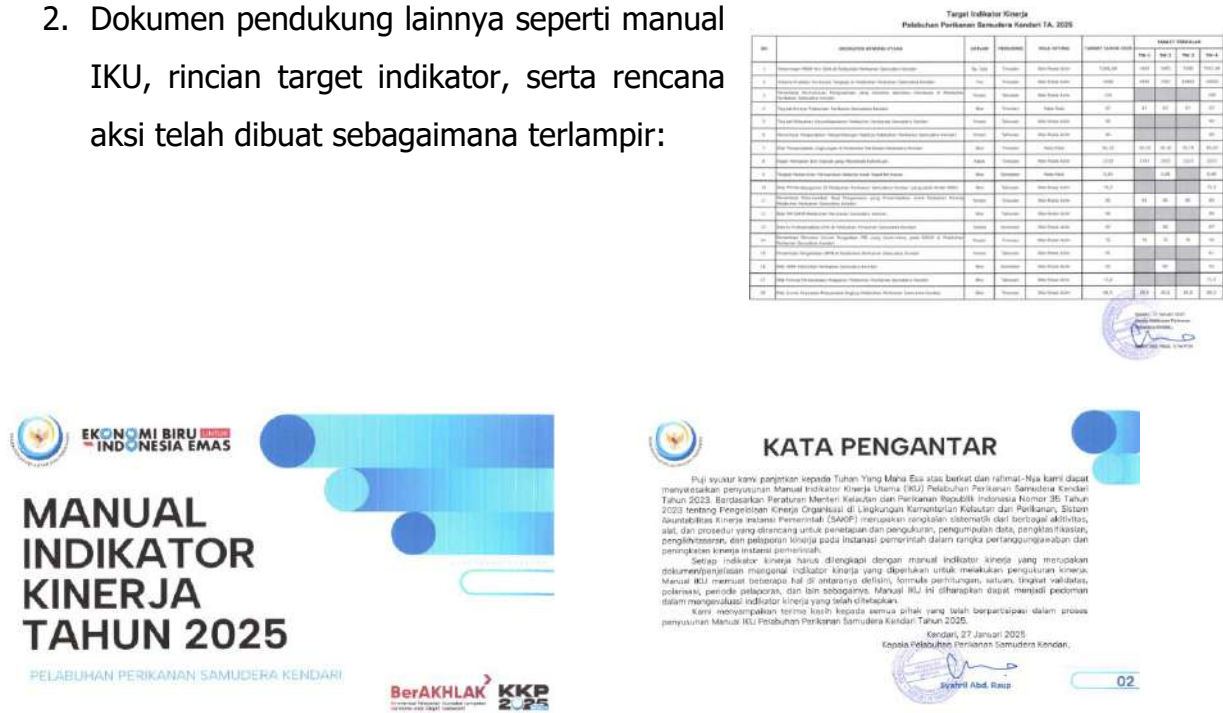


The image displays the 'Perjanjian Kinerja Tahun 2025' (Performance Agreement 2025) for the 'Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari' (Kendari Seaport Fisheries Port). It is a formal document signed by the Director General of Fisheries Capture and the Head of the Kendari Seaport Fisheries Port. The document includes a table of performance indicators (KPIs) with columns for the indicator name, target value, and weight. The table lists 14 indicators, including 'Maks. PMP Sektor Perikanan Tangkap', 'Produktivitas Perikanan Tangkap', 'Peningkatan Pelayanan Perikanan', and 'Peningkatan Kualitas Produk Perikanan'. The document is dated April 2025 and includes the signatures of both parties.

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	Maks. PMP Sektor Perikanan Tangkap	Maks. PMP Sektor Perikanan Tangkap	7,241.04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap	18,000
3	Peningkatan Pelayanan Perikanan	Peningkatan Pelayanan Perikanan	100
4	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	87
5	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	88
6	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	80
7	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	30,10
8	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	23,93
9	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	0,28
10	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	75,9
11	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	89
12	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	88
13	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	87
14	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas Produk Perikanan	76

Gambar 17. Perjanjian Kinerja Tahun Perubahan I Tahun 2025

2. Dokumen pendukung lainnya seperti manual IKU, rincian target indikator, serta rencana aksi telah dibuat sebagaimana terlampir:



The image shows two documents related to the performance indicators. On the left is the 'Manual Indikator Kinerja' (Performance Indicator Manual) for the 'Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari' (Kendari Seaport Fisheries Port) for the year 2025. It features the logo of the Ministry of Agriculture and Forestry and the text 'EKONOMI BIRU INDONESIA EMAS'. On the right is the 'KATA PENGANTAR' (Foreword) section, which is signed by the Director General of Fisheries Capture. The foreword discusses the importance of the performance indicators and the role of the management team in achieving the targets.

[illegible][illegible]

Gambar 18. Dokumen rencana aksi, manual IKU, dan rincian indikator kinerja

3. Rapat penentuan target indikator kinerja utama tahun 2025 dan pemantauan hasil capaian IKU tahun 2025.
4. Publikasi capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025



Gambar 19. Publikasi Capaian IKU Tahun 2025

Indikator Kinerja (IK-13) : Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN yang mana bertujuan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dengan melakukan

identifikasi, pemetaan, pengembangan, penilaian dan evaluasi terhadap ASN. Pengukuran IP sangat bermanfaat bagi ASN sendiri, instansi pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 504/SJ.3/RC.610/III/2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d 2029 tanggal 13 Maret 2025, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeksi Profesionalitas ASN yaitu:
 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
 2. Indikator dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu);/ D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua) /D-I (Diploma Satu) /Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat, dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
 3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi/ di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 25;

- b. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 20;
- c. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 10;

Bobot dimensi kualifikasi pendidikan tersaji sebagai berikut:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Gambar 20. Perhitungan Dimensi Kualifikasi Pendidikan IP ASN

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri:
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya;
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial);
 - 2) Diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional);
 - 3) Diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan kompetensi 20 JP dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.
- Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Gambar 21. Perhitungan Dimensi Kompetensi IP ASN

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Gambar 22. Perhitungan Dimensi Kinerja IP ASN

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang;
 - Hukuman disiplin berat

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Gambar 23. Perhitungan Dimensi Disiplin IP ASN

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah diperbaharui dengan pemutakhiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator SIASN BKN;
 - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari:
 - a. Kualifikasi memiliki bobot 25%;
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40%;
 - c. Kinerja memiliki bobot 30%;
 - d. Disiplin memiliki bobot 5%

9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi IP ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$$

$$IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ pegawai\ ASN\ unit\ Organisasi}{Jumlah\ Pegawai\ ASN\ unit\ Organisasi}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Gambar 24. Kategori Penilaian Tingkat IP ASN

11. Penilaian IP ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN yang terdiri dari:

- a. PNS, dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian IP ASN.
12. Penilaian IP ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
- a. CPNS;
 - b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - c. Dipekerjakan (DPK);
 - d. Tugas Belajar Dibiayai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, target IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebesar 87 dengan pelaporan semester. Adapun capaian pada IKU ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja "IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 13					IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
66,06	78,17	77,68	91,02	90,78	87	90,24	103,72	N/A	N/A	89,09	101,29

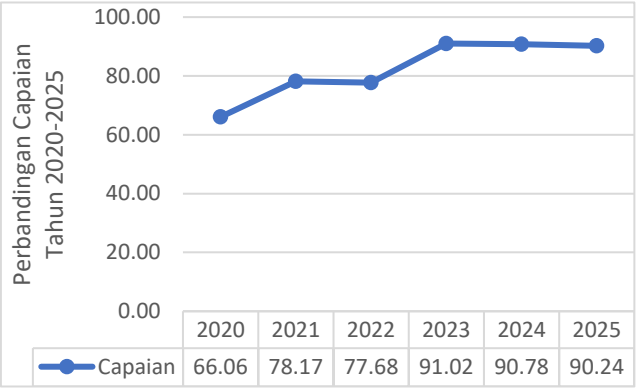
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 90,24 atau 103,72% dari target. Adapun rekapitulasi capaian nilai indeks profesionalitas ASN tahun 2025 PPS Kendari tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 43. Rekapitulasi Capaian Nilai IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

Jumlah Pegawai yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		Total	Ket
	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
67	23,28	93,12	33,71	86,78	27,24	90,8	5	100	90,24	Tinggi

Jika dibandingkan dengan realisasi di 5 tahun terakhir, capaian IP ASN tahun ini menempati urutan ke -3 tertinggi dan mengalami penurunan nilai dari tahun lalu. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya kualitas profesionalitas

ASN, melainkan dipengaruhi oleh perubahan jumlah pegawai yang menjadi objek perhitungan indeks. Pada tahun sebelumnya, hanya didasarkan pada 60 orang pegawai, sedangkan pada tahun ini jumlah pegawai yang dihitung mencapai 67 orang. Bertambahnya jumlah pegawai yang dinilai berdampak pada variasi pemenuhan komponen indeks, sehingga mempengaruhi nilai yang dihasilkan. Meskipun demikian, capaian pada IP ASN tahun 2025 tetap berada di atas target yang ditetapkan serta didukung oleh mekanisme pengelolaan data kepegawaian



yang semakin baik melalui myASN juga meningkatnya kemandirian dan kesadaran pegawai dalam melakukan penginputan data.

Grafik 19. Perbandingan Capaian IP ASN Tahun 2020-2025

Apabila dibandingkan dengan capaian di unit kerja lain yang setara yaitu PPS Bitung, capaian di PPS Kendari melebihi 101,29% dari capaian PPS Bitung. Jika dilihat dari komposisi jumlah pegawai yang dihitung, PPS Bitung hanya ada 49 orang pegawai, sedangkan PPS Kendari mencapai 67 orang pegawai. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala setiap triwulan yang hasilnya diinformasikan melalui grup internal sebagai pengingat dan dorongan untuk segera melakukan tindak lanjut. Selain itu, meningkatnya kesadaran serta kebiasaan pegawai dalam melakukan pemutakhiran data secara mandiri pada myASN turut berkontribusi terhadap optimalnya capaian indikator ini.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp3.500.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 44. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

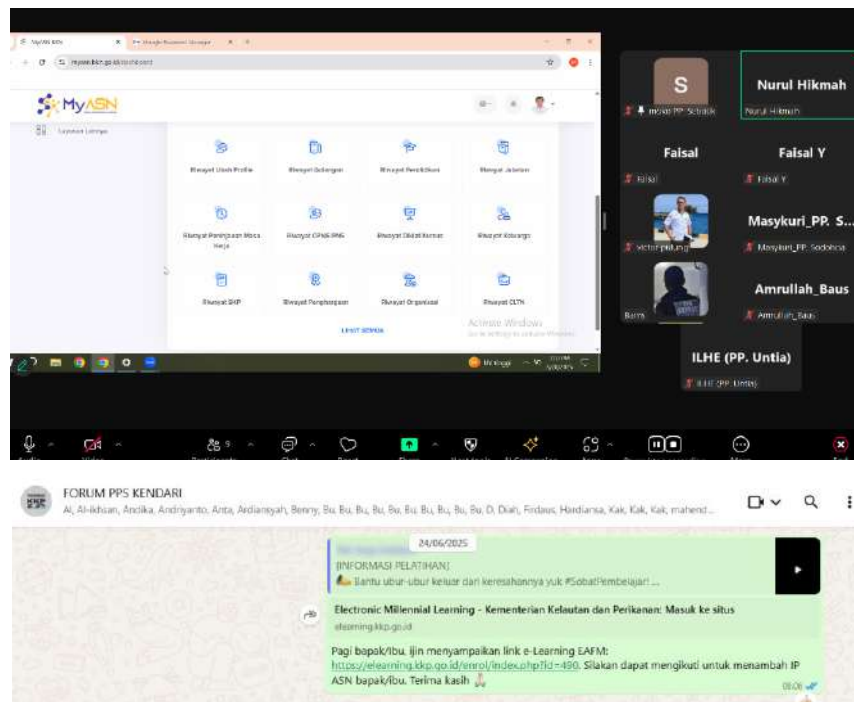
Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	3.500.000	3.431.000	98,03	350.000.000	346.569.000
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh seluruh pegawai di PPS Kendari.

Adapun kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain sosialisasi peremejaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi myASN dan imbauan untuk mengikuti mengikuti diklat/seminar pada e-Milea sebagaimana terlampir:



Selain itu, PPS Kendari juga meluncurkan Aplikasi Absensi Apel Pagi sebagai bentuk inovasi dalam mendukung peningkatan disiplin dan tata kelola kehadiran pegawai. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran apel pagi secara real-time, efisien, dan transparan. Kegiatan launching dipimpin langsung oleh ibu Kasubag Umum bersama kepala PPS Kendari dan diikuti oleh seluruh pegawai. Dalam arahnya, beliau menyampaikan bahwa digitalisasi sistem kehadiran ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Dengan hadirnya aplikasi ini, PPS Kendari terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan internal dan eksternal melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Semoga langkah ini menjadi awal yang baik menuju lingkungan kerja yang lebih profesional dan adaptif.



Gambar 25. Kegiatan Penunjang Pencapaian IP ASN PPS Kendari

Indikator Kinerja (IK-14) : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrument penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Renacan Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Presentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 1. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase SIRUP: } \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Target Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SIRUP di Samudera Kendari adalah 76 dengan periode pengukuran adalah triwulan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 14					Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76	100	120	N/A	N/A	100	0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 100% atau 120% dari target tahunan. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari telah melakukan revisi RUP ada aplikasi SiRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun. Adapun hasil perhitungan capaian indikator ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 46. Hasil Perhitungan Capaian "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Pagu Pengadaan			Statistik Moner			% RUP Terumumkan	
Σ RUP Penyedia	Σ RUP Swakelola	Σ RUP	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	Total Pengadaan	Selisih Pagu Pengadaan – Pagu Terumumkan	% RUP Terumumkan
38.627.180.000	-	38.627.180.000	31.472.039.000	7.155.141.000	38.627.180.000	-	100%

Indikator kinerja ini merupakan IKU yang baru di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan capaian di unit kerja lain yang setara yaitu PPS Bitung, capaian di PPS Kendari dan capaian PPS Bitung sama-sama bernilai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra

DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Pencapaian IKU ini didukung oleh koordinasi yang baik antar tim kerja, perencanaan pengadaan yang lebih tertib, serta komitmen dalam memenuhi ketentuan pengumuman RUP pada SIRUP. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp1.087.160.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 47. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Pemeliharaan fasilitas Pelabuhan	100	142.951.000	142.499.000	99.68	14.295.100.000	14.152.601.000
Pemeliharaan untuk menunjang optimalisasi PNBP	100	213.273.000	213.207.900	99.97	21.327.300.000	21.114.092.100
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	100	641.936.000	640.731.000	99.81	64.193.600.000	63.552.869.000
Sarana Pendukung Fasilitas Pelabuhan	100	2.500.000	2.500.000	100	250.000.000	247.500.000
Pegadaan Peralatan untuk Menunjang Optimalisasi PNBP	100	86.500.000	85.001.800	98.27	8.650.000.000	8.564.998.200
Jumlah	100	1.087.160.000	1.083.939.700	99.70	108.716.000.000	107.632.060.300
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh PPK, PBJ, dan staf PBJ.

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain penginputan paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pencatatan hasil pengadaan barang/jasa pada aplikasi AMEL.

Indikator Kinerja (IK-15) : Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya. Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan persentase pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah

dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase pengelolaan BMN ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) (12,5%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (25%)
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)
- Penggunaan BMN hasil pengadaan barang modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%)

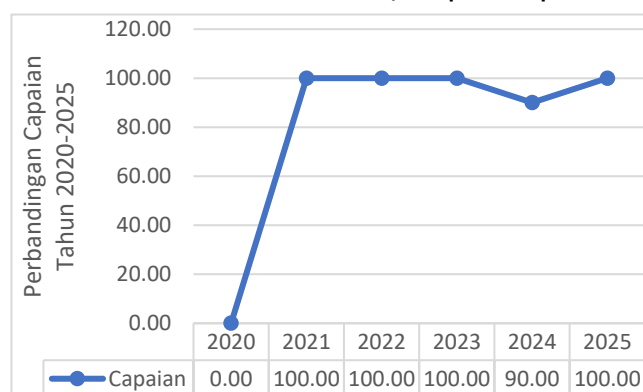
Target presentase pengelolaan BMN kerja Perikanan Samudera Kendari adalah 81 dengan periode pengukuran tahunan. Adapun capaian IKU ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 15					Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	100	100	80	90	81	100	120	N/A	N/A	87.50	114.28

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 81 atau 120% dari target. Capaian ini didapatkan dari hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pengelolaan BMN dimana seluruh komponen penilaian dapat dipenuhi sesuai bobot yang ditetapkan. Realisasi di tahun 2025 ini menunjukkan konsistensi pengelolaan BMN dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat perbedaan mekanisme penilaian LKE BMN antara tahun lalu dengan tahun berjalan. Pada tahun sebelumnya, penilaian LKE BMN dilakukan secara langsung oleh Inspektorat, sedangkan pada tahun 2025 penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri oleh satker masing-masing. Perbedaan mekanisme tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendekatan

dalam pemenuhan dan pembuktian data dukung. Jika dibandingkan dengan realisasi di 5 tahun terakhir, capaian pada tahun 2025 naik kembali mencapai



persentase 100%. Capaian ini mengalami peningkatan kembali karena hasil pengisian LKE diisi oleh satker masing-masing.

Grafik 20. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Tahun 2020-2025

Apabila dibandingkan dengan capaian di unit kerja lain yang setara yaitu PPS Bitung, capaian di PPS Kendari lebih tinggi 12,5% dari capaian PPS Bitung. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun yang membedakan pada komponen tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL tahun 2025. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp15.187.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 49. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran	100	15.187.000	14.819.667	97.58	1.518.700.000	1.503.880.333
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
$= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$						

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh PPK dan staf BMN.

Sebagai upaya dalam menunjang kinerja pencapaian Tingkat Kepatuhan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, maka dilakukan beberapa kegiatan seperti melakukan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan.

Indikator Kinerja (IK-16) : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pencapaian indikator ini yakni nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 12 (dua belas) komponen yakni (1) Revisi DIPA (2) Halaman IV DIPA (3) Pengelolaan UP (4) Rekon LPJ Bendahara (5) Data Kontrak (6) Penyelesaian Tagihan (7) Penyerapan Anggaran (8) Retur SP2D (9) Perencanaan Kas (10) Pengembalian SPM (11) Dispensasi Penyampaian SPM, dan (12) Pagi Minus. Adapun pengelompokkan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Revisi DIPA, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Target Revisi DIPA}}{\Sigma \text{Revisi DIPA}} \right)$$

- b. Halaman IV DIPA, Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam perhitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata } \left\| \left(\frac{(\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA})}{(\text{Perencanaan Hal II DIPA})} \right) \right\|$$

- c. Pengelolaan UP, Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{SPM GUP}} \right) \times 100$$

- d. Rekon LPJ Bendahara, Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang di sampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- e. Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- f. Penyelesaian Tagihan, Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

- g. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk I sebesar 15%, II

$$\left(\frac{\Sigma \text{Realisasi Anggaran}}{\Sigma \text{Pagu}} \right) \times 100$$

40%, III sebesar 60% dan sebesar 90%. K/L dengan tingkat realisasi diatas target per triwulan ke atas di berikan nilai maksimal, dengan rumusan sebagai berikut:

- h. Retur SP2D, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan Jumlah SP2D yang terbit, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D}} \right) \times 100$$

- i. Perencanaan Kas, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- j. Pengembalian SPM, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian/Lembaga (Jumlah SPM yang diterbitkan KL termasuk Jumlah SPM yang salah/ditolak). Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- k. Dispensasi penyampaian SPM, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L (Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- l. Pagu Minus, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi dua belas komponen yang terdapat pada Monev PA Pada Aplikasi OM- SPAN. Target nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 ini adalah sebesar 92 dengan periode pelaporan adalah semester. Adapun capaian pada IKU ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 50. Capaian Indikator Kinerja “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

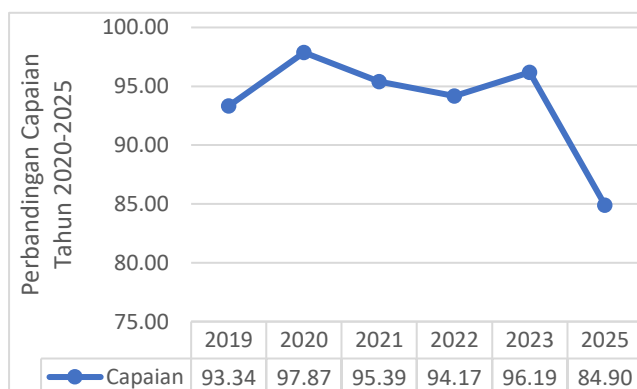
Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 16					Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
94,34	97,87	95,39	94,17	96,19	92	84,90	92,28	N/A	N/A	85,10	99,76

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 84,9 atau 92,28% dari target. Adapun rekapitulasi indikator pelaksanaan anggaran PPS Kendari tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 51. Rekapitulasi Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	032	537095	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	76.64	54.66	86.00	100.00	88.68	100.00	84.90	100%	0.00	84.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.50	10.93	8.60	10.00	8.87	25.00				
					Nilai Aspek	88.32			82.33			100.00				

Belum tercapainya IKU ini terjadi karena beberapa faktor utamanya rendahnya tingkat penyerapan anggaran yang berdampak pada penilaian kualitas pelaksanaan anggaran. Khususnya adanya alokasi anggaran sebesar ±28 Miliar yang bersumber dari dana PHLN yang belum dapat diserap pada tahun berjalan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan realisasi di 5 tahun terakhir, capaian pada tahun 2025 ini yang menjadi terendah. Meskipun demikian, rendahnya capaian IKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kegagalan pelaksanaan



program, karena dari sisi kualitas hasil pelaksanaan anggaran, capaian output tetap memperoleh nilai maksimal (100) serta tidak terdapat pengurangan nilai akibat dispense SPM.

Grafik 21. Perbandingan Capaian Nilai IKPA Tahun 2020-2025

Apabila dibandingkan dengan capaian di unit kerja lain yang setara yaitu PPS Bitung, capaian di PPS Kendaridan PPS Bitung tidak jauh berbeda karena sama-sama memiliki anggaran PHLN yang belum terserap di tahun ini. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini belum melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp19.022.013.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 52. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Gaji dan Tunjangan	100	11.601.330.000	11.521.109.712	99,31	1.160.133.000.000	1.148.611.890.288
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	7.413.183.000	6.712.853.757	90,55	741.318.300.000	734.605.446.243
Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif dan Definitif	100	7.500.000	7.337.370	97.83	750.000.000	742.662.630
Jumlah	100	19.022.013.000	18.241.300.839	95.90	1.902.201.300.000	1.883.959.999.161
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,76%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,76%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh PPK dan seluruh pengelola anggaran.

Sebagai upaya dalam menunjang kinerja pencapaian Nilai IKPA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, maka dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain monitoring dan evaluasi pelaporan yang rutin dilaksanakan.



Gambar 26. Kegiatan Penunjang IKU Nilai IKPA

Indikator Kinerja (IK-17) : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuan Perikanan Samudera Kendari

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA/KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dengan target sebesar 86 dan periode pelaporan adalah tahunan. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 2024, formula IKU ini diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

- a. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian indikator kinerja program pada level unit EselonI, dan capaian indikator kinerja sasaran strategis pada level K/L, dan;
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan RO pada RKA-K/L TA. 2025 yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA. 2025. Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi Monev Kemenkeu dengan target sebesar 71,50 dan periode pelaporan adalah tahunan. Adapun capaian pada IKU ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 53. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 17					Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	93,54	85,08	86,57	90	71,50	93,57	120	N/A	N/A	90,50	103,39

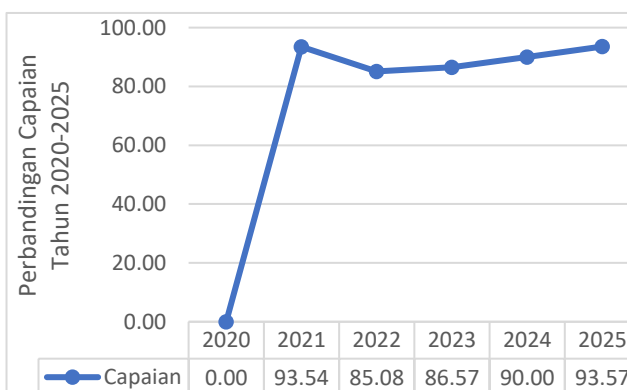
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 93,57 atau 102% dari target. Adapun rekapitulasi nilai kinerja Perencanaan Anggaran PPS Kendari tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 54. Rekapitulasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1.	537695	PPS Kendari	93,57	100	100	57,15

Jika dibandingkan dengan realisasi di 5 tahun terakhir, capaian pada tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran, namun demikian satker tetap mampu menyesuaikan proses perencanaan sehingga penerapan efisiensi tersebut tidak menurunkan kualitas perencanaan anggaran, bahkan mendorong capaian kinerja lebih optimal.

Grafik 22. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2019-2024



Apabila dibandingkan dengan capaian di unit kerja lain yang setara yaitu PPS Bitung, capaian di PPS Kendari melebihi 103,39% dari capaian PPS Bitung, namun

tidak begitu signifikan. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp18.591.761.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 55. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Gaji dan Tunjangan	100	11.601.330.000	11.521.109.712	99,31	1.160.133.000.000	1.148.611.890.288
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	7.413.183.000	6.712.853.757	90,55	741.318.300.000	734.605.446.243
Penyusunan dokumen perencanaan	100	7.500.000	7.337.370	97.83	750.000.000	742.662.630
Jumlah	100	19.022.013.000	18.241.300.839	95.90	1.902.201.300.000	1.883.959.999.161
$ERO = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{ERO}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,76%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika

dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,76%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh PPK dan seluruh pengelola anggaran.

Sebagai upaya dalam menunjang kinerja pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, maka dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain monitoring dan evaluasi pelaporan yang rutin dilaksanakan.



Gambar 27. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerja (IK-18) : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator ini merupakan indikator IKU baru yang menunjukkan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPAN

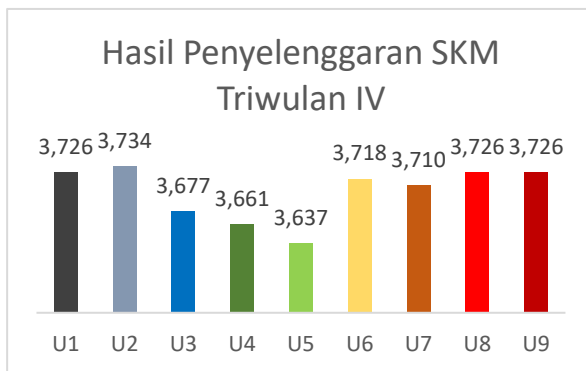
RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Perhitungan IKU ini melihat dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Persyarata layanan, kemudahan prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian biaya, kesesuaian produk, kecepatan produk, kemudahan fitur/kemampuan petugas, kualitas isi/sarana, layanan konsultasi). Hasil perhitungan ini diperoleh dari aplikasi SI SUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP. Target IKU ini sebesar 88,50 dengan periode pelaporan adalah triwulan. Adapun capaian pada IKU ini tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 56. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Indikator Kinerja – 18					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari						
Realisasi Tahun 2020-2024					Target dan Realisasi Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		Realisasi Unit Kerja Lain yang Setara	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target 2025	% Realisasi thd Target Akhir Renstra	Realisasi PPS Bitung	% Perbandingan Capaian
N/A	N/A	N/A	85,23	89,10	88,50	92,54	104,56	N/A	N/A	93,04	99,46

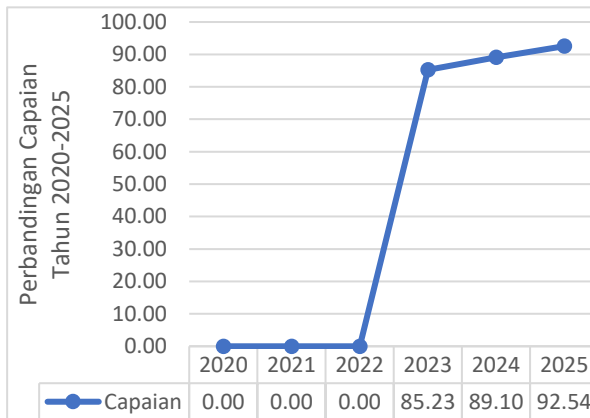
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 92,54 atau 104,56% dari target tahunan. Jumlah responden pada ini berjumlah 124 orang. Dari ke-9 unsur yang ada di SKM yaitu (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi), terdapat 3 unsur yang mendapatkan nilai di bawah dari nilai rata-rata (3,70) yaitu untuk unsur U3 Waktu Penyelesaian, unsur U4 Kesesuaian Biaya dan



U5 Kesesuaian produk. Adapun rincian hasil SKM terlampir sebagaimana grafik di samping.

Grafik 23. Grafik Hasil Penyelenggaraan SKM

Apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun-tahun sebelumnya, capaian pada tahun ini menjadi yang tertinggi menunjukkan peningkatan yang signifikan.



Hal ini mengindikasikan bahwa secara tahunan kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan yang nyata, meskipun terdapat variasi nilai pada pengukuran antar triwulan di tahun 2025.

Grafik 24. Perbandingan Capaian SKM Tahun 2020 – 2025

Apabila dibandingkan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, capaian di PPS Bitung lebih tinggi yaitu 93,04. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPT dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja UPT, capaian indikator pada tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Pencapaian IKU ini adalah sebesar 92,54 atau 104,56% yang melebihi dari target tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, capaian SKM tetap menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, karena nilai yang diperoleh masih melampaui target dan berada pada kategori sangat baik.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini, maka diperlukan sumberdaya berupa anggaran dan sumberdaya manusia sebagai berikut:

a. Anggaran

Total alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp15.090.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran serta efisiensi penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 57. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari " Tahun 2025

Kegiatan Pendukung	Capaian RO (%)	Alokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	% Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
Forum Konsultasi Publik	100	15.090.000	15.037.000	99,65	1.509.000.000	1.493.963.000
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					9,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,90\%}{20} \times 50 \right)$					24,75%	

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.021/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, apabila nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja skala maksimal 100%. Oleh karena itu, dengan total alokasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan, maka capaian nilai efisiensi pada indikator kinerja ini mencapai 24,75%.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, PPS Kendari didukung oleh tim kerja yang berhubungan dengan pelayanan

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU yang telah dilakukan pada ini adalah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik di PPS Kendari yang dipimpin langsung oleh kepala PPS Kendari Bapak Asep Saepulloh sekaligus narasumber kegiatan FKP, serta dihadiri oleh perwakilan Dekan FPIK Universitas Halu Oleo, Dekan FPIK Universitas Muhammdiyah Kendari, PT. Sultratuna Samudera, PT.Kendari Bay Saefood, PT. Kelola MIna Laut, PT. Global Arta Borneo,

CV. Liras, Perumda Utama Sultra dan beberapa pengurus kapal. Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menghasilkan keselarasan seleruh petugas pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada para pengguna jasa sehingga kualitas pelayanan PPS Kendari semakin lebih baik lagi. Selain itu, publikasi hasil IKM di sosial media.

Gambar 28. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai SKM



3.2 REALISASI ANGGARAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp52.074.444.000 sesuai dengan DIPA terakhir tahun anggaran 2025. Realisasi anggaran hingga 31 desember 2025 sebesar Rp20.797.677.933 atau sebesar 39.94% dari total pagu anggaran.

Tabel 58. Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
KPPN 060				
1.	Pegawai	11.601.330.000	11.513.254.553	99,24
2.	Barang	10.820.594.000	8.494.877.327	78.51
3.	Modal	1.526.520.000	789.546.053	51.72
		23.948.444.000	20.797.677.933	86.84
KPPN 140				
1.	Modal	28.126.000.000	28.126.000.000	0
TOTAL		52.074.444.000	52.074.444.000	39.94

Tabel 59. Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Berdasarkan Kegiatan

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.219.638.000	1.735.203.633	5.39
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6.621.000	6.485.000	97.95
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	19.848.185.000	19.055.989.300	96.01
Jumlah		52.074.444.000	20.797.677.933	39.94

Realiasi berdasarkan tabel di atas didapatkan dari Sistem Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang disingkat aplikasi OM-SPAN dimana data realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi). Sedangkan berdasarkan aplikasi SAKTI, realisasi anggaran tahun 2025 sebesar **Rp20.805.533.092** atau sebesar **42.42%** dengan pagu sebesar **Rp52.074.444.000** (dimana pagu blokir sebesar Rp3.025.427.000 tidak diperhitungkan).

Adapun anggaran yang bersumber dari dana PHLN sebesar Rp28.126.000.000 belum dapat terealisasi pada tahun ini yang menyebabkan semakin kecilnya nilai penyerapan pada tahun 2025. Apabila jumlah total pagu efektif dikurangi dengan anggaran yang bersumber dari PHLN, persentase penyerapan sebesar **99,43%** dengan total realisasi sebesar **Rp20.805.533.092** dari total pagu efektif sebesar **Rp20.923.017.000**

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

158

Tindaklanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

158

Rekomendasi Tindaklanjut

159

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan salah satu unit eselon eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra PPS Kendari dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2025. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja PPS Kendari, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pada Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) PPS Kendari sebesar 110,06 atau berpredikat **ISTIMEWA**. Capaian keseluruhan indikator yang dilaporkan pada ini adalah sebanyak 10 IKU & IKM yang bernilai Istimewa (nilai di atas 110) dan 8 IKU & IKM yang bernilai Baik (nilai 90- <110). Hasil evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2025 tercapai Rp20.797.677.933 atau sebesar 39.94% dari total pagu sebesar Rp52.074.444.000.

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Adapun rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya yaitu Triwulan III tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti pada periode ini yaitu:

1. Melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pencapaian target nilai pengendalian lingkungan yang mengalami penurunan tiap triwulan.
(Data dukung terlampir)

2. Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya. (*Data dukung terlampir*)

4.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2025, rekomendasi/hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring IKPA secara berkala dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kanwil Sulawesi Tenggara serta Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap perihal pengelolaan anggaran PHLN



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

• • •



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Syahril Abd. Raup**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,


Syahril Abd. Raup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,241.04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76

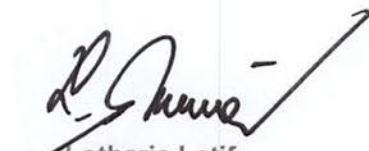
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,5
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.263.573.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.010.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.961.481.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2025		51.259.064.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,


Syahril Abd. Raup



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERUBAHAN I



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Asep Saepulloh**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Asep Saepulloh

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7.241,04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
15		Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92
17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,5
18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.263.573.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.010.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.961.481.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2025		51.259.064.000

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Asep Saepulloh



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERUBAHAN II



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Asep Saepulloh**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Asep Saepulloh

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,241.04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10
		8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
15		Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92
17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,5
18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.219.638.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6.621.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	19.848.185.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2025		52.074.444.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,


Asep Saepulloh

TINDAKLANJUT TRIWULAN III TAHUN 2025

Melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pencapaian target nilai pengendalian lingkungan yang mengalami penurunan tiap triwulan





NOTULEN RAPAT TIM SELARASKAN PPS KENDARI

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Desember 2025
Agenda : Evaluasi Pengelolaan Lingkungan melalui *Apk. SELARASKAN*
Tempat : Ruang Tim Kerja Sarana dan Sarana
Pimpinan Rapat : Purwanto, S.St.Pi
Notulis :

I. PEMBUKAAN

Rapat dimulai pada pukul 08:30 WITA oleh pimpinan rapat dengan tujuan mengevaluasi penurunan nilai pengelolaan lingkungan pada aplikasi SELARASKAN serta merumuskan langkah perbaikan yang perlu segera dilaksanakan oleh unit terkait.

II. PEMBAHASAN

1. Kebersihan Area Pelabuhan

- Evidence kebersihan yang diunggah dalam aplikasi SELARASKAN belum seimbang antara area darat dan kolam pelabuhan.
- Evidence kebersihan kolam pelabuhan tercatat sangat minim.
- Tim diminta untuk meningkatkan dokumentasi kebersihan kolam pelabuhan secara berkala dan proporsional.

2. Pengukuran Sampah Laut

- Tidak terdapat dokumentasi proses pengukuran sampah laut, terutama aktivitas petugas saat melakukan pengambilan data di area kolam pelabuhan.
- Ditekankan perlunya dokumentasi lengkap (foto tagging) setiap kegiatan pengukuran sampah laut sebagai bukti pelaksanaan.

3. Pengolahan Sampah

- Belum dilaksanakan edukasi pengolahan sampah kepada nelayan, tenan, ataupun pengguna jasa pelabuhan.
- Disepakati perlunya penyusunan dan pelaksanaan program edukasi pengolahan sampah secara rutin.

4. Pengukuran Kualitas Udara dan Air Laut

- Peralatan pengukuran kualitas udara dan kualitas air laut dianggap kurang akurat.
- Direkomendasikan pengadaan peralatan pengukur yang lebih akurat dan sesuai standar lingkungan.

5. Himbauan Keselamatan dan Keamanan Dermaga & Kolam Pelabuhan

- Tidak tersedia pamflet atau media himbauan keselamatan dan keamanan di area pelabuhan.
- Belum ada kegiatan sosialisasi terkait keselamatan dan keamanan dermaga.
- Diputuskan untuk segera membuat dan memasang media sosialisasi serta menjadwalkan kegiatan himbauan secara berkala.

6. Kepatuhan Tenan

- Pelaksanaan pengawasan kepatuhan tenan belum memiliki dasar penugasan resmi.
- Perlu diterbitkan surat tugas khusus untuk pelaksanaan monitoring kepatuhan tenan di kawasan PPS Kendari.

7. Pelaksanaan Sertifikasi dan Surveillance ISO 14001

- Disampaikan bahwa proses sertifikasi dan surveillance ISO 14001 harus segera dipersiapkan kembali.
- Perlu dilakukan evaluasi kelengkapan dokumen, pemenuhan aspek lingkungan, dan kesiapan lapangan untuk mendukung audit.

III. KEPUTUSAN / TINDAK LANJUT

1. Petugas kebersihan wajib melakukan dan memberikan dokumentasi kebersihan area darat dan kolam Pelabuhan. Jika dokumentasi kebersihan darat 30 hari maka kebersihan area kolam Pelabuhan harus 30 hari.
2. Wajib dokumentasi lengkap pengukuran sampah laut mulai bulan berjalan.
3. Harus ada kegiatan edukasi pengolahan sampah. Perlu adanya Kerjasama dengan Dinas Kebersihan, Kampus dan Pemerhati Sampah di Kota Kendari sehingga edukasi pengolahan sampah di PPS Kendari dapat berjalan.
4. Mengusulkan pengadaan alat ukur kualitas udara dan air laut melalui jalur anggaran yang tersedia.
5. Mendesain dan memasang pamflet himbauan keselamatan serta melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan dermaga.
6. Menerbitkan surat tugas monitoring kepatuhan tenan.
7. Membentuk tim kecil persiapan sertifikasi dan surveillance ISO 14001.

Mengetahui;
Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana

Notulen

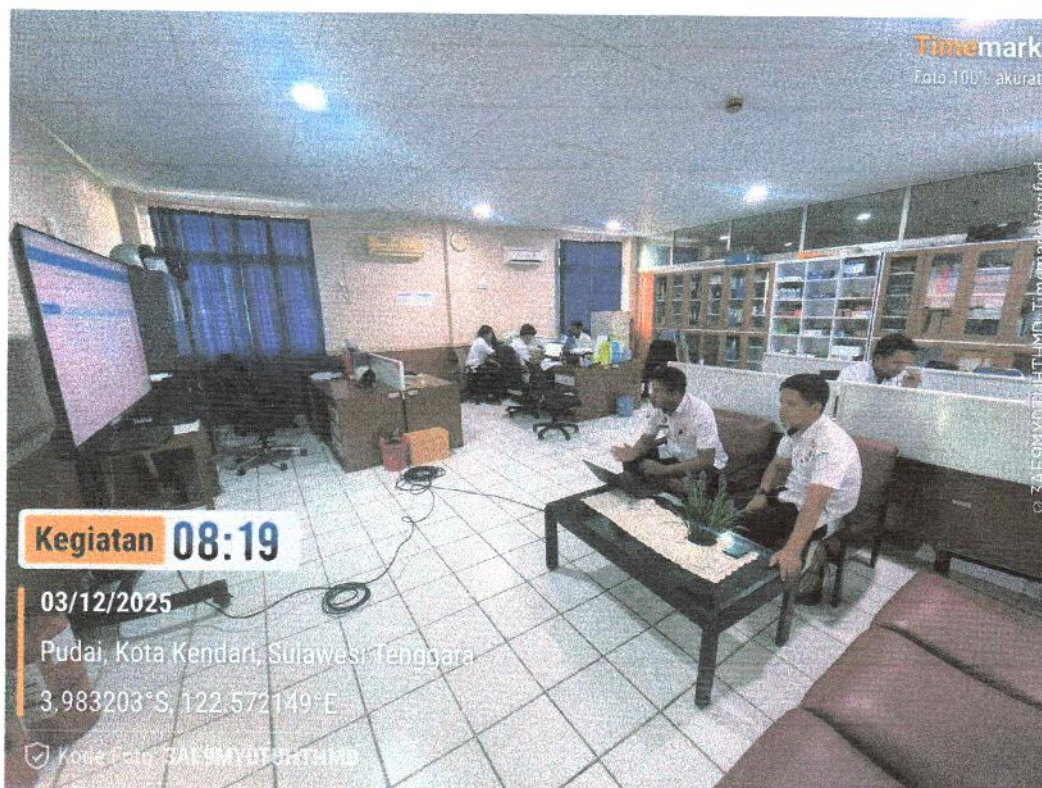


PURWANTO, S.St.Pi



DEWA AYU DIAH WULANDARI, S.T

DOKUMENTASI KEGIATAN



TINDAKLANJUT TRIWULAN III TAHUN 2025

Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisik



NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Pimpinan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tanggal 13 Oktober 2025

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal	: Senin 13 Oktober 2025
Jam	: 08.00 WITA - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Cakalang
Agenda	: Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja
Peserta	: Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Oktober 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka Evaluasi Capaian Kinerja pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari di ruang rapat Cakalang. Setelah melalui diskusi diperoleh risalah rapat sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang dihadiri oleh para ketua tim kerja, pengelola anggaran, pengelola Keuangan dan perwakilan anggota dari setiap tim kerja;
2. Pengarahan Kepala PPS Kendari adalah sebagai berikut:
 - a. Top Up BSI segera ditindaklanjuti
 - b. Mengusulkan untuk Katimja Pelayanan Usaha untuk sebaiknya siapkan Stok 3 Kamar rusun untuk Kepentingan Kantor
 - c. Perkembangan Pembangunan KNMP di Daerah, Ketika Petugas Lapangan KNMP di Tarik Sebaiknya diberikan Solusi harus ada calon pengganti
 - d. Untuk Katimja Kesyahbandaran dibuatkan konsep Surat Tugas untuk Penempatan CPNS Sesuai Kebutuhan Kantor, dimana Petugas syahbandar ini harus Betul-betul Onboard supaya tidak ada ditemukan keterlibatan BBM Subsidi dan Barang Berbahaya yang diedarkan di Atas Kapal
 - e. Evaluasi Capaian Penyerapan Anggaran sudah sampai mana
 - f. Membuat Strategi untuk Meningkatkan PNBPN
 - g. Para Katimja Sebaiknya Sering Memantau Perkembangan yang ada di Lapangan
3. Masukan/Arahan Tim Kerja Pelayanan Usaha:
 - a. Bangun Komunikasi dengan baik dari pihak KPKNL untuk meminimalisir penetapan harga yang relatif tinggi

- b. Capaian PNBP Non SDA Per 7 Oktober 2025, progress perminggu dengan Capaian PNBP 70,9% dari target 31 September 2025, dioptimalkan bisa mencapai PNBP 80% dari target
 - c. Ada 2 Potensi yang bisa dioptimalkan yaitu Pengadaan Air Bersih dan Jasa Pas Masuk, sebaiknya dioptimalkan lagi di sisa 3 bulan ini
 - d. Target Tambat labuh tidak ada pergerakan, Rusun relative tetap, PP Untia 20-25 juta signifikan tidak banyak pergerakan, sebatik 20-15 stagnan tidak banyak pergerakan
 - e. Terkait lahan segera bangun komunikasi dengan pihak sewa
 - f. Menyetujui Personil dari Tim PU an Abdullah Kadir dikembalikan ke Tim TKSP
 - g. Segera Mencari Investor untuk Sewa Costorage, Segera Lakukan Pemecahan Masalah Biaya Listrik untuk Menekan biaya tagihan
4. Masukan/Arahan Tim Kerja Operasional:
- a. Kegiatan PIPP digantikan dengan Perbaikan Coolbox
 - b. Pendapatan Produksi mencapai 72,5% dari presentase capaian produksi dari target 16 ribu ton
 - c. Revisi Anggaran sebaiknya dikomunikasikan dengan PPK untuk laporan ketersediaan Anggaran
 - d. Produksi harus tercapai karena termasuk dalam capaian IKU
 - e. Pengendalian dan Pengawasan harus dilaksanakan
 - f. Pelaporan Tim Operasional terkait TPI di Pintu 6 yang bocor segera tim TKSP menindaklanjuti laporan tersebut
5. Masukan/Arahan Tim Kerja TKSP :
- a. Pelaporan Kegiatan Pekerjaan perbaikan sumur 3 yang selesai dilaksanakan
 - b. Media Rapat itu harus menyamakan persepsi dan harus diketahui oleh semua orang yaitu Kepala Pelabuhan, PPK, PBJ, supaya arahnya sama
 - c. Sebaiknya Perbaikan Jalan, Toilet harus ditindaklanjuti segera, lakukan rapat Bersama KPA, PBJ, Rekanan PPS Tekait dan apara katimja, Sambil menunggu anggaran tersedia sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu
 - d. Perkembangan AFD sampai minggu ke tiga, membuat laporan awal kondisi pps Kendari
 - e. Mengikuti Progres Basic desain TAO, Data dukung itu tidak berat karena tidak ada pekerjaan reklamasi

6. Masukan/Arahan Tim Kerja Kesyahbandaran:

- a. Laporan Penempatan CPNS yang dikaji pada hari sabtu, 4 Oktober 2025 dengan pertimbangan dan identifikasi Pelabuhan dengan data produksi yang banyak maka pembagian penempatannya sebagai berikut :
 - Malik, cempae lero
 - Enedo, (Humas) pps Kendari
 - Anta Fadel, berau sambaliung
 - Anas, beba takalar
 - Andriyanto, kasiwa
 - Andika, humas pps kendari
 - Yusran, kolaka
 - Benny, pps Kendari
- b. Pelayanan Buku Pelaut sudah mengajukan 6 untuk tanda tangan dan penerbitan
- c. Masalah Pengisian BBM Subsidi pada tanggal 24 September 2025, kuota BBM sudah habis, Kuota BBM Migas berkurang dari sebelumnya 400 ton menjadi 368 ton ini menjadi kendala karena tidak ada komunikasi dari pihak PD Utama Sultra dengan BBM Migas. Pengisian BBM Subsidi akan normal setelah SK Kuota dari BBM Migas disetujui
- d. Analisa Kapal-kapal yang berisiko tinggi, sedang dan rendah segera dilaporkan atau disampaikan melalui Analisa power BI

7. Masukan/Arahan Tim Kerja Dukman :

- a. Pegawai harus mengikuti penyesuaian Ijazah dengan membuat makalah pekerjaan
- b. Assesment merupakan salah satu syarat apabila pegawai mengusulkan izin belajar
- c. Mengandendakan rapat selanjutnya untuk persiapan kedatangan Menteri dan tindak lanjut evaluasi kinerja pelayanan publik
- d. Capaian Anggaran per hari ini tanggal 13 Oktober 2025 mencapai 87% yang berasal dari gaji dan Listrik dan masih ada sisa 12%
- e. Pengadaan Kontrak PJLP sudah tidak ada di tahun 2026, dan akan tergantikan dengan Perekrutan sebagai Outsourcing dengan jabatan pramubakti
- f. Terkait Pemindahan Petugas Pu an Abdullah Kadir akan digantikan oleh pegawai pindahan dari PPN Sibolga

- g. Membuat Penilaian SKP masih harus dikomunikasikan jangan sampai menghalangi kenaikan pangkat pegawai, baik pegawai yang akan memasuki purna bakti (Pensiun) tetap harus mendapatkan penghargaan
- h. Mengandakan rapat selanjutnya, pada hari selasa, 14 Oktober 2025, dengan agenda pembinaan pegawai

Notulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emiliana', written in a cursive style.

Emiliana

DOKUMENTASI PEMBINAAN PEGAWAI



DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
 Jam : 08.00
 Acara/Kegiatan : Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Asep Saepuloh	Kalabala	
2.	Rasdiar	Bilal	
3.	Rudi Santoso	pu	
4.	Rurwanto	TRP	
5.	M. IKRAM	Kesyahbandaran	
6.	Hardiansyah	Kecamatan	
7.	Nurhan	Kantor Dekan	
8.	Joni Purnama	Tkpu	
9.	Saiful R.	Tksp	
10.	Emilia	Amam	
11.	Sylviani Amir	Ops	
12.	Mt. Huzani	Pencasila Koneksi	
13.	Romy Rachmad Ic	pu	
14.	Fauzan Yusuf	Syiahmedia	
15.	Made Benny W.	Kesyahbandaran	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Layanan Pengaduan



SCAN ME

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
 Jl. Samudera No.1 Punday, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233
 Telp. (0401) 3190868 Fax. (0401) 3190868 Email : info@pskd@yahoo.co.id

NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tanggal 3 Oktober 2025

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Senin, 3 November 2025
Jam : 08.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Cakalang
Agenda : Monitoring Evaluasi Kinerja Mingguan
Peserta : Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Senin, 3 November 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka Monitoring Evaluasi Kinerja Mingguan Pegawai di ruang rapat Cakalang. Setelah melalui diskusi diperoleh risalah rapat sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang dihadiri oleh para ketua tim kerja, pengelola anggaran, pengelola Keuangan dan perwakilan anggota dari setiap tim kerja;
2. Pengarahan Kepala PPS Kendari adalah sebagai berikut:
 - a. Terkait Pengadaan atau Pekerjaan yang akan dilakukan sebaiknya komunikasikan terlebih dahulu dengan PPK kantor, karena PPK Kantor yang punya kewenangan Pemeliharaan Kantor dan punya tanggung jawab dalam penerima hasil pekerjaan
 - b. Kepegawaian untuk memantau Memo muatasi an, Arifin dan Hariyadian Apriliyanto
 - c. Terkait Penyerapan Anggaran AFD sebanyak 28.000.000.000 tidak dapat direalisasikan karena di kantor pps belum on Progres AFD, tidak termasuk APBN yang ditargetkan mencapai 98%
 - d. Terkait SPJ, Tim Keuangan Sebaiknya lebih teliti lagi terkait pemenuhan dokumen atau kelengkapan dokumen, apabila ada SPJ yang Belum lengkap segera menghubungi yang Bersangkutan untuk segera dilakukan perbaikan
 - e. Pelaporan Katimja Kesyahbandaran Terkait AC di Ruang Operasional di TPI yang sudah lama rusak sebaiknya dicarikan solusi, apakah akan diperbaiki atau digantikan
 - f. Terkait Mutasi an. Hariyadian Apriliyanto di tim Operasional, sebaiknya digantikan dengan PPPK yang baru dilantik, an. Nuslim dan Megawati untuk penempatan Operasional

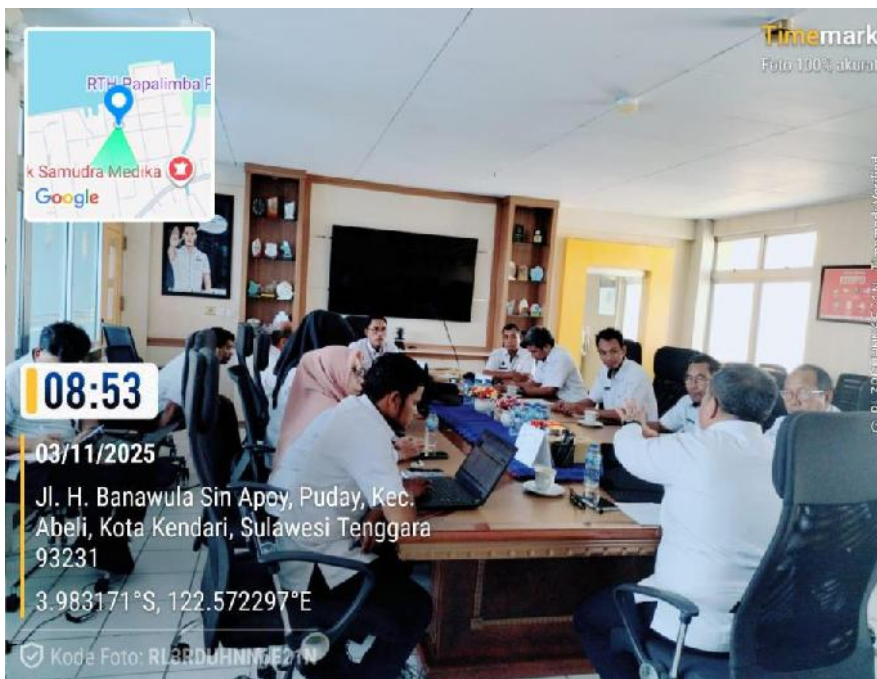
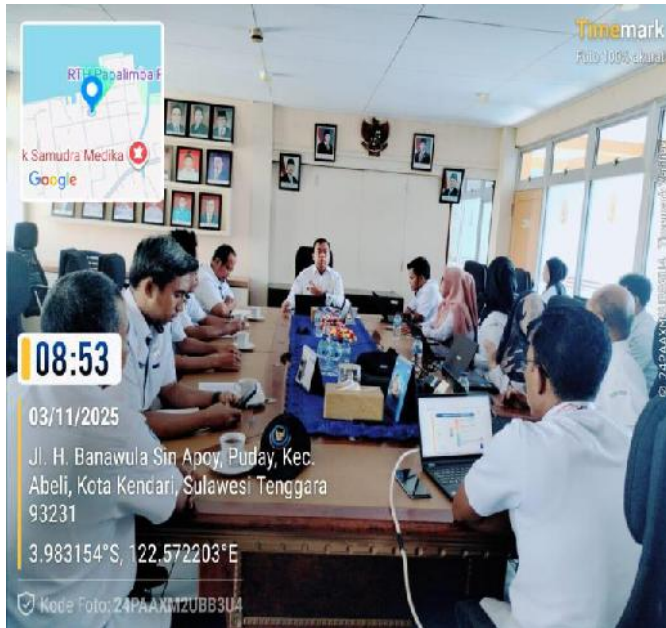
- g. Progres Kinerja Pelayanan Usaha sudah mencapai 1.600.000.000 atau 78%, dan masih ada sekitar 22% yang sementara on progres
- h. AFD Surveyor sudah hampir selesai
- i. Sebaiknya Membuat kolaborasi dengan Tim Kerja lain, seperti bimtek tambak labuh, pelayanan pas masuk, atau buat sosialisasi terkait PNBP
- j. Estimasi pencapaian PNBP ditargetkan 95%, untuk sekarang berada di peringkat 2 dan akan memaksimalkan lagi dengan cara pengembangan lahan PT. Janeeta
- k. Syahbandar Koordinasi dengan Pelayanan Usaha untuk peningkatan PNBP non SDA dengan cara memperketat absen kapal
- l. Terkait PNBP Pasca Produksi, dari segi pengawasan kapal yang sedikit hasil tangkapannya akan dilakukan pemanggilan di ruang kepatuhan dengan penanggung jawab an. Faisal Yusuf
- m. Terkait Percetakan Blanko, sebaiknya komunikasikan dengan PPK
- n. Terkait Kehumasan, dimana penanggung jawabnya CPNS an andika dan Unedo akan mengikuti pembekalan diklat, sebaiknya secepatnya mencari solusi untuk menggantikan sesuai kualifikasi yang ada
- o. Perbaiki sumur yang kondisi stok airnya sedikit, secepatnya dilakukan pemeliharaan, dengan anggaran tersedia 8.300.000
- p. Terkait Percetakan Balanko, Persediaan ATK dan Komputer Supply di tahun 2026 akan di blok

Notulis,



Emiliana

DOKUMENTASI PEMBINAAN PEGAWAI





DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal :
Jam :
Acara/Kegiatan :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Asep. Saepulloh	Katabua	
2.	MUKHTAR, A.P.	Imoposional	
3.	Bros Santosa	pelayanan usaha	
4.	M. IKRAM	Kesyahbandaran	
5.	Rusdian. A	Dukman	
6.	Wagyan Eudiana	Apk APPAL Nudla	
7.	Katavin	TKSP	
8.	FIRDAUS	PU	
9.	Nurul Hudaib	Amah SDMA Pertama	
10.	Wd. Nuriani	Pencadola Kaurugari	
11.	Murim	Dukman	
12.	Sylviani Amir	operasional	
13.	Indi HUT Bur-yanti	Dukman	
14.	Emiliaha	Dukman	
15.	IKHMAN MAFTI A	TKSP	
16.	Ruglen	Kesyahbandaran	
17.	Fansal Yusuf	---	
18.			
19.			
20.			

Layanan Pengaduan



KLIK ME

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
Jl. Samudera No.1 Puday, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233
Telp. (0401) 3190868 Fax. (0401) 3190868 Email : info@pskd@yahoo.co.id

NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tanggal 22 Desember 2025

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal	: Senin, 22 Desember 2025
Jam	: 09.00 WITA - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Cakalang
Agenda	: Monitoring Evaluasi Kinerja
Peserta	: Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Senin, 22 Desember 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka Monitoring Evaluasi Kinerja Pegawai di ruang rapat Cakalang. Setelah melalui diskusi diperoleh risalah rapat sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Rapat yang dihadiri oleh para ketua tim kerja, pengelola anggaran, dan perwakilan anggota dari setiap tim kerja;

2. Pengarahan Kepala PPS Kendari:

- Terkait Masalah Perizinan banti koordinasikan dan Komunikasikan dengan Baik
- Terkait SPJ, Tim Keuangan Sebaiknya lebih teliti lagi terkait pemenuhan dokumen atau kelengkapan dokumen, apabila ada SPJ yang Belum lengkap segera menghubungi yang Bersangkutan untuk segera dilakukan perbaikan
- Capian PNBP SDA Sebaiknya dimaksimalkan Waktunya dengan Baik, dengan Adanya Bantuan dari Pendata dari Magang Kemnaker, Membantu Proses kelancaran Pendataan Ikan
- Potensi Alat Berat ini Tingkatkan lagi, Sebaiknya Tranfer Ilmu ke Pegawai yang lain, harus mulai dari sekarang mencetak regenerasi baru
- Adanya Kunjungan dari Walikota mengenai Audiensi di kantor PPS Kendari
- Penyerapan Anggaran PPJ dioptimalkan kembali
- Lakukan Sosialisasi Cortex ke Pegawai dan Sebaiknya dipandu untuk laporan SPT Pajak jangan Sampai Ketinggalan
- Pengadaan laptop yang sudah ada seabiknya diberikan ke pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dapat menunjang pekerjaan.

- i. Progres Anggaran sudah Sampai mana, ditinjau kembali
- j. Operator WC di Dermaga dari sisi Kebersihan dipantau, setelah pembongkaran selesai sebaiknya harus dikunci kembali
- k. Terkait Penerangan atau Lampu sebaiknya Petugas Satpam lakukan Pengecekan , apabila sudah mulai terang atau setelah selesai Melaksanakan Sholat Subuh, lampunya dicek sudah bisa dimatikan
- l. Terkait LKU yang Macet dibantu dan didampingi apa kendalanya
- m. Hasil Pemeriksa Kedatangan Kapal (HPKD) harus dikomunikasikan dengan Baik, Jangan Dorong PMS masuk kebagian Kelaikan kapal, harus terpisah dengan menyesuaikan instruksi pimpinan atau aturan yang berlaku
- n. Menyampaikan Persyaratan Mengenai Kelaikan kapal terhadap Pelabuhan Binaan dengan Melakukan Program KKP dan DJPT
- o. Apabila ada Pegawai yang Masih Lama masa Pensiunnya, Sebaiknya dipindahkan Ke Rumah Dinas yang Masih Layak, dan Rumah dinas yang sudah kosong dan sudah tidak Layak 80%, sebaiknya di hapus dan dirobohkan
- p. Gudang dan Lapangan dirapikan
- q. Terakit IKU yang tidak Tercapai karena Penyerapan Anggaran AFD sebanyak 28.000.000.000 tidak dapat direalisasikan karena di kantor pps belum on Progres sebaiknya Dibuatkan laporan atau Surat Pemberitahuan
- r. Mengenai Rotasi Pegawai, apabila ada yang harus dirotasi, Masing-masing Katimja sudah mulai membuat Draft Akhir Desember TA. 202 sudah ada Penugasannya Baik itu PNS dan PJLP
- s. Katimja PU Sebaiknya Diperhatikan lagi aturan dan Persyaratan Tinggal di Rusun, Sebaiknya di siapkan Dokumen Pendukung Berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- t. Untuk Tim Kerja Kesyahbandaran untuk Menjadwalkan Rapat Zoom Meeting Kepala PPS Kendari dan Pelabuhan Binaan dengan Agenda Rapat Evaluasi dan konsolidasi
- u. Kedepannya Strategi Peningkatan PNBP Tahun 2027-2028 Masih di Angka yang sama yaitu 7.2. dengan Meningkatkan layanan Jas Pas Masuk yang lebih diperhatikan lagi, Alat berat, Dan Menaikkan Level kartu langganan menggunakan Cash Loss atau e-money

3. Tim Kerja Kesyahbandaran:

- a. Sosialisasikan oleh SIPI dan Hasilnya pengurus Kapal rata-rata mendapat Informasi mengenai informasi terkait Perpanjanagan Perizinan Kapal

- a. Anggaran yang sifatnya Penting dicarikan solusi untuk anggarannya agar cepat terealisasi.
- b. Informasi Laporan Kegiatan Usaha (LKU) yang sudah menyampaikan laporan LKU sebanyak 170 Kapal izin Pusat dan baru sekitar 26 yang lolos Verifikasi izin pusat dan Sekitar 200 kapal yang belum melaporkan Laporan Kegiatan Usaha (LKU)
- c. Sebanyak 28 Kapal mengajukan Izin pusat tapi belum ada yang terbit izin pusatnya
- d. Keluhan Pengurus Kapal ke Pelayanan PSDKP Terakit Rekon Bongkar, dimana Petugas sering Terlambat di Bagian System Aplikasi

4. Tim Kerja TKSP:

- a. Terkait Rumah Dinas yang ada di Bukit Asam, Sebagai Pertimbangan akan dilakukan Pengecetan dan Pergantian Pagar
- b. Bagian Penerang atau Lampu Jalan Sekitaran Rumah Dinas sudah diganti tapi ada Kendala kembali Lampunya mati dan sekarang masih Progres Perbaikan
- c. Mengenai Petugas yang Bertanggung Jawab Dibagian Alat Berat Sampai Sekarang Belum ada Transfer Ilmu Ke Pak Saiful dengan Kendala Pekerjaan yang Padat, Sehingga tertunda, dan Transfer ilmu Sebaiknya lebih dari 1 orang, baik itu dari Tim Kebersihan, Tim TKSP supaya kedepannya Apabila dibutuhkan ada cadangan yang akan Menggantikan Tugas Tersebut.

5. Tim Kerja Dukman :

- a. Terkait Penyerapan Anggaran sudah mencapai 97,21 % dan masih ada sekitar 400-500 yang belum terserap
- b. Pengadaan Laptop, PC, Printer, Finjer Print sudah Tiba
- c. IKU yang tidak tercapai terkait Penyerapan Anggaran yang sekitar 28.000.000.000 mengenai AFD
- d. Dokumen Pemenuhan PBJ dan WBK per sub Tim harus dari sekarang disiapkan

6. Tim Kerja PU :

- a. Ada 2 Capian Iku yang Pertama Non SDA dan Capian Usulan Analisa Pengusahaan Pijak ketiga dan Investor
- b. Meteran di Perusahaan akan Segera dilakukan pengmatan dan Perbaikan
- a. Kontrak Bangunan dan Tanah mencapai 1.280.000.000 dengan pelaihan Kenaikan Tarif

- b. Capaian Perolehan Tarif yang didapat dari Layanan Pas Masuk Mengalami Kenaikan sebanyak 981.000.000 Menjadi 1.090.000.000
- c. Perolehan Capaian Tambak labuh Sekitar 482.000.000
- d. Piutang Negara di Prediksi sebanyak 88 Juta per tanggal 31 Desember 2025 yang masih proses penagihan
- e. Kontrak Berita Terkait Demo di KKP, akan dikomunikasikan dengan narasi Berita dengan Mengambil 2 Responden dari Konawe dengan Statement KNMP, dan Nelayan yang ada di Kantor PPS Kendari, dan Statement Kepala Pelabuhan PPS Kendari Mengenai Dukungan KKP, dengan Nrsi Berita Dukungan Nelayan Sultra terhadap Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Secara Garis Besar Capaian Mengalami Kenaikan, Baik itu dari Penumpukan Barang, Sarana Transportasi alat berat berupa Forklift, crane dan IPAL
- d. dibutuhkan ada cadangan yang akan Menggantikan Tugas Tersebut.

7. Tim Kerja Operasional :

- a. Dari Tim Operasional kenaikan Prouksi Ikan Per Tanggal 21 Desember 2025 Sekitar 16.04 TON dengan melebihi target Produksi Operasional
- b. Kenaikan PNBP SDA yang Akumulasi PPS Kendari dengan Pelabuhan Binaan Sekitar 48.07 %
- c. Menyikapi Peserta Magang Kemnaker yang bertugas di Pendataan Ikan, untuk Sekarang Sudah Mulai Aktif, Namun Ada Kendala Terkait Absensi dan Laporan di Apikasi Kemnaker Yang Sekarang masih dikeluhkan
- d. Jadwal Piket Tim Operasional akan diatur lagi

Notulis,



Emiliana

DOKUMENTASI RAPAT MONIROTING DAN EVALUASI KINERJA

DAFTAR HADIR



DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Senin / 22 Desember 2025
 Jam : 9:00 - Selesai
 Acara/Kegiatan : Evaluasi Kinerja

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Asep. S	Kasabane	
2.	M. KRAM	Kesyahbandaran	
3.	Ruslan A	Hum	
4.	Budi Santoso	Katim Pelayanan Usaha	
5.	Rurungo	TEU P	
6.	Emiliaa	Dukman	
7.	Nurul Hikmah	Analus SOMA	
8.	Sylviani Amir	Operasional	
9.	HARDIANA	Pelayanan usaha	
10.	Ikam Usaki R.	Itsp	
11.	Andi Nur Qur'anti	BMN	
12.	Muli Kuslan	Kesyahbandaran	
13.	Maide Benny	Kesyahbandaran	
14.	Hariyadian A	OPS	
15.	Haryulianti	Dukman	
16.	Saskia	Dukman	
17.			
18.			
19.			
20.			

Layanan Pengaduan



SCAN ME

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
 Jl. Samudera No.1 Piday, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233
 Telp. (0401) 3190868 Fax. (0401) 3190868 Email : info@pskd@yahoo.co.id